



LAPORAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN TAHUN 2023
**PELAKSANAAN MONITORING DAN
EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA**

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. DASAR HUKUM	5
1.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	7
1.4. URAIAN KEGIATAN.....	9
1.5. Waktu Pelaksanaan.....	9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	10
2.1 Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	10
2.1. Pelaksanaan Kegiatan.....	12
1. Rapat Koordinasi	12
2. Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota terkait Kemiskinan	12
3. Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota terkait Penyusunan dan	
Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)	29
4. Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota terkait Pelaksanaan	
Latsitardanus XLIII/2023 di Sumatera Barat.....	31
5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai APBN di Balai/UPT	
Kementerian	33
BAB III PENUTUP.....	36
LAMPIRAN	37

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Karunia-Nya, penyusunan buku Laporan Tahunan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif serta sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang SDA, maka dilaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup pertanian, pangan dan perikanan antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku laporan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 31 Desember 2023

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,



Ir. Benny Sakti, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19670927 199403 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan melalui kajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu aspek dalam siklus manajemen pembangunan yang belum diimplementasikan dengan baik, tepat dan berkesinambungan. Evaluasi merupakan alat bantu pemerintah dalam

menyusun, menetapkan dan mengelola kebijakan. Dalam konteks dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD, evaluasi berguna untuk menelusuri, mengukur, dan menganalisa hasil dan capaian pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Artinya, evaluasi perlu dilakukan atas kebijakan/prioritas pembangunan, fokus prioritas, program pembangunan atau kegiatan prioritas. Analisisnya mencakup berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan tersebut, termasuk pencapaian target dan sasarnya. Dalam kaitan itu, evaluasi juga perlu dilakukan atas isu – isu pembangunan yang secara dinamik terus bergulir.

Salah satu tugas penting Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah yang selama ini dilaksanakan Perangkat Daerah. Secara lebih umum, pemantauan melalui kunjungan ke lapangan dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Provinsi Sumatera Barat, APBN Pusat dan Dana Alokasi Umum (DAU). Monitoring dan evaluasi semacam ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.

Diharapkan monitoring dan evaluasi serta koordinasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat bermanfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan dan rujukan ketika menyusun perencanaan dan khususnya ketika melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan, prioritas dan fokus prioritas/program beserta target/sasaran maupun indikator kinerja terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam maka dilaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang SDA antar

perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.2. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207 tanggal 30 Desember 2022);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 13 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022);

- 14 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 15 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- 16 Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- 17 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

1.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Tujuan dari sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA adalah :

1. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan dan telah dilakukan.
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya berkaitan dengan fungsi pelaksanaan program kegiatan bagi masyarakat dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan pada tahun 2023.

Adapun sasaran dari sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA adalah :

1. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinu (terus menerus) mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan.
2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Memberikan rekomendasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat dicapai pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.
4. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

1.4. URAIAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana melalui APBD awal Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 100.391.900,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 92.567.900,- yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
2. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan lingkup bidang SDA
3. Melaksanakan koordinasi terkait lingkup Bidang SDA dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan lingkup bidang SDA
5. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, akselerasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang SDA ke Kabupaten/Kota.
6. Pengadaan alat tulis
7. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

1.5. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA selama 12 bulan terhitung mulai Januari - Desember 2023

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda yang dilakukan secara terus menerus dan berkala.

Sebagai salah satu sumber bahan pemenuhan data dan informasi daerah tentang perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, hasil kegiatan monitoring selanjutnya diolah kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan melalui kegiatan atau pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit kerja/instansi terkait. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel serta transparan sehingga *output* dan *outcome* nya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan meliputi :

a. Persiapan

Kegiatan persiapan yang dilaksanakan meliputi *baseline* data yang teranggarkan pada APBD dan DAK Tahun Anggaran 2023, inventarisasi data lokasi, pemilihan lokasi berdasarkan data perangkat daerah.

b. Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen RKPD dan APBD Provinsi Sumatera Barat TA 2023.

Keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan kegiatan yang diharapkan adalah :

1. Data perkembangan kemajuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Data identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.1. Pelaksanaan Kegiatan

1. Rapat Koordinasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 dan untuk mengoptimalkan pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 maka diperlukan evaluasi terhadap capaian tahun 2022 serta strategi percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 dan identifikasi rencana usulan tahun 2024. Agenda rapat adalah untuk evaluasi capaian tahun 2022, penentuan objek monitoring dan evaluasi prioritas tahun 2023 dan identifikasi rencana usulan tahun 2024.

Rapat dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/15/II/Eko-SDA/Bappeda-2023 Tanggal 16 Januari 2023 dan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023. Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Hasil rapat sebagaimana terlampir.

2. Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota terkait Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi sumber utama kekurangan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas di segala bidang kehidupan. Kemiskinan dan dampaknya hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan sumber daya yang terbatas serta manajemen kebijakan negara yang kurang tepat. Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multi dimensional sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan dukungan dari swasta. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan

berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, Gubernur diminta untuk mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi serta mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan monitoring dan evaluasi atas program-program terkait penanggulangan kemiskinan terhadap pencapaian target pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, diperlukan data kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim Tahun 2022. Untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah ke Kabupaten/Kota. Dari kunjungan ke Kabupaten/Kota tersebut, didapat data dan informasi sebagai berikut ;

1. Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan sudah dalam tahap validasi akhir di Bagian Hukum terkait dokumen kemiskinan daerah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sementara Rencana Aksi Tahunan belum disusun, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum disusun, SK TKPK dalam tahapan akhir pengesahan di Bagian Hukum. Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari sebagian sudah terlaksana, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses. Total anggaran program penanggulangan kemiskinan daerah sebesar Rp. 319.137.462.114,-. Kendala pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah lemahnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan pemerintahan nagari dalam penyelesaian validasi data. Saran : agar ada kalender kegiatan mengenai TKPK dari Provinsi untuk diseragamkan oleh seluruh kabupaten/kota.

2. Kabupaten Agam

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah masih dalam proses penyusunan. Rencana Aksi Tahunan sudah ada. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada. SK TKPK merupakan SK perubahan karena fungsional baru, yang ada SK tahun 2021. Sudah serah terima data P3KE. Validasi data P3KE oleh nagari sedang dalam proses. SK validasi oleh Kepala Daerah belum ada, Program penanggulangan kemiskinan daerah yaitu:

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Beasiswa Miskin
- Sosialisasi pendataan masyarakat untuk mempunyai kartu jaminan kesehatan
- Penyaluran rastra
- Bantual sosial
- Kartu Indonesia Pintar
- Kartu Keluarga Sejahtera
- Program pemberian makanan tambahan
- Program Keluarga Harapan
- Program pengembangan rumah tidak layak huni
- Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin,

Kendala pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah ketidaksinkronan data, contoh pada Dinas Pertanian (masyarakat/kelompok tani penerima bantuan tidak terdaftar) dan Dinas Perkimtam (penerima rumah layak tidak huni tidak terdaftar dalam data P3KE).

3. Kota Pariaman

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Tahunan sudah ada. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada. SK TKPK sudah ada. Serah terima data P3KE sudah ada. Validasi data P3KE oleh nagari lebih 500 orang miskin, setelah validasi hanya 70 org. SK validasi oleh Kepala Daerah sudah ada, Program penanggulangan kemiskinan daerah meliputi:

- Pendidikan: Pendidikan Gratis, SAGA SAJA, Kartu Pariaman Pintar, Bus Sekolah Gratis. OPD penanggung jawab : Dinas Pendidikan
- Kesehatan: Layanan Kesehatan Gratis, Kartu Pariaman Sehat, Jaminan Persalinan Gratis. OPD penanggung jawab: Dinas Kesehatan
- Infrastruktur: Peningkatan Akses Transportasi, Akses Air Minum & Sanitasi Layak
- Ekonomi & Sosial: Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Jamban Sehat, Fasilitasi dan Bantuan Modal dan sarana usaha bagi UMKM, Bantuan BIBIT, Bantuan Sembako, Pengembangan Digital Market, Bazar Pangan Murah, Penyalurutan Pencari Kerja, Pengembangan Potensi Wisata melalui Spot Tourism, Eco Tourism, Desa Wisata

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan secara terpadu
- Program penanganan melalui Pendanaan Pemerintah Pusat relatif bersifat sektoral dan memiliki ketentuan sesuai petunjuk teknis masing-masing K/L
- Belum optimalnya pengelolaan sistim informasi data penduduk miskin terpadu sebagai basis data yang valid dan akurat

4. Kota Padang Panjang

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah masih memakai SPKD karena perodesasinya s/d 2023. Rencana Aksi Tahunan sudah ada. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sudah ada. SK TKPK sudah ada. Serah terima data P3KE sudah ada. Validasi data P3KE oleh nagari masih dalam proses. SK validasi oleh Kepala Daerah masih dalam proses. Program penanggulangan kemiskinan daerah meliputi:

- Jaminan sosial berbasis keluarga (PKH, BOS, Bantuan siswa miskin, jamkesmas/jamkesda, BPNT) : Dinas Sosial
- Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan (KUBE) : Dinas sosial

- Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (KUR) : Dinas Sosial
- Peningkatan dan perluasan program pro rakyat (program air bersih untuk rakyat, program pemasangan jaringan PDAM untuk masyarakat miskin) : Dinas PU

Kendala dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yaitu komitmen pimpinan (*political will*), terkait dengan pemilu ada kekhawatiran masyarakat terkait dengan validasi data, masih memakai 14 indikator BPS.

5. Kabupaten Padang Pariaman

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah masih dalam proses penyusunan. Rencana Aksi Tahunan ada. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada. SK TKPK ada. Validasi data P3KE oleh nagari sedang proses. SK validasi oleh Kepala Daerah sedang dalam proses. Program penanggulangan kemiskinan daerah terdiri dari:

- Program Penataan Desa, Dinas PMD
- Program Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3A
- Program Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial P3A
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial P3A
- Program Perlindungan Perempuan, Dinas Sosial P3A
- Program Penanganan Bencana, Dinas Sosial P3A

Total anggaran Rp. 4.280.705.700,-.

Kendala pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah anggaran dan sumber daya terbatas.

6. Kabupaten Solok

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada, Rencana Aksi Tahunan belum ada. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada. SK TKPK ada. Serah terima data P3KE sudah ada. Validasi data P3KE oleh nagari sudah dilaksanakan, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses penandatanganan oleh bupati. Program penanggulangan kemiskinan daerah meliputi:

- Program Pengelolaan Pendidikan, Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Program Pengembangan UMKM, DKUKMPP
- Program Administrasi Pemerintahan Desa, DPMN
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), DPPKBP3A
- Program Kawasan Permukiman, DPRKKP
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan dan Pangan
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Dinas Pertanian
- Program Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja, DPTSP dan Naker

Total anggaran Rp. 20.771.951.459,-. Kendala pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan :

- keterbatasan anggaran,
- perlunya integrasi program pusat, provinsi dan kabupaten
- SDM di lapangan kurang (PSM, SKSK, PHK, Tagana, Karang Taruna)
- Pemerintah Desa kurang respon dan keperdulian (kepala desa sedang diganti)
- Koordinasi antar SDM dengan desa, Kecamatan dan Dinas terkait
- Jumlah Kelompok sasaran lebih besar dari ketersediaan program/kegiatan dan alokasi dana
- Belum optimalnya integrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan

Saran : untuk dapat memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan masalah pada *by name by address*.

7. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Tahunan dalam proses penyusunan, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data oleh Nagari P3KE sedang proses tingkat Desa, SK validasi oleh Kepala Daerah belum, Program penanggulangan kemiskinan daerah terdiri dari:

- program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- program pengelolaan perikanan tangkap
- program pengelolaan perikanan budidaya
- program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- program pendidikan dan latihan perkoperasian
- program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- program pengembangan umkm
- program perencanaan dan pembangunan industri
- program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- program penyelenggaraan jalan
- program kawasan permukiman
- program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)
- program pengembangan perumahan
- program rehabilitasi sosial
- program perlindungan dan jaminan sosial
- program pengelolaan keuangan daerah

Total anggaran sebesar Rp.95.426.946.622,-. Kendala pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah belum optimalnya integrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

8. Kabupaten Solok Selatan

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan belum ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Program pemenuhan upayakesehatanmperoranganmdan upaya kesehatan masyarakat
- Program rehabilitasi sosial
- Program perlindungan dan jaminan sosial
- Program penanganan bencana
- Program pengembangan perumahan
- Program kawasan perumahan
- Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program pengelolaan perikanan budidaya
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro
- Program pengembangan UMKM

Total anggaran Rp. 114.364.524.345,-. Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Semakin sempit ruang fiskal daerah sehingga upaya untuk menghilangkan kantong-kantong kemiskinan menjadi terbatas
- Pemahaman tentang DTKS dan P3KE belum seragam
- Jumlah RT penerima PKH di kabupaten Solok Selatan relatif rendah di antara kabupaten/kota lainnya

Saran : Perlu pemahaman yang seragam antara OPD Provinsi dan Kab/kota terkait DTKS dan P3KE.

9. Kota Bukittinggi

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari sedang dalam proses, SK validasi oleh Kepala Daerah belum ada, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah, Program Pengolahan Pendidikan.
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat,
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program perlindungan dan jaminan sosial, Program Penanganan Bencana
- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja

Total anggaran pada APBD Rp. 12,836.516.400 dan APBN Rp. 9.356.202.680,-. Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Kesulitan dalam menentukan instrumen / indikator dalam melaksanakan validasi di tingkat kelurahan
- Belum adanya petunjuk teknis dalam melaksanakan validasi di tingkat kelurahan

Saran : melaksanakan rapat koordinasi di tingkat provinsi dengan mengundang Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pengetahuan/kapasitas TKPK Kabupaten/Kota dengan menghadirkan narasumber/ tenaga ahli TNP2K.

10. Kabupaten 50 Kota

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Tahunan dalam proses penyusunan, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah tidak ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari sebagian sudah terlaksana, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses. Total anggaran sebesar Rp.24.421.307.600,-.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Lemahnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan Pemerintahan Nagari dalam penyelesaian validasi data
- Dari 79 Nagari, baru 56 Nagari yang mengirimkan verifikasi data
- Minimnya ketersediaan atau kecukupan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan daerah

Saran:

- Agar ada kalender kegiatan mengenai TKPK dari Provinsi untuk di seragamkan oleh seluruh kabupaten/kota
- Agar Penanggulangan Kemiskinan menjadi prioritas oleh kepala daerah dengan intervensi dari provinsi dan pusat
- Agar ada konvergensi dengan institusi-institusi terkait dalam mendapatkan data yang lebih valid dan efektif.
- Tagging anggaran PEMKA 212 prioritas agar segera di selesaikan

11. Kabupaten Pasaman Barat

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada, Rencana Aksi Tahunan tidak ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah belum ada, Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Komitmen secara umum sudah tertuang dalam RPJMD namun implementasinya belum menjadi pembicaraan kebijakan di tingkat pengambil kebijakan.
- Perlu masukan data dan informasi dari perangkat daerah.

- Perubahan personil penanggung jawab kemiskinan menjadi kelemahan dalam melakukab koordinasi. Selain itu SDM pengelola data di perangkat daerah belum memadai.

Saran :

- Pengambil kebijakan: kemiskinan menjadi isu utama dalam pembangunan, dan melakukan rakor rutin.
- Kegiatan penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan multi sektor : perlu sinergi dan kolaborasi untuk memecahkan permasalahan pada seluruh dimensi (pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, infrastruktur). Selain itu,perlu ada dorongan dari pemerintah pusat dan pprovinsi, agar isu ini dapat menjadi isu yang kuat sampai ke daerah.
- Dokumen RPK dan RAT harusnya menjadi rujukan yang diperjuangkan bersama dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten (memiliki *timeline/* terukur) agar ada keseragaman dokumen dan keseragaman pelaksanaan penyusunan.
- Pengelolaan isu penanggulangan kemiskinan terdistribusi ke perangkat daerah. Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan kewenangan.

12. Kota Sawahlunto

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah belum. Program penanggulangan kemiskinan daerah terdiri dari:

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Data kemiskinan belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Masih banyak ditemukan warga miskin yang tidak mendapat bantuan, sementara itu warga yang tidak miskin ada yang mendapat bantuan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sawahlunto masih belum valid.
- Belum optimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai dengan tugas pokoknya.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan belum memiliki konsep yang tepat sehingga upaya tersebut belum tercapai.
- Pola pikir dan mental miskin masyarakat.
- Sebagian kecil masyarakat Kota Sawahlunto khususnya kalangan warga tidak mampu, cenderung mempunyai pola pikir dan mental miskin,

sehingga kurang produktif, kurang tekun, kurang serius bekerja, kurang keberanian untuk memulai usaha dan mengharapkan menerima bantuan dari Pemerintah

Saran :

- Peningkatan kualitas *database* kemiskinan melalui pemutakhiran data base DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diperbaharui secara periodik dengan rentang periode tertentu agar di dapatkan data yang valid sehingga pemberian bantuan tepat sasaran.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan serta antar kabupaten/kota dan provinsi.

13. Kabupaten Sijunjung

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sudah ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah belum ada, Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Masih ada keluarga miskin yang tidak masuk ke dalam DTKS maupun Data P3KE sehingga masih terjadi *exclusion error* dan *inclusion error*.
- Keluarga miskin banyak yang tidak tergabung dalam kelompok tani maupun kelompok usaha lainnya sehingga tidak mendapatkan akses bantuan usaha.
- Tempat tinggal keluarga miskin ada yang berpencar dan jauh dari permukiman sehingga sebagian dari mereka tidak mendapatkan infrastruktur jalan, air minum, dan sanitasi layak.

Saran :

- Adanya fasilitasi bimbingan teknis penyusunan dokumen RAT dan LP2KD untuk Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga terbentuknya persamaan persepsi dan penyusunan dokumen terlaksana sesuai ketentuan.
- Perlu dilaksanakan rakor penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera barat secara berkala yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga program penanggulangan kemiskinan di

Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota berjalan sinergi dan konvergensi program dapat terwujud.

- Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan/kemiskinan ekstrem yang tinggi perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

14. Kabupaten Tanah Datar

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan dalam proses penyusunan, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah, Total anggaran Rp.177.511.454.715,-.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah tidak adanya petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data P3KE.

Saran : mohon adanya pencerahan terkait pengelolaan data P3KE serta penyusunan Dokumen RPKD dan RAT dari instansi terkait dan dari Kementerian PMK maupun dari TNP2K.

15. Kota Padang

Belum ada data

16. Kota Solok

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan belum ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah ada. Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Pengelolaan Pendidikan
- Pengelolaan PAUD
- Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan UKM
- Peningkatan Ketahanan Pangan
- Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Peningkatan Kualitas Keluarga
- Pemberdayaan UMKM
- Pengembangan UMKM
- Pengembangan Perumahan
- Kawasan Permukiman
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pemberdayaan Sosial
- Rehabilitasi Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Total anggaran Rp. 31.728.872.853,-. Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Koordinasi antar pemerintah dengan swasta belum optimal
- Jumlah sasaran (keluarga miskin) di Kota Solok sangat dinamis karena lokasi geografis dan potensi ekonomi
- Efisiensi penggunaan anggaran oleh OPD

Saran

- Mengoptimalkan peran swasta dalam perencanaan dan penanggulangan kemiskinan
- Mengoptimalkan fungsi *stakeholder* dalam sistem pendataan
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi untuk pendataan keluarga miskin
- Meningkatkan monev program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh OPD

17. Kabupaten Pasaman

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, SK TKPK belum ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Program Wajib Belajar 12 tahun
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan masyarakat dan perorangan

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Belum adanya satu data yang valid yang dapat diakses oleh seluruh OPD Pemangku Kemiskinan untuk dapat di intervensi secara bersama
- Ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan masih bersifat makro
- Belum adanya proses perencanaan sampai evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan

Saran:

- Menyiapkan satu data kemiskinan yang valid dan dapat diakses bersama untuk diintervensi bersama-sama juga.
- Menyiapkan satu aplikasi yang memuat perencanaan sampai dengan Evaluasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta data Penanggulangan Kemiskinan

18. Kabupaten Dharmasraya

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah ada, Total anggaran Rp.24.421.307.600,-.

OPD penanggung jawab : 1). Dinas Koperasi dan UKM 2). Dinas Pertanian 3). Dinas Pangan dan Perikanan 4). Dinas Kesehatan 5). Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi 6). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7). Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan dan 8). Dinas Sosial, PPPA, PPKB.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mengacu pada data sasaran kemiskinan, misalnya Dinas Transnaker dalam pelatihan pancaker belum memakai prioritas data kemiskinan.

Saran :

- perlu sosialisasi kepada pimpinan di daerah, terkait upaya pengetasan kemiskinan
- perlu peningkatan kegiatan pemberdayaan, masyarakat setiap kabupaten/Kota

19. Kota Payakumbuh

Untuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada, SK TKPK ada (SK. No. 065.4/75/Wk-Pyk/2022), Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah ada (SK Wako No. 460.6/360/Wk.Pyk/2023). Total anggaran Rp.109.751.915.403,-, OPD penanggung jawab 19 Perangkat Daerah yaitu; Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, DP3AP2KB, DPMPTSP, PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Sekretariat Daerah, Dinas Parpora Kec. Payakumbuh Barat, Kec. Payakumbuh Timur, Kec. Payakumbuh Utara, Kec. Payakumbuh Selatan Dan Kec. Lamposi Tigo Nagari.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Belum maksimalnya penggunaan data masyarakat miskin dalam intervensi program dan kegiatan
- Belum satu persepsi dalam pemahaman penggunaan data masyarakat miskin dan proses validasi data belum berjalan maksimal/sesuai prosedur.

Saran :

- perlu sosialisasi kepada pimpinan di daerah, terkait upaya pengetasan kemiskinan
- perlu peningkatan kegiatan pemberdayaan, masyarakat setiap kabupaten/Kota

3. Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota terkait Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)

Pangan dan gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hubungan ketahanan pangan dan gizi dengan pembangunan suatu daerah bersifat timbal balik, yang berarti pangan dan gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa, begitu pula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Pangan dan gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia.

Permasalahan pangan dan gizi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat masih ditemukan masalah kekurangan gizi, terutama pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, bayi dan balita. Selain itu masih kurangnya peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. kurangnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kurangnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kurangnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) mengacu kepada Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG), Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana

Aksi Daerah Pangan dan Gizi dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) ke Kabupaten/Kota. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:

- Mengetahui kemajuan pelaksanaan RAD-PG;
- Mengidentifikasi permasalahan serta tantangan yang timbul dan/atau akan timbul dari pelaksanaan RAD-PG;
- Memberikan penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil kegiatan RAD-PG yang sedang berlangsung atau yang telah selesai;
- Menyiapkan rekomendasi bagi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi berikutnya.

Dari kunjungan ke Kabupaten/Kota tersebut, didapat data dan informasi sebagai berikut ;

1. Kabupaten Dharmasraya

Bappeda Kabupaten Dharmasraya belum menyusun RAD-PG karena belum adanya informasi terkait teknis penyusunan serta aturan-aturan lainnya.

Rekomendasi :

- Diharapkan Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan RAD-PG kepada Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan Bappeda dan OPD teknis Kabupaten/Kota, serta OPD Provinsi terkait.
- Agar Bappeda Kabupaten Dharmasraya untuk dapat membentuk tim RAD-PG dan menyusun RAD-PG.

2. Kabupaten Pasaman Barat

Bappeda Kabupaten Pasaman Barat belum menyusun RAD-PG karena belum adanya informasi terkait teknis penyusunan serta aturan-aturan lainnya. Rekomendasi :

- Diharapkan Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan RAD-PG kepada Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan Bappeda dan OPD teknis Kabupaten/Kota, serta OPD Provinsi terkait.
- Agar Bappeda Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat membentuk tim RAD-PG dan menyusun RAD-PG.

3. Kabupaten Solok

Bappeda Kabupaten Solok belum menyusun RAD-PG karena belum adanya informasi terkait teknis penyusunan serta aturan-aturan lainnya. Rekomendasi: Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengadakan sosialisasi penyusunan RAD-PG kepada Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan Bappeda dan OPD teknis Kabupaten/Kota, serta OPD Provinsi terkait.

4. Kota Payakumbuh

Bappeda Kota Payakumbuh belum menyusun RAD-PG tahun 2022-2026. Rekomendasi : Pemerintah Kota Payakumbuh agar membuat RAD-PG Tahun 2022-2026 dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Gubernur.

4. Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota terkait Pelaksanaan Latsitardanus XLIII/2023 di Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLIII tahun 2023. Kegiatan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei s/d 8 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Taruna/Taruni dari AKMIL, AAU, AAL, IPDN, BSSN, Mahasiswa/mahasiswi UNP dan Baiturrahmah. Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten / Kota terpilih yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok,

Kota Pariaman dan Kota Padang yang terdiri dari 2 kategori kegiatan yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Berkenaan dengan itu, Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota tersebut dengan hasil sebagai berikut:

1. Kota Pariaman

Di Kota Pariaman ditempatkan sebanyak 270 orang taruna, dari 270 taruna tersebut terdiri dari 230 peserta dan 40 orang pelatih yang disebar di empat kecamatan di Kota Pariaman. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Latsitardanus XII/2023 Sumatera Barat di Kota Pariaman ini sangat bermanfaat dan berdampak positif sekali dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk penginapan peserta, rumah penduduk yang dipakai untuk penginapan peserta diberi bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- setiap rumah, juga dampak dari usaha UMKM setempat seperti, kuliner, warung dan pariwisata. Diharapkan kepada Taruna yang datang ke kota Pariaman mendapat kesan yang positif sehingga dapat menginformasikan sekaligus mempromosikan mengenai potensi Kota Pariaman ini setelah kembali ke tempat masing-masing.

2. Kabupaten Pasaman

Bentuk kegiatan :

- a. Bedah rumah
- b. Gotong Royong Pembersihan Sampah, Tanaman Liar dan Pengecatan
- c. Penanaman Pohon di lokasi Benteng Perjuangan Tuanku Imam Bonjol
- d. Sosialisasi ke Sekolah- Sekolah se Kabupaten Pasaman
- e. Pembangunan Tugu Latsitardanus XLIII

3. Kabupaten Pesisir Selatan

Latsitardanus XLIII/ 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 2 kategori kegiatan yaitu : Kegiatan Fisik dan Kegiatan Non Fisik. Kegiatan Non Fisik pada pelaksanaan Latsitardanus XLIII/2023 di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

- Penyuluhan tentang cara pembuatan pupuk organik. Lokasi : Nagari Sungai Nyalo. Ruang Lingkup Kegiatan berada di Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang. Keluaran Kegiatan bertambahnya pengetahuan

petani tentang pembuatan pupuk organik. Personil Taruna yang terlibat dalam penyuluhan ini sebanyak 10 orang dengan kelompok petani sasarannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023.

- Kegiatan Wisata dan Sejarah Lokasi : Pantai Tan Sridano, Labuang Baruak, Nagari Kambang Timur, Konservasi Penyu (Ampiang Parak), Event Desa Wisata di nagari Ampiang Parak. Rumah Cetak Uang (Oeang Ori) di Koto Pulai Nagari Kambang Timur.

4. Kota Solok

Program Latsitadanus di Kota Solok membawa dampak positif bagi daerah, selain meramaikan Kota Solok, juga menjadi momen dalam mendorong percepatan pembangunan Fisik dan SDM. Dengan kedatangan para taruna dan mahasiswa dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Kota Solok dalam meraih cita cita, juga dapat mengerakkan kepedulian sosial dalam membangun daerah. Kehadiran Latsitardanus membawa motivasi untuk pemuda dan pemudi di Kota Solok yang berminat menjadi Taruna.

5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai APBN di Balai/UPT Kementerian

Untuk penyusunan perencanaan dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung penrencanaan. Selain itu, juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan di Tingkat pusat dan daerah. Berkenaan dengan itu, Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi ke Balai/UOT Kementerian yang berlokasi di Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut:

1. Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Tanaman Buah Hortikultura, Balai Penerapan Standar Instrumen (BPSI) Penelitian Sumatera Barat dan Balitro Solok.

Adanya deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus kebijakan yang sifatnya menghambat. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan

efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Kendala/permasalahan yang dihadapi adalah masih minimnya dana untuk kegiatan standarisasi dan penerapannya, membantu diseminasi dan penyebarluasan inovasi teknologi dan dukungan kelembagaan pasar.

2. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas di Kabupaten Lima Puluh Kota

Prioritas kinerja BPTU-HPT Padang Mengatas adalah peningkatan produksi bibit unggul ternak sapi potong yang berkualitas sesuai dengan mottonya “excellent breed is our priority”. Kendala/permasalahan yang dihadapi adalah penetapan jumlah ternak di kelompokan berdasarkan verifikasi dan kemampuan kelompok dikarenakan program penambahan bantuan ternak dari program DKS tahun 2021; Proses pengadaan kambing lokal di Kep. Mentawai terkendala, dikarenakan lalu lintas ternak belum bisa antar pulau; dan Biaya operasional terkait dengan pengamanan area lahan yang sangat luas sementara biaya terbatas.

3. Balai Veteriner (B-Vet) Kabupaten Agam

Kendala/permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dalam melakukan surveilans penyakit di Kabupaten Mentawai karena tingginya biaya transportasi, keterbatasan ternak anjing yang divaksinasi rabies, keterbatasan ternak sapi/kerbau yang divaksinasi dan realisasi vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih rendah. Dukungan yang diharapkan dari Pemda adalah adanya dukungan anggaran.

4. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kota Padang dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Kabupaten Padang Pariaman

Tugas BKIPM adalah melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah NKRI, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan system

manajemen mutu dan pengawasan keamanan hayati ikan. BPSPL mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan yang meliputi antara lain perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan dari Pemerintah provinsi berupa data dan informasi berdasarkan Parameter Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Sumatera barat, daftar mitra strategis pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Sumatera Barat, kolaborasi dengan mitra startegis dan promosi kegiatan rehabilitasi untuk pengembangan lokasi.

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan di bidang SDA, melaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang SDA sangatlah penting, karena melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan lingkup bidang SDA. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang SDA pada tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan rencana pelaksanaan sub kegiatan yang telah disusun, karena adanya pengalihan dan rasionalisasi anggaran yang tentunya berdampak kepada hasil pelaksanaan sub kegiatan, namun secara substansi dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan dapat dicapai sesuai dengan anggaran yang tersedia.

LAMPIRAN

KUESIONER PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RAD-PG
DI KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota _____

1. Apakah sudah mengetahui mengenai RAD-PG dan arahan Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD-PG?

→ Ya / Tidak

2. Sudahkah menyusun dokumen RAD-PG (kalau ada mohon disampaikan softcopynya)

→ Sudah / Belum / Sedang proses

3. Kalau belum/sedang proses, sudah sampai dimana tahapannya :

4. Apakah sudah pernah menyusun RAD-PG sebelumnya?

→ Sudah / Belum

5. Jika sudah menyusun, apakah sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi?

→ Sudah / Belum

6. Apakah sudah melaporkan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas?

→ Sudah / Belum

7. Apakah sudah mengintegrasikan dokumen RAD-PG ke dalam dokumen perencanaan?

→ Sudah / Belum

8. Apa saja kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG?

9. Saran dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG?

Tanggal :

Nama :

Tanda Tangan :

**KUESIONER PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten/Kota : _____

1. Sudah adakah dokumen Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, kalau ada mohon disampaikan softcopy bahan tersebut. (RPKD, RAT dan LP2KD) :

2. Kalau belum sudah sampai dimana tahapannya :

3. Sudah ada SK TKPK yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota? Kalau belum dimana kendalanya?

4. Sudah ada serah terima data P3KE dari Kemenko PMK?

5. Jika sudah ada data, apakah sudah divalidasi di tingkat Nagari dan di-SK-kan oleh Kepala Daerah? Mohon disampaikan soft copy data tsb.

6. Apa saja program terkait penanggulangan kemiskinan yang ada di OPD pada tahun 2022? Berapa total anggaran dan SKPD penanggungjawabnya?

7. Kendala dalam pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan?

8. Saran dalam Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan?

Tanggal :

Nama :

Tanda Tangan :



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054574
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

Padang, 16 Januari 2023

Nomor : 050/15/I/Eko-SDA/Bappeda-2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Indikator
Kinerja Tahun 2022, Rencana Objek Monitoring
dan Evaluasi Prioritas Tahun 2023 dan Identifikasi
Rencana Usulan Tahun 2024

Kepada Yth. :
Daftar Terlampir
di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, guna mengoptimalkan pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun anggaran tahun 2023 diperlukan evaluasi terhadap capaian tahun 2022 serta strategi percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2023 dan identifikasi rencana usulan tahun 2024, diundang Saudara untuk dapat hadir pada ;

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Januari 2023

Pukul : 08.30 WIB s/d selesai

Agenda : 1. Evaluasi Capaian Tahun 2022
2. Penentuan Objek Monitoring dan Evaluasi Prioritas Tahun 2023
3. Identifikasi Rencana Usulan Tahun 2024
4. Hal-hal lain yang dirasa perlu

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Untuk lebih efektifnya rapat, dimintakan kepada OPD untuk dapat mengisi dan menyerahkan data/informasi sebagaimana format terlampir dan diserahkan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat cq Bidang Ekonomi-SDA paling lambat tanggal 17 Januari 2023.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



Medi Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

Lampiran 1**Surat Nomor : 050/15/I/EKO-SDA/Bappeda-2023****Tanggal : 16 Januari 2023****Kepada Yth. :**

No	Peserta Rapat	Jumlah
1	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	2 orang
2	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	2 orang
3	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 orang
4	Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	2 orang
5	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat	2 orang
6	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	2 orang
7	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	2 orang
8	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	2 orang
9	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	2 orang
10	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	2 orang
11	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	2 orang
12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	2 orang
13	Kepala Bidang Ekonomi-SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	1 orang
14	JFP Bidang Ekonomi-SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	5 orang
15	Pelaksana Bidang Ekonomi-SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	10 orang
Total		40 orang

Lampiran 2**Jadwal Rapat Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, Rencana Objek Monitoring dan Evaluasi Prioritas Tahun 2023 dan Identifikasi Rencana Usulan Tahun 2024**

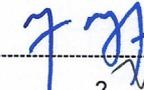
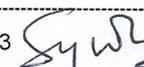
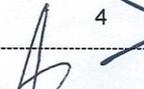
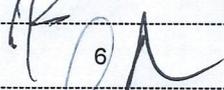
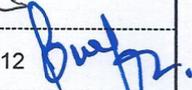
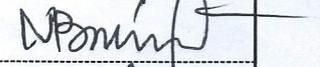
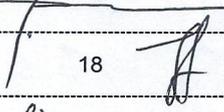
No	Waktu	Desk I	Desk II
1	08.30 - 09.30	Dinas Pangan	Dinas Koperasi dan UKM
2	09.30 - 10.30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	10.30 - 11.30	Dinas Kehutanan	Dinas Pariwisata
4	11.30 - 12.30	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	13.30 - 14.30	Dinas Kelautan dan Perikanan	Biro Perekonomian
6	15.30 - 16.30		Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tim Pembahas Per Desk

No	Desk	Nama Tim
1	Desk I	Ketua : Ir. Benny Sakti, SE, MM Anggota : Harry Febri, SE Dela Resina, S. Farm Nizhamul Bastian, SH Yuliarti Dasrial Zulhelman
2	Desk II	Ketua : Deviyanti, SE, M.Si Anggota : Teddi Rafdianto, M. Kom Rosalinda, SS, MM Afrizon, S. Sos Muslim Libtiandra Linda Firani, Amd Amrizal

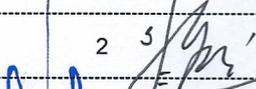
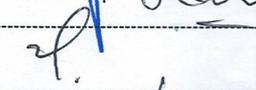
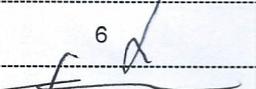
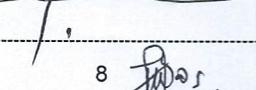
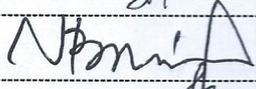
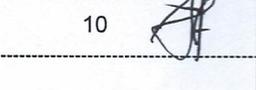
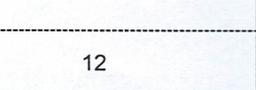
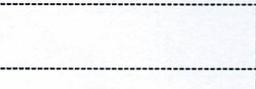
DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL	Rabu/ 18 Januari 2023
JAM	08.30 - 12.30 WIB
ACARA	Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 (Desk I)
TEMPAT	Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera

NO	NAMA	INSTANSI - JABATAN	NO HP / WA	TANDA TANGAN
1	Benny Yansukral	Sekretaris		1 
2	Yanita Selly M.	JF Perencanaan	081775665515	2 
3	Syaiful Komala Sari	dap Perencanaan	085264509596	3 
4	Sekolah.	DPAH - Kadir	08127788220-	4 
5	M. Pradya.	Kelurahan	081718450683	5 
6	Dedy Erniz	Kelurahan	085363054669	6 
7	Maswadi Nur	-	081266179824	7 
8	Dini Andani Putri	Disnakkesswan	085781609185	8 
9	Ferdinal Amin	DPTPH	081290350978	9 
10	Agri Yofa Rendi	,	081363261233	10 
11	Khairil Afushna	,	082325010476	11 
12	Benny S	Bappeda		12 
13	Dela Resina	Bappeda		13 
14	Hanny Rizki	JFP Eko WPT		14 
15	Mizhamul B	+		15 
16	Yuliarti	-		16 
17	ZuHelman	Bappeda		17 
18	ERIK			18 
19	Salma			19 
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL	Rabu/ 18 Januari 2023
JAM	13.30 WIB - Selesai
ACARA	Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 (Desk I)
TEMPAT	Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera

NO	NAMA	INSTANSI - JABATAN	NO HP / WA	TANDA TANGAN
1	Resi Suriati	Sekretaris		1 
2	Yossy Novita	JF Perenc Muda		2 
3	Benny S	Bdt. Eho - SDA		3 
4	Henry Felm	JFP		4 
5	Dela Resina	JFP		5 
6	Yuli Ardi	Bappeda		6 
7	Zuhelman	Bappeda		7 
8	Salma			8 
9	Mizhammad B	Bappeda		9 
10	Erik			10 
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
P A D A N G

NOTULEN RAPAT

- a. Rapat : Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, Rencana Objek Monitoring dan Evaluasi Prioritas Tahun 2023 dan Identifikasi Rencana Usulan Tahun 2024
- b. Dasar Pelaksanaan : Undang Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor. 050/15//Eko-SDA /Bappeda-2023
- c. Hari / Tanggal : Rabu / 18 Januari 2023
- d. Pukul : 08.00 wib s/d selesai
- e. Pimpinan Rapat : Kabid. Ekonomi dan SDA
- f. Peserta Rapat : 1. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hort. Prov. Sumbar
2. Dinas Pangan Prov. Sumbar
3. Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Sumbar
4. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar
6. JFP Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Prov. Sumbar
7. JFP Pertama Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Prov. Sumbar
8. Pelaksana Bidang Ekonomi dan SDA
- g. Kegiatan Rapat : Paparan OPD, Diskusi
-

Hasil Rapat :

1. Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, Rencana Objek Monitoring dan Evaluasi Prioritas Tahun 2023 dan Identifikasi Rencana Usulan Tahun 2024 lingkup koordinasi perencanaan pembangunan Sumber Daya Alam dengan OPD :
 - a. Dinas Pangan
 - b. Dinas Peternakan dan Keswan
 - c. Dinas Kehutanan
 - d. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - e. Dinas Kelautan dan PerikananOPD diminta menyampaikan capaian program dan kekegiatan tahun 2022, penentuan objek monitoring dan evaluasi prioritas tahun 2023 dan identifikasi rencana usulan tahun 2024
2. Dinas Pangan pada saat ini sedang menyusun rancangan Renja tahun 2024 sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan untuk penyusunan RKPD Prov. Sumbar tahun 2024, untuk itu diharapkan kepada OPD untuk melakukan Forum OPD lingkup Dinas Pangan dengan Kabupaten/Kota pada bulan Januari-Februari 2023. Diharapkan Dinas Pangan untuk dapat menentukan event/kegiatan apa yang bisa dihadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur untuk triwulan I ini Untuk target Progul tahun 2022 ada 3 tercapai, 1 belum. Untuk sub kegiatan ada 129 indikator, 122 terlaksana, 7 belum. Indikator urusan ada 5 :

- a. Ketersediaan pangan (beras) : direktif pimpinan, revitalisasi heuller dan metoda penghitungan KSA
- b. Penguatan cadangan pangan
- c. Penanganan daerah rawan pangan : nagari rawan pangan, distribusi pangan. Berdasarkan SK tahun 2017 terdapat 13 nagari rawan pangan
- d. Skor PPH Sumatera Barat 89,8 (baik) dengan stategi pemerataan distribusi pangan
- e. CV beras, bawang dan cabe

Fokus lokus kegiatan di tahun 2023 :

- a. Penas Tani : 189 juta termasuk untuk temu petani ASEAN (5 hari)
- b. Kegiatan Progul bibit dialihkan ke pinang, namun bagaimana penyalurannya
- c. RMU (huller) ada 80 unit perbaikan
- d. Untuk kegiatan direktif, pikir sebanyak 3 milyar

Pada tahun 2022 realisasi keuangan sebesar Rp. 36.337.148.451. Untuk tahun 2023 total anggaran Dinas Pangan sebesar Rp. 45.803.936.487,-dengan sub kegiatan yang mendukung Progul, IKU, IKD, Prioritas Nasional dan Direktif Pimpinan adalah sbb :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				
		Readiness Criteria	Urgensi			
		Progul	IKU	IKD	Priorites Nasional	Arahan Pimpinan
Total APBD 2023						
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		√			
2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	√	√			√
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		√			
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		√			
5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	√	√			√
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi		√			
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			√		
8	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		√			
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		√			
10	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			√		
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	√	√			
12	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		√			√
13	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi		√			
14	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		√			
15	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		√			
16	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		√			
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		√			
18	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	√				
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	√				

3. Dinas Peternakan, tahun 2022 terdapat 15 kegiatan progul, 10 tercapai, untuk IKD sudah terlaksana, indikator 548 kegiatan, 35 belum terlaksana. Tahun 2023 kegiatan direktif dan pikir :
 - a. Launching PMK tahun 2023, lokasinya sudah diusulkan, kick off vaksinasi PMK pada bulan Februari 2023 yang akan dihadiri oleh Menteri/Wamen
 - b. Akhir Februari 2023 : peresmian pembibitan ayam okal di lakitan Kab. Pesisir Selatan, target 50 ribu ekor
 - c. Maret 2023 integrasi ternak dan sawit di Pasaman Barat sentra pengembangan sapi lokal 1000 ekor sapi bali.

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023								
		Objek dan Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan	Besaran Dana	Readiness Criteria	Urgensi				
						Progul	IKU	IKD	Prioritas Nasional	Arahan Pimpinan
1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak	Sumatera Barat	4 Laporan	4.757.832.376		v				
2	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Sumatera Barat	2 Laporan	1.816.492.462		v				
1	Pengadaan Benih/Bibit Temak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Sumatera Barat	4 Komoditi	47.543.654.205		v	v	v		
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Sumatera Barat	5 Unit	2.466.687.717		v				
1	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Sumatera Barat	4 Laporan	1.740.280.000		v		v		
2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumatera Barat	1 Laporan	223.328.000				v		
3	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumatera Barat	1 Laporan	1.077.825.700				v		
1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Sumatera Barat	1.100 Sampe	166.252.250				v		
2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Sumatera Barat	500 Kali	216.029.500				v		
1	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Sumatera Barat	100 Kali	1.143.608.000				v		
2	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sumatera Barat	3.415 Sampe	1.111.241.820		v				
1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sumatera Barat	10 Sertifikat	170.379.000				v		
1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sumatera Barat	10 Unit	130.005.500				v		
2	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Sumatera Barat	1 Kali	156.491.184				v		
1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Sumatera Barat	4 Laporan	2.114.548.150		v				
1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Sumatera Barat	4 lembaga	206.514.000		v				
2	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Sumatera	3 Kali	110.604.000						

4. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada tahun 2023 terdapat 69 indikator Progul, 4 IKD dan 344 indikator Sub Kegiatan. Yang termasuk Progul komoditi tanaham panan, hortikultura dan perkebunan. dan sudah tercapai jagung, sedangkan padi, cabe, jeruk, sawit, kakao, kopi, gambir belum tercapai sehingga disarankan untuk merevisi target. Fokus komoditi pada tahun 2023 adalah padi dan palawija. Akan dialakan SL (Sekolah lapang) yang merupakan kegiatan direktif pimpinan. Untuk medukung pelaksanaan kegiatan tanaman pangan terdapat pengamat iklim sebanyak 30 orang dan 150 orang pengamat hama penyakit. Kondisi untuk tahun 2024 direncanakan untuk merevisi target progul serta banyak ASN yang pensiun.

Sebaran Pokok Pikiran DPRD TA.2023
Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Bidang/UPTD	Usulan	Jumlah Pokir
1	BMSPP	485	98.756.800.000
	Sarana	119	14.551.800.000
	Prasarana JUT	275	65.230.000.000
	Prasarana JITUT	91	18.975.000.000
2	TANAMAN PANGAN	63	11.493.650.000
	Padi Palawija	26	4.460.000.000
	Kacang Ubian	1	100.000.000
	Pasca Panen	36	6.933.650.000
3	HORTIKULTURA	58	8.540.155.205
	Buah Florikultura	32	5.190.375.000
	Sayur Biofarmaka	23	2.949.780.205
	PPH Horti	3	400.000.000
4	BUN-TAGAR	40	11.610.000.000
	Tahunan	33	9.860.000.000
	Penyegar	7	1.750.000.000
5	BUN-SIMPAH	18	2.162.000.000
	PPH Bun	7	792.000.000
	Rempah	11	1.370.000.000
6	BPPP	13	2.485.000.000
	Diklat	3	2.485.000.000
	TOTAL	677	135.047.605.205

Dapun rencana kegiatan direktif pada bulan Januari 2023 ini adalah :

- a. Minggu III Januari 2023, launching kopi bancah dan operasionalisasi air baku serta persemaian kopi di HKM Sikayan Balumuik Kota Padang untuk mendukung visit beautiful west sumatera 2023 dan peningkatan pendapatan petani hutan
 - b. Minggu IV Januari 2023, penyerahan sarana prasarana ekowisata di LPHN Salibutan Kabupaten Padang Pariaman berupa peralatan arung jeram dan alat ekonomi produktif berupa tenda glamping dan tenda camping untuk mendukung visit beautiful west sumatera 2023 dan peningkatan pendapatan petani hutan
6. Dinas Kelautan dan Perikanan,
- a. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2022 dari target 0,98 terealisasi 0,68 faktor penghambatnya adalah kelangkaan BBM dan faktor cuaca.
 - b. Jumlah produksi perikanan tangkap dari target 222.693 ton realisasi 218.688 ton
 - c. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya sudah terealisasi 1,87
 - d. Jumlah produksi perikanan budidaya laut belum didapat angka final
 - e. Jumlah produksi olahan hasil perikanan belum didapat angka final
- Capaian progul tahun 2022,
- a. udang vaname tidak tuntas, faktor penghambatnya adalah :
 - proses lelang yang lambat (sudah 2 kali lelang)
 - Cuaca ekstrim
 - Lokasi disesuaikan RTRW
 - b. Jumlah mesin longtail (boat) realisasi 97 unit
 - c. Jumlah gillinet (laut) realisasi 104
 - d. Jumlah trenel net realisasi 64
 - e. Jumlah gillinet perairan umum realisasi 160
 - f. Mesin longtail 8,5 PK realisasi 67
 - g. Mesin tempel 2,5 PK target 14 seharusnya 140
 - h. Mesin perahu fiber target 0 seharusnya 90

LOKASI RENCANA KERJA TAHUN 2023				
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA KERJA TAHUN 2023			
	Objek dan Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan	Kondisi Eksisting	Besaran Dana
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Laut Minyak dan Gas Bumi				659.997.500
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	7 Wilayah Pesisir			50.420.000
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7 Wilayah Pesisir	Mangrove = 6.300 btg, terumbu karang		424.603.000
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	7 Wilayah Pesisir	1.300 btg		100.004.300
Pembudayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				1.223.106.624
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7 Wilayah Pesisir	Putra Putri Maritim 1 kali, Forum perempuan pesisir, berah pantai		1.001.202.024
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7 Wilayah Pesisir	Forum koordinasi mitra konservasi, peningkatan kapasitas KUB		107.410.000
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7 Wilayah Pesisir	Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan		114.461.600
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				20.000.238.700
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	DKP Prov Zumber	1 Dokumen		37.345.000
Penjaminan Keterediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	7 Wilayah Pesisir	Gillinet (312 unit), Rumpun (9 unit), Fish box (600 unit), mesin tempel 40 unit, mesin diesel 17 unit, mesin longtail 250 unit		20.042.710.700
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Consangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.312.573.920
Penjaminan Keterediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	7 Wilayah Pesisir	Restocking, reservat		2.312.573.920
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah				72.036.600
Penetapan Beryaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	10 Kab/Kota	Sosialisasi Perizinan Usaha budidaya air laut dan payau		72.036.600
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				6.034.241.164
Penjaminan Keterediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Kab/Kota	Pengembangan Ikan Kerapu Pada Kawasan Sentra Produksi		1.204.070.400
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	TMHTN, Penas, Pengembangan tambak milenial		7.030.272.760
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	Pengendalian HPI, OIB, Kawasan Kesehatan lingkungan ikan		205.070.200
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Pelatihan, Pembinaan sertifikasi CBIB		100.467.760

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				5.331.494.000
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	7 Wilayah Pesisir	Sosialisasi peraturan tata ruang dan Sosialisasi RPZ		67.674.000
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Wilayah Pesisir	Forum koordinasi penanangan tindak pidana, Pengawasan CDKP, Pengawasan Kapal		4.027.470.000
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMAWAZ)	7 Wilayah Pesisir	Forum Pokmaswas, Penangkapan Pokmaswas		406.350.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cenangan Air Lainnya yang dapat dirubahkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				444.033.030
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cenangan Air Lainnya yang dapat dirubahkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	10 Kab/Kota	Pengawasan usaha perikanan budidaya, CPID, pembinaan CPPID		444.033.030
UPTD SPBALP				1.790.036.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				1.790.036.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	SPBALP Teluk Bue	4 Kgtm		404.440.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	SPBALP Teluk Bue			807.412.600
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	SPBALP Teluk Bue	2 Angkutan, 00 org		410.104.300
UPTD KPDKP				6.060.441.001
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				6.704.012.000
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	KPDKP Pariaman	13 Kgtm		6.704.012.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				371.046.000
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	KPDKP Pariaman			371.046.000
UPTD PPMHP				636.393.700
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				636.393.700
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Peryaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PPMHP Labor	1) Penyediaan Sarana prasarana Laboratorium (rak daya listrik, gas dll), 2) Meubiler kantor (lemari arsip, kursi tamu, AC, dll) 3) Pengadaan alat-alat labor (spectrafometer, refrigerator, P4 mmster, alat uji lemak,		100.300.700
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	PPMHP Labor	12 Bulan		480.023.000
UPTD PPW I				1.672.314.214
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				809.366.344
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	PPW I Caracok	3 Unit		505.366.344
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				776.747.070
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan	PPW I Caracok	12 Bln		776.747.070
UPTD PPW II				4.076.064.240
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				3.300.762.300
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	PPW II Air Bangtu	2 Unit		3.300.762.300
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				1.306.101.760
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan	PPW II Air Bangtu	4 Angkutan		1.306.101.760
UPTD PPW III				6.127.035.000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				1.008.904.030
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	PPW III Sikakap	Perahu boat 1 unit, cetakan es balok, zumur bor, bak tendon		1.008.904.030
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				496.327.330
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan	PPW III Sikakap	12 Bln		496.327.330

Rencana kegiatan tahun 2023 :

- Pabrik es di Sasak Kab. Pasaman Barat
- Tambak udang payau Kab. Padang pariaman dan Kota Pariaman
- Peresmian pabrik pakan di Rao Kab. Pasaman

Demikian notulern rapat ini dibuat, terima kasih.

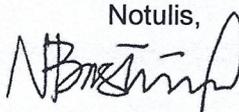
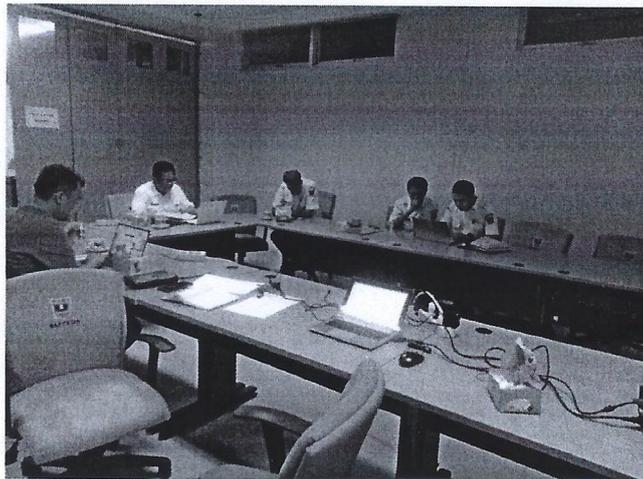
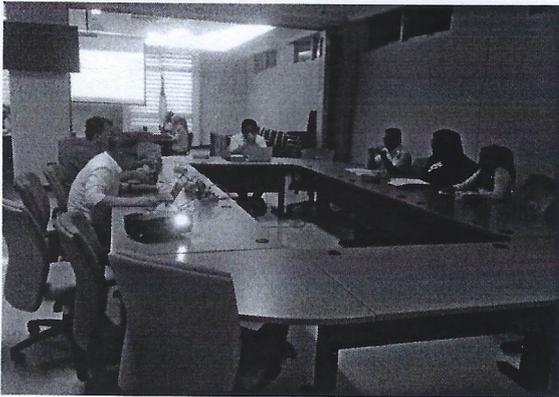
Notulis,

 Nizhamul Bastian, SH

Foto Kegiatan :





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/184/Bappeda/6-2023

Dasar : 1. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : Nizamul Bastian, SH.
NIP : 19730702 201001 1 003
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : Dasrial
NIP : 19721226 200801 1 002
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Muhammad Imran
NIP : 19730318 200701 1 005
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Pelaksana
4. Nama : Erik Agustian
Jabatan : Sopir

Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Solok Selatan ke Kab. Solok selatan Kab. Solok Selatan pada tanggal 22 - 23 Juni 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juni 2023

#

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/167/Bappeda/6-2023

- Dasar : 1. Persetujuan nota dinas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Kep. Mentawai
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Ir. Benny Sakti, M.M.
NIP : 19670927 199403 1 008
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
2. Nama : Nizamul Bastian, SH.
NIP : 19730702 201001 1 003
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Dasrial
NIP : 19721226 200801 1 002
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana

- Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Kep. Mentawai ke Kab. Kep. Mentawai Kab. Kepulauan Mentawai pada tanggal 14 - 16 Juni 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 12 Juni 2023

#

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
P A D A N G

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumbar
Melalui Yth : Ibu Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Ir. Benny Sakti, MM
Nizhamul Bastian, SH
Dasrial
Tanggal : 19 Juni 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monev Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

I. PENDAHULUAN

Dasar : 1. Nota Dinas Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Nomor 050/263/VI/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 7 Juni 2023, perihal Izin perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Kep. Mentawai;
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094/ /VI/SPT/DD/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal Juni 2023.

Maksud dan Tujuan : 1. Maksud :
Melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaan dan pengawasa pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Kep. Mentawai
2. Tujuan :
Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan daerah di Kabupaten Kep Mentawai sebagai bahan dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

Pegawai yang ditugaskan : 1. Ir. Benny Sakti, MM.
2. Nizhamul Bastian, SH
3. Dasrial

Tanggal : 14 s/d 16 Juni 2023

II. HASIL

1. Kebijakan program penanggulangan kemiskinan, terutama target penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kep. Mentawai, belum dilakukan verifikasi terhadap warga yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrim oleh Pemerintah Kab. Mentawai. Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan beberapa kegiatan oleh OPD dengan segala ketebatasan sarana dan SDM, yaitu : Dinas Sosial yang melakukan beberapa kegiatan, yaitu : pendataan oleh tenaga PSM ke Desa, namun data yang diperoleh tersebut belum divalidasi sesuai dengan kriteria miskin dan miskin ekstrem, kegiatan yang dilakukan adalah dengan pemberian bantuan sembako untuk warga miskin, disabilitas dan lansia termasuk juga dalam penanganan stunting, Melalui program lumbung sosial dengan kegiatan pemberian sembako dan penanganan pasca bencana, kalau tidak ada bencana disalurkan ke PPKS, PKH dan Bantuan pangan untuk warga miskin, disabilitas dan lansia.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan intervensi melalui Dana Desa, dan bantuan pemberdayaan kepada warga miskin
Dinas kesehatan terutama dalam penanganan stunting dan gizi buruk. Keluarga yang stunting dan gizi buruk tersebut umumnya keluarga miskin ekstrim
2. Dari monitoring dan evaluasi di Kabupaten Kep, Mentawai didapat data sebagai berikut :
 - a. Dokumen Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, (RPKD, RAT dan LP2KD) dalam proses penyusunan
 - b. Sudah ada SK TKPK tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
 - c. Sudah menerima data P3KE dari kemenko PMK, dan masih dalam tahap divalidasi di tingkat Desa
 - d. Program terkait penanggulangan kemiskinan yang ada di Perangkat Daerah, total anggaran dan SKPD penanggungjawab di Kabupaten Kep. Mentawai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	OPD
1	2	3	4	5	6
1	20903 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	20903204 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2090320402 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	877.038.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	32702 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	32702201 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3270220102 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.056.240.650	
3		32702206 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3270220601 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.168.556.000	
4	32503 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	32503202 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3250320201 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	9.195.332.627	DINAS PERIKANAN
5	32504 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	32504204 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3250420402 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	965.999.888	
6	32506 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	32506202 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3250620201 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	833.950.800	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	OPD
1	2	3	4	5	6
7	21705 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	21705201 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2170520101 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	487.525.300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	21706 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	21706201 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2170620101 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	365.254.500	
9	21707 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	21707201 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2170720104 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	400.000.000	
10	21708 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	21708201 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2170820101 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	625.274.000	
11	33102 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	33102201 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3310220105 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.280.514.500	
12	10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10303201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1030320101 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.052.530.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10303201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1030320104 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	600.000.000	
14	10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10303201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1030320105 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.040.954.300	
15	10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10303201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1030320115 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.672.962.400	
16	10310 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10310201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1031020105 Pembangunan Jalan	17.924.984.405	
17	10310 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10310201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1031020108 Rekonstruksi Jalan	24.995.519.535	
18	10310 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10310201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1031020112 Pembangunan Jembatan	3.259.976.000	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	OPD
1	2	3	4	5	6
19	10403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10403203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1040320308 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	6.185.956.633	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20	10403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10403203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1040320303 Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	516.940.000	
21	10404 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	10404201 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1040420101 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.050.204.000	
22	10405 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10405201 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1040520102 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	865.606.725	
23	10402 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10402203 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1040220304 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	539.570.000	
24	10604 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10604201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	1060420101 Penyediaan Permakanan	653.122.300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
25	10605 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10605202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1060520202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	346.517.560	
26	10605 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10605202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1060520203 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	374.167.000	
27	50202 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	50202204 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5020220409 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.492.249.499	BADAN KEUANGAN DAERAH
JUMLAH				95.826.946.622	

e. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kep. Mentawai adalah :

- SDM di lapangan kurang (PSM, SKSK, PHK, Tagana, Karang Taruna)
- Pemerintah Desa Kurang Respon dan Keperdulian (kepala desa sedang diganti)
- Koordinasi antar SDM dengan desa, Kecamatan dan Dinas terkait
- Jumlah Kelompok sasaran lebih besar dari ketersediaan program/kegiatan dan alokasi dana
- Belum optimalnya integrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan
- Belum terintegrasinya sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan à PKH, PAMSIMAS, BOS, JAMKESDA

- Belum optimalnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Harmonisasi program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai sangat diperlukan dalam rangka mendukung program prioritas nasional yaitu menurunkan angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem 0%.
- b. Penggunaan data P3KE hasil verifikasi dan validasi di Kab. Kep. Mentawai belum ditetapkan oleh Kepala Daerah.

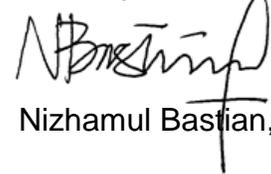
Saran

Kabupaten Kep. Mentawai diharapkan segera merumuskan laporan program pengentasan kemiskinan dalam dokumen LP2KD.

VI. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, selanjutnya mohon arahan Bapak, terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas,



Nizhamul Bastian, SH

Foto Kegiatan





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
P A D A N G

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumbar
Melalui Yth : Ibu Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Bapak Kabid. Ekonomi dan SDA
Dari : Nizhamul Bastian, SH
Dasrial
M. Imran
Erik Agustian
Tanggal : 24 Juni 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monev Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan

I. PENDAHULUAN

Dasar : 1. Nota Dinas Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Nomor 050/263/VI/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 7 Juni 2023, perihal Izin perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Solok Selatan
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094/164/VI/SPT/DD/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 20 Juni 2023.

Maksud dan Tujuan : 1. Maksud :
Melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaan dan pengawasa pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Solok Selatan
2. Tujuan :
Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan daerah di Kabupaten Solok Selatan sebagai bahan dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

Pegawai yang ditugaskan : 1. Nizhamul Bastian, SH
2. Dasrial
3. M. Imran
4. Erik Agustian

Tanggal 22 s/d 23 Juni 2023

II. HASIL

1. Salah satu isu strategis dalam rancangan pembangunan Kabupaten Solok Selatan adalah persoalan kemiskinan. Data persentase penduduk miskin di Kabupaten Solok Selatan periode Maret 2022 adalah 7,15 % termasuk tinggi karena masih berada diatas rata-rata penduduk miskin provinsi Sumatera Barat sebesar 6,28%. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Solok Selatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan langkah-langkah strategis dalam RPJMD tahun 2016-2021 yaitu untu meningkatkan kualitas pelayanan publikkhususnya kesehatan, pendidikan dasar dan sosial dasar guna mewujudkan sumberdaya masnusia yang berkualitas, didukung oleh infrastruktur yang memadai.
2. Dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim di kabupaten Solok Selatan dlaksanakan terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, salah satu langkah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Diperlukan koordinasi dan kolaborasi natar perangkat daerah di Kabupaten Solok Selatan bersama program pemerintah pusat serta pemangku kebijakan non pemerintah. Ada 3 prasyarat utama kebijakan nasional yang dapat diadopsi di Kabupaten solok Selatan dalam mendukung upaya *Extraordinary* untuk mencapai target kemiskinan ekstrem, yaitu
 - a. Pertumbuhan ekonomi
 - b. Mengembangkan dan memutakhirkan basis data pensasaran program
 - c. Konvergensiprogram natar kementerian/Lembaga dengan program di perangkat daerah untuk percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem
3. Dari monitoring dan evaluasi di Kabupaten Solok Selatan didapat data sebagai berikut :
 - a. Dokumen Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, (RPKD, RAT dan LP2KD) : Dokumen LP2KD sudah ada, RPKD dalam proses penyusunan, tinggak 1 bab lagi yang belum rampung. RAT tidak ada
 - b. Sudah ada SK TKPK tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
 - c. Sudah menerima data P3KE dari kemenko PMK.
 - d. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan yang ada pada OPD tahun 2022 adalah :
 - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - Program rehabilitasi sosial
 - Program perlindungan dan jaminan sosial

- Program penanganan bencana
 - Program pengembangan perumahan
 - Program kawasan permukiman
 - Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
 - Sebagaimana terlampir;
- e. Program terkait penanggulangan kemiskinan yang ada di Perangkat Daerah, total anggaran dan SKPD penanggungjawab di Kabupaten Solok selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Capaian		Sumber pendanaan
					Kinerja	Anggaran	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan:	Kabupaten Solok Selatan			88,363,466,114	Dinas Kesehatan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia		%	28	14,594,666,724	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan		%	18.66	73,768,799,390	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang ditangani	Kabupaten Solok Selatan			1,468,068,667	Dinas Sosial
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial		Kelompok	52	307,639,680	Dinas Sosial dan PMD
2.	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan Korban HIW AIDS dan Napta di Luar Pantai Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapat Rehabilitasi Sosial		%	28	1,160,428,987	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial	Kabupaten Solok Selatan			209,549,773	Dinas Sosial dan PMD
	Peneliharaan Anak - anak Tertantar	Jumlah Anak Tertantar Mendapat perlindungan dan jaminan sosial		orang	11	4,365,000	
	Penyediaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	% Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Tervalidasi		%	16	205,184,773	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang ditangani	Kabupaten Solok Selatan			1,623,641,670	Dinas Sosial dan PMD
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	% Korban Bencana alam dan sosial yang Tertayani		%	25	1,623,641,670	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Solok Selatan			282,640,000	Dinas Perumkim dan L H
1.	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		unit	42	282,640,000	Dinas Perumkim dan L H
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Kabupaten Solok Selatan			1,269,166,620	
1.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Perbaikan RTLH dan PSU di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha		%	97.43	1,269,166,620	Dinas Perumkim dan L H
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	Kabupaten Solok Selatan			857,337,760	
1.	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berturangnya jumlah unit RTLH		unit	54	857,337,760	Dinas Perumkim dan L H

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Progran dan Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Capaian		Sumber pendanaan
					Kinerja	Anggaran	
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Akses air minum layak	Kabupaten Solok Selatan	%		6,499,151,456	Dinas PUTRP
1.	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang dikelola		SR		6,499,151,456	
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses sanitasi layak	Kabupaten Solok Selatan	%		4,131,886,250	Dinas PUTRP
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah MCK yang di kelola		%		4,131,886,250	
10	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang diterima di Dunia Kerja atau Berwirausaha	Kabupaten Solok Selatan	%		330,258,100	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih dan Bersertifikasi		Orang	224	330,258,100	
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produktifitas hasil pertanian	Kabupaten Solok Selatan			1,066,745,743	Dinas Pertanian
1.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan		%		789,319,343	
2.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Sarana Pertanian yang dimanfaatkan		%		277,426,400	
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi hasil pertanian	Kabupaten Solok Selatan			3,586,165,205	Dinas Pertanian
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		%		569,907,900	
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian bibit bersertifikat		%		1,890,786,775	
3.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pelaksanaan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Makanan ternak		%		1,125,470,530	
13	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Kabupaten Solok Selatan			266,200,050	DKPP
1.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan masyarakat		TON	5	98,831,800	DKPP
2.	Penyediaan dan Peralyuran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		INDEX	77	93,923,550	DKPP
3.	Penanganan Karawaran Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Peranganan Karawaran Pangan		KALI	7	73,444,700	DKPP
14	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kabupaten Solok Selatan			1,205,242,658	DKPP
1.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya Yang Dibina		Kelompok	30	286,545,408	DKPP
2.	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Perikanan yang Beroperasi		Kelompok	30	918,697,250	
15	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi ikan	Kabupaten Solok Selatan			2,149,602,386	DKPP

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Progran dan Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Capaian		Sumber pendanaan
					Kinerja	Anggaran	
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok Pengolahan dan Pemasaran		Kelompok	11	56,798,600	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Persentase Pertumbuhan UMKM	Kabupaten Solok Selatan			346,918,219	PERINDAGKOP DAN UKM
2.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk, sertifikasi dan perijinan serta kemitraan		UMKM	1390	346,918,219	
16	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha	Kabupaten Solok Selatan			699,483,674	PERINDAGKOP DAN UKM
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya				699,483,674	
		JUMLAH ----->>>				114,355,524,345	

- f. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan adalah :
- Semakin sempit ruang fiskal daerah sehingga upaya untuk menghilangkan kantong-kantong kemiskinan menjadi terbatas
 - Pemahaman tentang DTKS dan P3KE belum seragam
 - Jumlah RT penerima PKH di kabupaten Solok Selatan relatif rendah diantara kabupaten/kota lainnya

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Harmonisasi program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sangat diperlukan dalam rangka mendukung program prioritas nasional yaitu menurunkan angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem 0%.

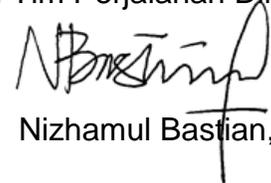
Saran

- Perlunya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah Pusat sehingga peluang alokasi DAK dapat meningkat
- Perlu pemahaman yang seragam antara OPD Provinsi dan Kab/kota terkait DTKS dan P3KE

VI. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, selanjutnya mohon arahan Bapak, terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas,



Nizhamul Bastian, SH

Foto Kegiatan





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Laporan Perjalanan Dinas

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA
Tanggal : 9 Juni 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kota Padang Panjang

Isi :

Sehubungan dengan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam perihal perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kota Padang Panjang, dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

I. Pelaksanaan kegiatan

1. dengan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas tanggal ... Juni 2023, Nomor: 160/VI/SPT/ Eko-SDA/Bappeda yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023.
2. Tempat Tujuan kunjungan adalah Kantor Bappeda Kota Padang Panjang.
3. Tim yang ditugaskan adalah : Della Resina,S. Farm, Hera Kurniawati, SE, Akt, Rosalinda,SS,MM, Muchlison.

II. Hasil pelaksanaan kegiatan

dari hasil pertemuan dan kunjungan lapangan secara detail dilaporkan sebagai berikut:

1. Pertemuan Tim Monev dilaksanakan di Kantor Kantor Bappeda Kota padang Panjang yang dihadiri oleh Tim Provinsi yakni : Tim Monev Bappeda Provinsi, Kepala Bidang Sosial dan fungsional Bappeda Kota Padang Panjang.
2. Dari informasi yang Tim Peroleh bahwa saat ini Kota Padang Panjang masih menggunakan dokumen penanggulangan Kemiskinan Daerah yakni dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 atau SPKD, Dokumen RPKD baru direncanakan membuatnya pada perubahan Tahun 2023. Untuk Dokumen RAT Kota Padang panjang sudah punya dan LP2KD Kota Padang Panjang juga sudah ada di buat setiap tahunnya.
3. Untuk Surat Keputusan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 Kota Padang Panjang tidak membuat karena masih mengacu pada SK TKPK Tahun 2022 yakni Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang hal ini sama dengan SK TIM RPJM yang masih mengacu pada SK Tahun 2022 Kota Padang Panjang.
4. Kota Padang Panjang sudah serah terima data P3KE dari KEMENKO, saat ini Kota Padang Panjang sedang memvalidasi data yang rekananya selesai sampai pada tanggal 30 Juni Tahun 2023. Berdasarkan sebaran data P3KE dari Kemenko Kota Padang Panjang terdapat sebaran berdasarkan

Keluarga dan individu berdasarkan Desil 1 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 persen dan merupakan tingkat paling rendah kesejahteraannya secara nasional. 2. Desil 2 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional. 3. Desil 3 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional sedangkan Desil 4 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31 -40 persen terendah tingkat kesejahteraan secara nasional.

5. Sebaran berdasarkan keluarga jumlah 5.012, Desil 1 sebanyak 593, Desil 2 sebanyak 1.360, Desil 3 sebanyak 1.576 dan Desil 4 sebanyak 1,483 sedangkan sebaran individu jumlah sebanyak 21.122 Desil 1 sebanyak 2.971, Desil 2 sebanyak 6.045, Desil 3 sebanyak 6,498 dan Desil 4 sebanyak 5.608. Berdasarkan Data yang diperoleh dari P3KE KEMENKOPMK jumlah penduduk Miskin Ekstrem Kota Padang Panjang Tahun 2020 = 0,479 Tahun 2021 = 0,572 Tahun 2022 = 0,000. Kondisi kemiskinan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari beberapa aspek : Ekonomi dan ketenagakerjaan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Prasarana Dasar.
6. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang berupa program nasional dan Daerah yakni:
 - Jaminan sosial berbasis keluarga (PKH), BOS, Bantuan Siswa Miskin, Jamkesmas/Jamkesda, BPNT)
 - Penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan (KUBE)
 - Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (KUR)
 - Peningkatan dan perluasan Program Pro Rakyat (program Air Bersih untuk Rakyat, Program pemasangan jaringan PDAM gartis untuk KK miskin.
7. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Kemiskinan
 - komitmen pimpinan (political will)
 - ada ke kauwatiran masyarakat dalam memvalidasi data dilapangan karna maraknya kampanye terkait dengan pemilu tahun depan.

Penutup

Demikianlah laporan perjalanan dinas an: Della Resina,S. Farm, Hera Kurniawati, SE, Akt, Rosalinda,SS,MM, Muchlison dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang Panjang disampaikan kepada Bapak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Pelapor



Rosalinda



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Laporan Perjalanan Dinas

Kepada : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Kepala Bidang EKO SDA
Dari : Tim Perjalanan Dinas
Tanggal : 14 Juni 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Padang Pariaman

Isi :

Sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Padang Pariaman, dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

I. Dasar Pelaksanaan kegiatan

1. Nota Dinas Kepala Bappeda No : 050/269/VI/TS/Eko-SDA/Bappeda-2023 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Ke Kabupaten Padang Pariaman.

II. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tempat tujuan kunjungan adalah Bappeda Kabupaten Padang Pariaman.
2. Tim yang ditugaskan adalah : Deviyanti, SE, MSi (JFP Madya), Dela Resina, S.Farm (JFP Pertama), Nenen Delfira (Pelaksana), dan Zakirman (Pelaksana).

III. Hasil pelaksanaan kegiatan

1. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Padang Pariaman diperoleh informasi bahwa Kabupaten Padang Pariaman saat ini sedang dalam proses penyusunan dokumen RPKD, RAT dan LP2KD.
2. Untuk Surat Keputusan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 493/KEP/BPP/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2024.
3. Kabupaten Padang Pariaman sudah serah terima data P3KE dari Kemenko PMK, dari desil 1 s/d 7. Saat ini Kabupaten Padang Pariaman sudah memvalidasi data sampai tingkat nagari dan sudah menyusun rancangan SK Data Sasaran keluarga miskin ekstrem. SK masih dalam proses di Sekretariat Daerah.
4. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 38.473 keluarga yang tersebar di 17 kecamatan. Jumlah individu miskin adalah sebesar 183.587 orang. Desil 1 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 persen dan merupakan tingkat paling rendah

kesejahteraannya secara nasional. Desil 2 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional dan seterusnya.

5. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di tanah air dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang. Untuk itu disusun beberapa program kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan yang tersebar di beberapa OPD di Padang Pariaman di tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp. 4.280.705.700,- (terlampir).
6. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah :
 - Kendala anggaran dan sumber daya pelaksana program karena dilaksanakan oleh tenaga yang terbatas dan paralel dengan kegiatan lainnya
 - Kendala koordinasi dengan lintas OPD untuk intervensi berdasarkan data P3KE
 - Kendala verifikasi dan validasi data tidak bisa langsung ke lapangan/survey
 - Kendala paradigma masyarakat yang bersedia masuk data kemiskinan untuk memperoleh bantuan

IV. Kesimpulan dan saran

1. Kabupaten Padang Pariaman sudah mulai melakukan penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan daerah dan melakukan validasi data P3KE.
2. Agar anggaran untuk penanggulangan kemiskinan lebih diprioritaskan.
3. Agar pedoman permintaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mekanisme pemantauan dan evaluasi penyiapan data P3Ke lebih diperjelas.

V. Penutup

Demikianlah laporan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Padang Pariaman disampaikan kepada Bapak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Pelapor,



Dela Resina

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Laporan Perjalanan Dinas

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA
Tanggal : 13 Juni 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kota Bukittinggi

Isi :

Sehubungan dengan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam perihal perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kota Bukittinggi, dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

I. Pelaksanaan kegiatan

1. dengan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas tanggal 13 Juni 2023, Nomor: 165/VI/SPT/ Eko-SDA/Bappeda yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023.
2. Tempat Tujuan kunjungan adalah Kantor Bappeda Kota Bukittinggi.
3. Tim yang ditugaskan adalah : : Rosalinda,SS,MM, Linda Firani, Verawati Astuti, Riandy Rahmat .

II. Hasil pelaksanaan kegiatan

dari hasil pertemuan dan kunjungan lapangan secara detail dilaporkan sebagai berikut:

1. Pertemuan Tim Monev dilaksanakan di Kantor Kantor Bappeda Kota Bukittinggi yang dihadiri oleh Tim Provinsi yakni : Tim Monev Bappeda Provinsi dan fungsional Bappeda Kota Bukittinggi.
2. Dari informasi yang Tim Peroleh bahwa saat ini Kota Bukittinggi masih menggunakan dokumen penanggulangan Kemiskinan Daerah yakni dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 – 2023 atau SPKD, Untuk Dokumen RAT Kota Bukittinggi ada, namun untuk dokumen LP2KD Bukittinggi tidak membuatnya.
3. Berdasarkan data yang telah diterima dari KEMENKO sebaran data P3KE di Kota Bukittinggi yakni :

Kecamatan	keluarga				individu					
	jumlah	desil1	desil2	desil3	desil4	jumlah	desil1	desil2	desil3	desil4
Total	8965	1426	2274	2729	2536	39451	7065	10321	11701	10364
guguak panjang	3470	550	948	1073	899	14952	2703	4215	4470	3564
mandiagin k selayan	3503	617	841	1015	1.030	15726	3065	3885	4452	4324
aur birugo tigo baleh	1992	259	485	641	607	8773	1297	2221	2779	2476

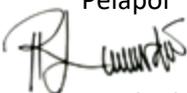
4. Data P3KE dari Kemenko Kota Bukittinggi terdapat sebaran berdasarkan Keluarga dan individu berdasarkan Desil 1 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 persen dan merupakan tingkat paling rendah kesejahteraannya secara nasional. 2. Desil 2 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional. 3. Desil 3 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30 persen terendah

tingkat kesejahteraannya secara nasional sedangkan Desil 4 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31 -40 persen terendah tingkat kesejahteraan secara nasional.

5. Berdasarkan diskusi yang dapat disimpulkan bahwa Data P3KE dari KEMENKO belum divalidasi karena masih belum paham bagaimana cara melakukan validasi data tersebut di Kota Bukittinggi oleh karena itu Kota Bukittinggi berencana membuat rapat koordinasi dengan mengundang narasumber dari TNP2K.
6. Jumlah penduduk Miskin Ekstrem Berdasarkan Data yang diperoleh dari P3KE KEMENKOPMK yang telah diterima oleh pemerintah Kota Bukittinggi yakni pada Tahun 2020 = 1.418 Tahun 2021 = 2.065 Tahun 2022 = 1.675.
7. SKPD dan anggaran penanggulangan kemiskinan TA 2022 di Kota Bukittinggi antara lain aa; - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 3,812.820.000
Dinas P3APPKB sebesar Rp. 3.256.501.884
Dinas Kesehatan sebesar Rp. 5.862.904.500
Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp. 1.030.981.320
Dinas Sosial sebesar Rp. 29.757.2881.320
Dinas PMPTSPPTK sebesar Rp. 433.233.600
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp. 1.575.000
Total APBD sebesar Rp. 12.836.516.400
Total APBN sebesar Rp. 29356.202.680
8. Program Program yang terkait dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bukittinggi antara lain:
 - Dinas Pendidikan : Program Indonesia Pintar (Pip) Pendidikan dasar dan menengah, Program Pengolahan Pendidikan.
 - Dinas P3APPKB : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas keluarga, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Dinas Kesehatan : Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat,
 - Dinas Pertanian : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat,
 - Dinas Sosial : Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program perlindungan dan jaminan sosial, Program Penanganan Bencana
 - Dinas PMPTSPPTK : Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja

Penutup

4. Demikianlah laporan perjalanan dinas an: Rosalinda,SS,MM, Linda Firani, Verawati Astuti, Riandy Rahmat dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bukittinggi disampaikan kepada Bapak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Pelapor

Rosalinda





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Laporan Perjalanan Dinas

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang EKO SDA
Tanggal : 19 Juni 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kota Pariaman

Isi :

Sehubungan dengan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam perihal perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kota Pariaman, dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

I. Pelaksanaan kegiatan

1. dengan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Juni 2023, Nomor: 69/VI/SPT/ Eko-SDA/Bappeda yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023.
2. Tempat Tujuan kunjungan adalah Kantor Bappeda Kota Pariaman.
3. Tim yang ditugaskan adalah : : Harry Febri, SE, Della Resina,S. FARM, Rosalinda,SS,MM, Defrizal.

II. Hasil pelaksanaan kegiatan

dari hasil pertemuan dan kunjungan lapangan secara detail dilaporkan sebagai berikut:

1. Pertemuan Tim Monev dilaksanakan di Kantor Kantor Bappeda Kota Pariaman yang dihadiri oleh Tim Provinsi yakni : Tim Monev Bappeda Provinsi dan Kepala Bidang PPM Bappeda Kota Pariaman.
2. Dari informasi yang Tim Peroleh bahwa Kota Pariaman menggunakan dokumen RKPD tahun 2022 sd 2026 sebagai pedoman dalam kinerja penanggulangan kemiskinan, Untuk Dokumen RAT Kota Pariaman Tidak ada, dokumen LP2KD Kota Pariaman juga tidak ada. SK TKPK Kota pariaman telah ditanda tangani oleh Wali Kota pada tanggal 30 Maret 2023 Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 113/050/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023.
3. Kemiskinan Ekstrim di Kota Pariaman relative tinggi terjadi pada tahun 2020, dan menurun pada tahun 2021 dan 2022, Berdasarkan data yang telah diterima dari KEMENKO sebaran data P3KE di Kota Pariaman yakni :

Kecamatan	keluarga					individu				
		jumlah	desil1	desil2	desil3		desil4	jumlah	desil1	desil2
Total	7873	844	2114	2695	2220	36467	4836	10435	12194	9002
Pariaman Tengah	1363	89	314	481	479	6580	526	1629	2316	2109
Pariaman Utara	2638	379	783	818	658	11896	2154	3709	3553	2480
Pariaman Selatan	192	201	494	715	511	8934	1161	2479	3220	2074
Pariaman Timur	1951	175	523	681	572	9057	995	2618	3105	2339

4. Data P3KE dari KEMENKO sudah divalidasi dan sudah ditetapkan dengan SK Walikota nomor 355/050/2022 tentang penetapan nama-nama sasaran keluarga miskin penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Kota Pariaman sebanyak 70 orang, dalam memvalidasi data masih terdapat data yang tidak valid, contohnya ada Pegawai Negeri yang masih aktif dan ada pensiunan dalam data tersebut .
5. Program-program yang terkait dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pariaman antara lain:
 - Pendidikan : Pendidikan Gratis, SAGA SAJA, Kartu Pariaman Pintar, Bus Sekolah Gratis.
 - Kesehatan : Layanan Kesehatan Gratis, Kartu Pariaman SEhat, Jaminan Persalinan Gratis
 - Infrastruktur : Peningkatan Akses Transportasi, Akses Air Minum & Sanitasi Layak,
 - Ekonomi & Sosial : Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Jamban Sehat, Fasilitas dan Bantuan Modal dan sarana usaha bagi UMKM, Bantuan BIBIT, Bantuan Sembako, Pengembangan Digital Market, Bazar Pangan Murah, Penyalurutan Pencari Kerja, Pengembangan Potensi Wisata melalui Spot Tourism, Eco Tourism, Desa Wisata
6. Ada 4 strategi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman :
 - a. Mengurangi beban pengeluaran
 - b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan
 - c. Mengembangkan & menjamin keberlanjutan Usaha Mikro Kecil
 - d. Meningkatkan sinergitas Kebijakan & Program Penanggulangan Kemiskinan
7. Kendala dalam penanganan penanggulangan Kemiskinan di Kota Pariaman:
 - a. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan secara terpadu
 - b. Program penanganan melalui Pendanaan Pemerintah Pusat relative bersifat sektoral dan memiliki ketentuan sesuai petunjuk teknis masing-masing K/L
 - c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi data penduduk miskin terpadu sebagai basis data yang valid dan akurat.
8. Tantangan atau tindak lanjut di Kota Pariaman dalam penanggulangan kemiskinan yakni :
 - a. Memastikan penerima program penanganan kemiskinan yang tepat sasaran
 - b. melahirkan inovasi dalam penanganan kemiskinan secara terpadu, melalui konvergensi program
 - c. Tingkat pendidikan penduduk miskin yang rendah, kurang memiliki keterampilan, wawasan dan pengetahuan yang memadai
 - d. Keterbatasan lapangan menyebabkan tingginya angka pengangguran
 - e. Mewujudkan Pariaman Zero Poverty.

Penutup

4. Demikianlah laporan perjalanan dinas an: Harry Febri, SE, Della Resina, S. FARM, Rosalinda, SS, MM, Defrizal dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pariaman disampaikan kepada Bapak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Pelapor



Rosalinda





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/168/Bappeda/6-2023

- Dasar : 1. Persetujuan Kepala Bappeda terhadap Telaah Staf Perihal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Pasaman
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Harry Febri, SE.
NIP : 19850204 200501 1 003
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Perencana Ahli Muda
2. Nama : Muslim Libtiandra, S.E.
NIP : 19740312 200701 1 005
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Amrizal
NIP : 19660612 200701 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana

- Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Pasaman ke Kab. Pasaman Kab. Pasaman pada tanggal 15 - 16 Juni 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 14 Juni 2023

#

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Harry Febri, SE. / 19850204 200501 1 003
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata / III.c b. Perencana Ahli Muda c.
4	Maksud perjalanan dinas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ke Kabupaten Pasaman
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Pasaman
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 2 Hari b. 15 Juni 2023 c. 16 Juni 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Muslim Libtiandra, S.E.	Penata Muda / III.a Pelaksana
	2. Amrizal	Pengatur TK I / II.d Pelaksana
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 5.01.03.1.02.07
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 14 Juni 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, ST, MM.
NIP. 19750502 199903 1 004

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>WINNY SAYORY, ST, MMP.</u> NIP. 19731003 199803 2 005</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/160/Bappeda/6-2023

- Dasar : 1. Persetujuan nota dinas Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ke Kota Padang Panjang
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Hera Kurniawaty, SE, Ak.
NIP : 19760704 200604 2 004
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Nama : Dela Resina, S.FARM.
NIP : 19870523 201502 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Perencana Ahli Pertama
3. Nama : Rosalinda, SS.,M.M.
NIP : 19720316 200701 2 008
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
4. Nama : Muchlison
NIP : 19700626 200901 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Muda TK I / II.b
Jabatan : Sekretaris Pimpinan
- Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ke Kota Padang Panjang ke Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang pada tanggal 09 Juni 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 08 Juni 2023

#

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Hera Kurniawaty, SE, Ak. / 19760704 200604 2 004
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bagian Keuangan c.
4	Maksud perjalanan dinas	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ke Kota Padang Panjang
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kota Padang Panjang
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 09 Juni 2023 c. 09 Juni 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Dela Resina, S.FARM. 2. Rosalinda, SS.,M.M. 3. Muchlison	Penata Muda TK I / III.b Perencana Ahli Pertama Penata TK I / III.d Pelaksana Pengatur Muda TK I / II.b Sekretaris Pimpinan
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 5.01.03.1.02.07
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 08 Juni 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, ST, MM.
NIP. 19750502 199903 1 004

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>WINNY SAYORY, ST, MMP.</u> NIP. 19731003 199803 2 005</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/186/Bappeda/6-2023

- Dasar : 1. -
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Hendrick Kasmadiharja, S.TP, M.Si.
NIP : 19850712 201001 1 019
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
2. Nama : Erik Agustian
Jabatan : Sopir

- Untuk : 1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi Tim LSM BRAC ke Kota Pariaman ke Bappeda Kota Pariaman Kota Pariaman pada tanggal 16 Juni 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan kode rekening 5.01.01.1.06.09

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 16 Juni 2023

#

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR SPT : 094.3/186/Bappeda/6-2023
NOMOR SPPD : 094.3/186/Set/Bappeda/6-2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Hendrick Kasmadiharja, S.TP, M.Si. / 19850712 201001 1 019
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Perencana Ahli Muda c.
4	Maksud perjalanan dinas	Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi Tim LSM BRAC ke Kota Pariaman
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kota Pariaman
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 16 Juni 2023 c. 16 Juni 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Erik Agustian	- Sopir
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 5.01.01.1.06.09
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 16 Juni 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, ST, MM.
NIP. 19750502 199903 1 004

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>WINNY SAYORY, ST, MMP.</u> NIP. 19731003 199803 2 005</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/75/Bappeda/3-2023

Dasar : 1. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : Ir. Benny Sakti, M.M.
NIP : 19670927 199403 1 008
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
2. Nama : Linda Firani, A.Md.
NIP : 19790702 201001 2 006
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Erik Agustian
Jabatan : Sopir

Untuk : 1. menjadi Narasumber dan menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2024 di Kota Padang Panjang. di Hall It.3 Balaikota Padang Panjang Kota Padang Panjang pada tanggal 20 Maret 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dengan kode rekening 5.01.02.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Maret 2023

#

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Ir. Benny Sakti, M.M. / 19670927 199403 1 008
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam c.
4	Maksud perjalanan dinas	menjadi Narasumber dan menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2024 di Kota Padang Panjang.
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kota Padang Panjang
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 20 Maret 2023 c. 20 Maret 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Linda Firani, A.Md.	Penata Muda / III.a Pelaksana
	2. Erik Agustian	- Sopir
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 5.01.02.1.01.05
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 20 Maret 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, ST, MM.
NIP. 19750502 199903 1 004

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. KUARTINI DETI PUTRI, M.Si.</u> NIP. 19691113 199303 2 002</p>
VII. Catatan Lain-Lain	

Matriks Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kab/Kota

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak					
1	Kabupaten Pesisir Selatan	v (sudah dalam tahap validasi akhir di Bagian Hukum)			v		v	v (dalam tahapan akhir pengesahan di Bagian Hukum)		v		v (sebagian)		sedang proses		Terlapir dalam lampiran terpisah	319,137,462,114		Lemahnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan Pemerintahan Nagari dalam penyelesaian validasi data	Agar ada kalender kegiatan mengenai TKPK dari Provinsi untuk di seragamkan oleh seluruh kabupaten/kota
																			Dari 182 Nagari, baru 16 Nagari yang mengirimkan verifikasi data	Agar Penanggulangan Kemiskinan menjadi prioritas oleh kepala daerah dengan tekanan dari provinsi dan pusat
																			Minimnya ketersediaan atau kecukupan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan daerah	Agar ada konvergensi dengan institusi-institusi terkait dalam mendapatkan data yang lebih valid dan efektif
																			Tagging anggaran PEMKA 212 prioritas masih pada 3 OPD yaitu PU, Kesehatan dan Pendidikan	
2	Kab. Agam	v (proses)		v		v		v (SK perubahan karena fungsional baru, yang ada SK tahun 2021)		v		sedang proses				<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beasiswa Miskin Sosialisasi pendataan masyarakat untuk mempunyai kartu jaminan kesehatan penyaluran rastra bantuan sosial kartu indonesia pintar kartu keluarga sejahtera program pemberian makanan tambahan program keluarga harapan program pengembangan rumah tidak layak huni pelatihan ketramprilan 			ketidaksinkronan data, contoh pada dinas pertanian (masyarakat/kelompok tani penerima bantuan tidak terdaftar) dan dinas perkintam (penerima rumah layak tidak huni tidak terdaftar dalam data P3KE)	

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak							
3	Kota Pariaman	v			v		v		v		v (lebih 500 orang miskin, setelah validasi hanya 70 org)		v		Pendidikan : Pendidikan Gratis, SAGA SAJA, Kartu Pariaman Pintar, Bus Sekolah Gratis.		Dinas Pendidikan	a. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan secara terpadu b. Program penanganan melalui Pendanaan Pemerintah Pusat relatif bersifat sektoral dan memiliki ketentuan sesuai petunjuk teknis masing-masing K/L c. Belum optimalnya pengelolaan sistim informasi data penduduk miskin terpadu sebagai basis data yang valid dan akurat		
														Kesehatan : Layanan Kesehatan Gratis, Kartu Pariaman SEhat, Jaminan Persalinan Gratis		Dinas Kesehatan				
														Infrastruktur : Peningkatan Akses Transportasi, Akses Air Minum & Sanitasi Layak						
														Ekonomi & Sosial : Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Jamban Sehat, Fasilitasi dan Bantuan Modal dan sarana usaha bagi UMKM, Bantuan BIBIT, Bantuan Sembako, Pengembangan Digital Market, Bazar Pangan Murah, Penyalurutan Pencari Kerja, Pengembangan Potensi Wisata melalui Spot Tourism, Eco Tourism, Desa						

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak					
4	Kota Padang Panjang	v (masih memakai SPKD karena perodes asinya s/d 2023)		v			v			v		sedang proses		sedang proses	Jaminan sosial berbasis keluarga (PKH, BOS, Bantuan siswa miskin, jamkesmas/jamkesd		Dinsos	komitmen pimpinan (political will), terkait dengan pemilu ada kekhawatiran masyarakat terkait dengan validasi data, masih memakai 14 indikator BPS		
															Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan (KUBE)		Dinsos			
															Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (KUR)		Dinsos			
															Peningkatan dan perluasan program pro rakyat (program air bersih untuk rakyat, program pemasangan jaringan PDAM untuk masyarakat miskin)		Dinas PU			
5	Kab. Padang Pariaman	sedang proses			v		v		v					sedang proses	Program Penataan Desa	4,280,705,700	DPMD	Anggaran dan sumber daya terbatas		
															Program Pemberdayaan Sosial		Dinsos P3A	Paradigma masyarakat yang bersedia masuk data kemiskinan untuk memperoleh bantuan		
															Program Rehabilitasi Sosial		Dinsos P3A	Verifikasi dan validasi data tidak bisa langsung ke lapangan		
															Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Dinsos P3A			
															Program Perlindungan Perempuan		Dinsos P3A			
															Program Penanganan Bencana		Dinsos P3A			
																20,771,951,459				

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak					
6	Kabupaten Solok	ada						ada		sudah		sudah		ada sedang proses penandatanganan oleh bupati	Program Pengelolaan Pendidikan	1,534,275,000	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	a. keterbatasan anggaran, b. perlunya integrasi prgram pusat, provinsi dan kabupaten	untuk dapat memprioritaskan program program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan masalah pada by name by adress	
															Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	665,775,000				
															Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik	868,500,000				
															Program Pengembangan UMKM	10,667,945,907	DKUKMPP			
															Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan Teknologi	5,117,237,863				
															Sub Kegiatan: Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana industri	1,383,287,150				
															Sub Kegiatan: Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1,500,000,000				

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak					
															Sub Kegiatan: Fasilitas Pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUL, IUKI dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	38,997,610				
															Sub Kegiatan: Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kab/Kota	22,499,800				
															Sub Kegiatan: Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	247,042,360				
															Sub Kegiatan: Penyediaan sarana distribusi perdagangan	2,137,882,200				
															Sub kegiatan: misi dagang bagi produk ekspor unggulan	220,998,924				
															Program Administrasi Pemerintahan Desa	145,441,600	DPMN			
															Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	145,441,600				
															Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	123,154,350	DPPKBP3A			

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak							
															Sub Kegiatan: Peningkatan kesertaan penggunaan metode kkontraasepsi jangka panjang (MKJP)	836,596,184				
															Sub Kegiatan: Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintahan, non pemerintahan, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	42,715,800				
															Sub Kegiatan: Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	18,572,500				
															Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	29,365,000				
															Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	32,501,050				
															Program Kawasan Permukiman	590,894,950	DPRKKP			
															Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah tidak layak huni	590,894,950				

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak							
															Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,420,565,915	Dinas Perikanan dan Pangan			
																118,450,800				
																210,018,305				
																2,007,028,305				
																14,170,000				
																14,065,000				
																56,833,505				
															Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Dinas Pertanian			
															Program Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial			
															Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Dinas Sosial			
															Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5,412,828,087	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	SDM di lapangan kurang (PSM, SKSK, PHK, Tagana, Karang Taruna)	Perlu kebijakan standar kemiskinan di daerah agar menentukan validasi pada masyarakat miskin	
																		Pemerintah Desa Kurang Respon dan Keperdulian (kepala desa sedang diganti)	Dipastikan semua masyarakat memiliki NIK	
																		Koordinasi antar SDM dengan desa, Kecamatan dan Dinas terkait	Perbaiki basis data	
															Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja		DPTSP dan Naker	Jumlah Kelompok sasaran lebih besar dari ketersediaan program/kegiatan dan alokasi dana		
																95,426,946,622		Belum optimalnya integrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan		

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak							
7	Kab. Kep. Mentawai	sedang proses		sedang proses		sedang proses		sedang proses		sudah		seang proses tingkat desa			20903 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	877,038,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belum terintegrasinya sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan II PKH, PAMSIMAS, BOS, JAMKESDA		
															32702 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3,224,796,650	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belum optimalnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)		
															32503 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9,195,332,627	DINAS PERIKANAN			
															32504 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	965,999,888	DINAS PERIKANAN			
															32506 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	833,950,800	DINAS PERIKANAN			
															21705 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	487,525,300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
															21706 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	365,254,500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
															21708 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	625,274,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak							
															33102 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,280,514,500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
															10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINIMUM	1,052,530,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
															10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINIMUM	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
															10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINIMUM	6,040,954,300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
															10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINIMUM	1,672,962,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
															10310 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	17,924,984,405	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
															10310 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	24,995,519,535	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
															10310 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3,259,976,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak													
																10403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6,185,956,633	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
																10403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	516,940,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
																10404 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KILIMUH	1,050,204,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
																10405 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	865,606,725	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
																10402 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	539,570,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
																10604 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	653,122,300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
																10605 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	346,517,560	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
																10605 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	374,167,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
																50202 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	11,492,249,499	BADAN KEUANGAN DAERAH		
																	114,364,524,345			

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak							
8	Solok Selatan	Dalam proses			V	V		V		V				belum di SK kan	Program pemenuhan upayakesehatanper orandangan upaya kesehatan masyarakat	88,363,466,114	Dinas Kesehatan	• Semakin sempit ruang fiskal daerah sehingga upaya untuk menghilangkan kantong-kantong kemiskinan menjadi terbatas	• Perlunya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah Pusat sehingga peluang alokasi DAK dapat meningkat	
															Program rehabilitasi sosial	1,468,068,667	Dinas sosial	• Pemahaman tentang DTKS dan P3KE belum seragam	• Perlu pemahaman yang seragam antara OPD Provinsi dan Kab/kota terkait DTKS dan P3KE	
															Program perlindungan dan jaminan sosial	209,549,773	Dinas sosial dan PMD	• Jumlah RT penerima PKH di kabupaten Solok Selatan relatif rendah diantara kabupaten/kota lainnya		
															Program penanganan bencana+R105:R118	1,632,641,670	Dinas sosial dan PMD			
															Program pengembangan perumahan	282,640,000	Dinas Perumkim dan LH			
															Program kawasan perumahan	1,269,166,620	Dinas Perumkim dan LH			
															Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	857,337,760	Dinas Perumkim dan LH			
															Program pengelolaan dan pengembangan sistempenyediaan air	6,499,151,456	Dinas PUTRP			
															Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4,131,886,250	Dinas PUTRP			
															Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	330,258,100	Dinas Tenaga kerja			
															Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1,066,745,743	Dinas pertanian			
															Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3,586,165,205	Dinas pertanian			

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak													
																Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	266,200,050	DKPP		
																Program pengelolaan perikanan budidaya	1,205,242,658	DKPP		
																Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2,149,602,386	DKPP		
																Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	346,918,219	Dinas Perinkop dan UKM		
																Program pengembangan UMKM	699,483,674	Dinas Perinkop dan UKM		
9	Bukittinggi	SPKD		v		v	v			v		sedang dim proses		v	Program Indonesia Pintar (Pip) Pendidikan dasar dan menengah, Program Pengolahan Pendidikan.	APBD Rp. 12,836.516.400 dan APBN Rp. 9.356.202.680		Kesulitan dalam menentukan instrumen / indikator dalam melaksanakan validasi di tingkat kelurahan	melaksanakan rapat koordinasi di tingkat provinsi dengan mengundang Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pengetahuan/kapasitas TKPK Kabupaten/Kota dengan menghadirkan narasumber/ tenaga ahli	
																Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas keluarga, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			Belum adanya petunjuk teknis dalam melaksanakan validasi di tingkat kelurahan	

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak					
															Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat					
															Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat					
															Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program perlindungan dan jaminan sosial, Program Penanganan Bencana					
															Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja					
10	Kabupaten 50 Kota	sedang proses			v		v		v			v (sebagian)			sedang proses	Terlapir dalam lampiran terpisah	24.421,307,600		Lemahnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan Pemerintahan Nagari dalam penyelesaian validasi data	Agar ada kalender kegiatan mengenai TKPK dari Provinsi untuk di seragamkan oleh seluruh kabupaten/kota
																			Dari 79 Nagari, baru 56 Nagari yang mengirimkan verifikasi data	Agar Penanggulangan Kemiskinan menjadi prioritas oleh kepala daerah dengan intervensi dari provinsi dan pusat
																			Minimnya ketersediaan atau kecukupan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan daerah	Agar ada konvergensi dengan institusi-institusi terkait dalam mendapatkan data yang lebih valid dan efektif
																			Tagging anggaran PEMKA 212 prioritas agar segera di selesaikan	
11	Pasaman Barat	v			v	v		v		v		v				2022 belum ada	2022 belum ada		Komitmen secara umum sudah tertuang dalam RPJM.Target Tahun 2026 adalah.....	Pengambil kebijakan : kemiskinan menjadi isu utama dalam pembangunan, dan melakukan rakor rutin

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak							
12	Sawahlunto	v		v		v		v		v		v				82,433,098,908		<p>1. Data kemiskinan belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Masih banyak ditemukan warga miskin yang tidak mendapat bantuan, sementara itu warga yang tidak miskin ada yang mendapat bantuan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sawahlunto masih belum valid.</p>	<p>1. Peningkatan kualitas database kemiskinan melalui pemutakhiran data base DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diperbaharui secara periodik dengan rentang periode tertentu agar di dapatkan data yang valid sehingga pemberian bantuan tepat sasaran.</p>	
																		<p>2. Belum optimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai dengan tugas pokoknya.</p>	<p>2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan serta antar kabupaten/kota dan provinsi.</p>	
																		<p>3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan belum memiliki konsep yang tepat sehingga upaya tersebut belum</p>		
																		<p>4. Pola pikir dan mental miskin masyarakat.</p>		
																		<p>5. Sebagian kecil masyarakat Kota Sawahlunto khususnya kalangan warga tidak mampu, cenderung mempunyai pola pikir dan mental miskin, sehingga kurang produktif, kurang tekun, kurang serius bekerja, kurang keberanian untuk memulai usaha dan mengharapkan menerima</p>		

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak					
															6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
															7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
															8. Program Pengembangan Perumahan					
															9. Program Kawasan Permukiman					
															10. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					
															11. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja					
															12. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					
															13. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri					
															14. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
															15. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					
															16. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
															17. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
															18. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak							
															19. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					
13	Sijunjung	v		v				v		v		v			Terlampir dalam lampiran terpisah	177,511,454,715	Terlampir dalam lampiran terpisah	<p>a. Masih ada keluarga miskin yang tidak masuk ke dalam DTKS maupun Data P3KE sehingga masih terjadi exclusion error dan inclusion error</p> <p>b. Keluarga miskin banyak yang tidak tergabung dalam kelompok usaha lainnya sehingga tidak mendapatkan akses bantuan usaha.</p> <p>c. Tempat tinggal keluarga miskin ada yang berpencar dan jauh dari permukiman sehingga sebagian dari mereka tidak mendapatkan infrastruktur jalan, air minum, dan sanitasi layak.</p>	<p>1. Adanya fasilitasi bimbingan teknis penyusunan dokumen RAT dan LP2KD untuk Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga terbentuknya persamaan persepsi dan penyusunan dokumen terlaksana sesuai ketentuan</p> <p>2. Perlu dilaksanakan rakor penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera barat secara berkala yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota berjalan sinergi dan konvergensi</p> <p>3. Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan/kemiskinan ekstrem yang tinggi perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat</p>	
14	Kabupaten Tanah Datar	sedang proses			v		v	v		v		v (sebagian)		sedang proses	Terlampir dalam lampiran terpisah	177,511,454,715		<p>Tidak adanya Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data P3KE</p>	Mohon adanya Pencerahan terkait Pengelolaan data P3KE serta penyusunan Dokumen RPKD dan RAT dari Instansi terkait dan dari Kementerian PMK maupun dari TNP2K	
15	Kota Solok		√		√	√		√		√		√		√		31,728,872,853				
			(proses penyusunan)												Pengelolaan		Dinas Pendidikan	- Koordinasi antar pemerintah dengan swasta belum optimal	- Mengoptimalkan peran swasta dalam perencanaan dan penanggulangan	
															Pengelolaan PAUD		Dinas Pendidikan	- Jumlah sasaran (keluarga		

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah						SK TKPK		Serah Terima Data P3KE		Validasi Data P3KE oleh Nagari		SK Validasi oleh Kepala Daerah		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Total Anggaran	OPD Penanggung Jawab	Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Saran
		RPKD		RAT		LP2KD														
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak							
16	Kabupaten Pasaman	v			v		v			v		v		sedang proses		Program Wajib Belajar 12 tahun		Dinas Pendidikan	Belum adanya atu data yang valid yang dapat di akses oleh seluruh OPD Pemangku Kemiskinan untuk dapat di intervensi secara bersama sama juga.	Menyiapkan satu data kemiskinan yang Valid dan dapat diakses bersama untuk di intervensi bersama sama juga.
																Program Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial	Ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan masih bersifat makro	menyiapkan satu Aplikasi yang memuat Perencanaan sampai dengan Evaluasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta data Penanggulangan Kemiskinan
																Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Dinas Sosial	Belum adanya proses perencanaan sampai evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam penentasan kemiskinan	
																Program Pemenuhan Upaya Kesehatan masyarakat dan perorangan dan program2 lainnya		Dinas Kesehatan		
17	Kabupaten Dharmasraya			V				V		V		V		V		lampiran terpisah	Rp.24.421.307.600,-	1). Dinas Koperasi dan UKM 2). Dinas Pertanian 3). Dinas Pangan dan Perikanan 4). Dinas Kesehatan 5). Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7). Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan 8). Dinas Sosial, PPPA, PPKB 9).	Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mengacu pada data sasaran kemiskinan. Misalnya Dinas Transnaker dalam pelatihan pancaker belum memakai prioritas data kemiskinan	1. perlu sosialisasi kepada pimpinan di daerah, terkait upaya pengetasan kemiskinan 2. perlu peningkatan kegiatan pemberdayaan, masyarakat setiap kabupaten/Kota



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/287/Bappeda/8-2023

Dasar : 1. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : Hendrick Kasmadiharja, S.TP, M.Si.
NIP : 19850712 201001 1 019
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
2. Nama : Rosalinda, SS.,M.M.
NIP : 19720316 200701 2 008
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Nizamul Bastian, SH.
NIP : 19730702 201001 1 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana

Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ke Kabupaten kota Bukittinggi ke Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi pada tanggal 29 Agustus 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 28 Agustus 2023



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Medi Iswandi, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/272/Bappeda/8-2023

Dasar : 1. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : Dasrial
NIP : 19721226 200801 1 002
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : Rosalinda, SS.,M.M.
NIP : 19720316 200701 2 008
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Nizamul Bastian, SH.
NIP : 19730702 201001 1 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana

Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ke Kabupaten Solok ke Kab. Solok Kab. Solok pada tanggal 21 Agustus 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 21 Agustus 2023



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Medi Iswandi, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/288/Bappeda/8-2023

Dasar : 1. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : Ir. Benny Sakti, M.M.
NIP : 19670927 199403 1 008
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
2. Nama : Nizamul Bastian, SH.
NIP : 19730702 201001 1 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Erik Agustian
Jabatan : Sopir

Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ke Kabupaten Pasaman Barat ke Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat pada tanggal 30 Agustus 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 29 Agustus 2023



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/294/Bappeda/9-2023

Dasar : 1. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : Hendrick Kasmadiharja, S.TP, M.Si.
NIP : 19850712 201001 1 019
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
2. Nama : Nizamul Bastian, SH.
NIP : 19730702 201001 1 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Erik Agustian
Jabatan : Sopir

Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ke Kabupaten Dharmasraya ke Kab. Dharmasraya Kab. Dharmasraya pada tanggal 11 - 12 September 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 8 September 2023



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/293/Bappeda/9-2023

Dasar : 1. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : Rosalinda, SS.,M.M.
NIP : 19720316 200701 2 008
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : Yuliarti
NIP : 19790712 201001 2 017
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Pengadministrasi Persuratan
3. Nama : Muchlison
NIP : 19700626 200901 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Muda TK I / II.b
Jabatan : Sekretaris Pimpinan

Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ke Kota Payakumbuh ke Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh pada tanggal 05 September 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 01 September 2023



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Medi Iswandi, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
P A D A N G

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumbar
Melalui Yth : Ibu Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 13 September 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monev Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ke Kabupaten Dharmasraya

Dasar : 1. Nota Dinas Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Nomor 050/417/IX/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 7 September 2023, perihal Izin perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Ke Kabupaten Dharmasraya
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094/294/IX/SPT/DD/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 8 Sept 2023

Maksud dan Tujuan : 1. Maksud : Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekaligus pembinaan Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ke Kabupaten Dharmasraya
2. Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi di Kabupaten Dharmasraya

Pegawai yang ditugaskan : 1. Hendrick Kasmadiharja, S.TP, M.Si
2. Nizhamul Bastian, SH
3. Erik Agustian

Tanggal : 11 s/d 12 September 2023

I. PENDAHULUAN

1. RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Sumatera Barat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu RAD Pangan dan Gizi terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam jangka pendek

(tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja SKPD. Implementasi dan pencapaian RAD Pangan dan Gizi ini perlu didukung melalui sinergitas program dan pendanaan yang berasal dari Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD), meskipun tidak menutup kemungkinan dukungan pendanaan yang berasal swasta dan masyarakat.

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa RAN-PG ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan RAD-PG provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.
3. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:
 - a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan RAD-PG;
 - b. Mengidentifikasi permasalahan serta tantangan yang timbul dan/atau akan timbul dari pelaksanaan RAD-PG;
 - c. Memberikan penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil kegiatan RAD-PG yang sedang berlangsung atau yang telah selesai; dan
 - d. Menyiapkan rekomendasi bagi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi berikutnya.

II. HASIL

1. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 dilakukan untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja utama/output dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi selain mencakup indikator input, proses, dan output, juga dapat dilakukan pada indikator outcome dan impact.
2. Dari kegiatan monitoring dan evaluasi ke Bappeda Kabupaten Dharmasraya, didapat informasi bahwa belum menyusun dokumen RAD-PG tersebut karena tidak adanya informasi mengenai penyusunan dokumen tersebut, dan juga pada waktu Bappeda Provinsi Sumbar mengadakan konsultasi publik RAD-PG Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 pada tanggal 9 November 2022, dimana telah disampaikan kepada Bappeda kabupaten Kota untuk menyusun RAD-Pnya bersamaan dengan penyusunan oleh Provinsi, sehingga nantinya tinggal mensinkronkan antara dokumen Provinsi dengan dokumen kabupaten/Kota, karena Bappeda Kabupaten Dharmasraya tidak menghadirinya, sehingga tidak mendapatkan informasi mengenai penyusunan RAD-PG tersebut, untuk itu Bappeda Kab. Dharmasraya masih menunggu arahan dan pedoman dalam penyusunan dokumen tersebut,
3. Berkenaan dengan hal tersebut, Bappeda Kabupaten Dharmasraya minta agar Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengadakan sosialisasi sekaligus Bimbingan

teknis mengenai penyusunan RAD-PG yang sesuai dengan surat edaran tersebut dengan narasumber dari Kementerian atau OPD teknis Provinsi Sumatera Barat

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Bappeda Kabupaten Dharmasraya belum menyusun RAD-PG karena belum adanya informasi terkait teknis penyusunan serta aturan-aturan lainnya.

Rekomendasi

- Diharapkan Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan RAD-PG kepada Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan Bappeda dan OPD teknis Kabupaten/Kota, serta OPD Provinsi terkait.
- Agar Bappeda Kabupaten Dharmasraya untuk dapat membentuk tim RAD-PG dan menyusun RAD-PG

VI. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat, mohon arahan Bapak, terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas,



Nizhamul Bastian, SH

Foto kegiatan :





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
P A D A N G

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumbar
Melalui Yth : Ibu Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 31 Agustus 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monev Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ke Kabupaten Pasaman Barat

Dasar : 1. Nota Dinas Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Nomor 050/405/VIII/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal Izin perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Ke Kabupaten Pasaman Barat
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094/273/VIII/SPT/DD/Eko-SDA/Bappeda-2022 tanggal 30 Agustus 2023

Maksud dan Tujuan : 1. Maksud :
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekaligus pembinaan Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ke Kabupaten Pasaman Barat
2. Tujuan :
Untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi di Kabupaten Pasaman Barat

Pegawai yang ditugaskan : 1. Ir. Benny Sakti, MM
2. Nizhamul Bastian, SH
3. Erik Agustian

Tanggal : 30 Agustus 2023

I. PENDAHULUAN

1. RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Sumatera Barat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu RAD Pangan dan Gizi terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah

yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja SKPD. Implementasi dan pencapaian RAD Pangan dan Gizi ini perlu didukung melalui sinergitas program dan pendanaan yang berasal dari Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD), meskipun tidak menutup kemungkinan dukungan pendanaan yang berasal swasta dan masyarakat.

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa RAN-PG ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan RAD-PG provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.
3. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:
 - a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan RAD-PG;
 - b. Mengidentifikasi permasalahan serta tantangan yang timbul dan/atau akan timbul dari pelaksanaan RAD-PG;
 - c. Memberikan penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil kegiatan RAD-PG yang sedang berlangsung atau yang telah selesai; dan
 - d. Menyiapkan rekomendasi bagi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi berikutnya.

II. HASIL

1. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 dilakukan untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja utama/output dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi selain mencakup indikator input, proses, dan output, juga dapat dilakukan pada indikator outcome dan impact.
2. Dari kegiatan monitoring dan evaluasi ke Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, didapat informasi bahwa belum menyusun dokumen RAD-PG tersebut karena masih menunggu arahan dan pedoman dalam penyusunan dokumen tersebut, walaupun Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan konsultasi publik penyusunan RAD-PG pada bulan November tahun 2022, dimana telah disampaikan kepada Bappeda kabupaten Kota untuk menyusun RAD-Pnya bersamaan dengan penyusunan oleh Provinsi, sehingga nantinya tinggal mensinkronkan antara dokumen Provinsi dengan dokumen kabupaten/Kota
3. Berkenaan dengan hal tersebut, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat minta agar Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengadakan sosialisasi sekaligus Bimbingan teknis mengenai penyusunan RAD-PG yang sesuai dengan surat edaran tersebut dengan narasumber dari Kementerian atau OPD teknis Provinsi Sumatera Barat

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Bappeda Kabupaten Pasaman Barat belum menyusun RAD-PG karena belum adanya informasi terkait teknis penyusunan serta aturan-aturan lainnya.

Rekomendasi

- Diharapkan Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan RAD-PG kepada Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan Bappeda dan OPD teknis Kabupaten/Kota, serta OPD Provinsi terkait.
- Agar Bappeda Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat membentuk tim RAD-PG dan menyusun RAD-PG

VI. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat, mohon arahan Bapak, terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas,



Nizhamul Bastian, SH

Foto kegiatan :





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
P A D A N G

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumbar
Melalui Yth : Ibu Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Bapak Kabid. Ekonomi dan SDA
Tanggal : 22 Agustus 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monev Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ke Kabupaten Solok

Dasar : 1. Nota Dinas Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Nomor 050/384/VIII/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 18 Agustus 2023, perihal Izin perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Ke Kabupaten Solok
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094/273/VIII/SPT/DD/Eko-SDA/Bappeda-2022 tanggal 21 Agustus 2023

Maksud dan Tujuan : 1. Maksud :
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekaligus pembinaan Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ke Kabupaten Solok
2. Tujuan :
Untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi di Kabupaten Solok

Pegawai yang ditugaskan : 1. Rosalinda, SS,MM
2. Nizhamul Bastian, SH
3. Dasrial

Tanggal : 21 Agustus 2023

I. PENDAHULUAN

1. RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Sumatera Barat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu RAD Pangan dan Gizi terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja SKPD. Implementasi dan pencapaian RAD Pangan dan Gizi ini perlu didukung melalui sinergitas program dan pendanaan yang berasal dari Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD), meskipun tidak menutup kemungkinan dukungan pendanaan yang berasal swasta dan masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa RAN-PG ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan RAD-PG provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.
3. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:
 - a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan RAD-PG;
 - b. Mengidentifikasi permasalahan serta tantangan yang timbul dan/atau akan timbul dari pelaksanaan RAD-PG;
 - c. Memberikan penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil kegiatan RAD-PG yang sedang berlangsung atau yang telah selesai; dan
 - d. Menyiapkan rekomendasi bagi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi berikutnya.

II. HASIL

1. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 dilakukan untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja utama/output dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi selain mencakup indikator input, proses, dan output, juga dapat dilakukan pada indikator outcome dan impact.
2. Dari kegiatan monitoring dan evaluasi ke Bappeda Kabupaten Solok, ternyata belum menyusun dokumen RAD-PG tersebut karena tidak mengetahui adanya kewajiban untuk menyusun dokumen tersebut. Bappeda Kabupaten Solok hanya terlibat sebagai anggota tim dalam penyusunan dokumen ketahanan pangan yang dikoordinir oleh Dinas Pangan Kabupaten Solok

3. Untuk itu, Bappeda Kabupaten Solok minta supaya dilaksanakan sosialisasi mengenai teknis penyusunan RAD-PG yang sesuai dengan surat edaran tersebut dengan narasumber dari Kementerian atau OPD teknis Provinsi Sumatera Barat

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Bappeda Kabupaten Solok belum menyusun RAD-PG karena belum adanya informasi terkait teknis penyusunan serta aturan-aturan lainnya.

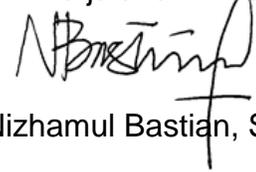
Rekomendasi

Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengadakan sosialisasi penyusunan RAD-PG kepada Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan Bappeda dan OPD teknis Kabupaten/Kota, serta OPD Provinsi terkait.

VI. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat, mohon arahan Bapak, terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas,



Nizhamul Bastian, SH

Foto Kegiatan :





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
P A D A N G

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumbar
Melalui Yth : Ibu Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Bapak Kabid. Ekonomi dan SDA
Tanggal : 6 September 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monev Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ke Kota Payakumbuh

Dasar : 1. Nota Dinas Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Nomor 050/.../IX/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal .. September 2023, perihal Izin perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Ke Kota Payakumbuh.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094/293/IX/SPT/DD/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 01 September 2023

Maksud dan Tujuan : 1. Maksud :
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekaligus pembinaan Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ke Kota Payakumbuh
2. Tujuan :
Untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi di Kota Payakumbuh

Pegawai yang ditugaskan : 1. Rosalinda, SS,MM
2. Yuliarti
3. Muchlison

Tanggal : 5 September 2023

I. PENDAHULUAN

1. RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Sumatera Barat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu RAD Pangan dan Gizi terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja SKPD. Implementasi dan pencapaian RAD Pangan dan Gizi ini perlu didukung melalui sinergitas program dan pendanaan yang berasal dari Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD), meskipun tidak menutup kemungkinan dukungan pendanaan yang berasal swasta dan masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa RAN-PG ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan RAD-PG provinsi atau RAD-PG Kabupaten/Kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.
3. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:
 - a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan RAD-PG;
 - b. Mengidentifikasi permasalahan serta tantangan yang timbul dan/atau akan timbul dari pelaksanaan RAD-PG;
 - c. Memberikan penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil kegiatan RAD-PG yang sedang berlangsung atau yang telah selesai; dan
 - d. Menyiapkan rekomendasi bagi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi berikutnya.

II. HASIL

1. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 dilakukan untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja utama/output dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi selain mencakup indikator input, proses, dan output, juga dapat dilakukan pada indikator outcome dan impact.
2. Dari kegiatan monitoring dan evaluasi ke Bappeda Kota Payakumbuh, ternyata belum menyusun dokumen RAD-PG untuk periode Tahun 2022 – 2026, dari informasi yang tim peroleh waktu diskusi di Kantor Bappeda Kota Payakumbuh bahwa pada periode sebelumnya dokumen RAD - PG periode Tahun 1917-2021 Bappeda Kota Payakumbuh ada menyusun Dokumen tersebut, namun dokumen tersebut tidak diketahui lagi keberadaan baik hard copy maupun soft copynya karna dengan ada mutasi dan rotasi personal dibidang.

3. Dari diskusi yang berkembang dapat tim monev simpulkan kenapa Kota Payakumbuh tidak menyusun Dokumen RAD–PG Tahun 2022-2026 dikarenakan tindak lanjut atau reward dan lain lainnya dari dokumen yang telah dibuat sebelumnya tersebut tidak ada, maka dokumen tersebut tidak dibuat lagi.
4. Oleh Sebab itu Tim monev mengingatkan kembali kepada Kota Payakumbuh khususnya Bappeda berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 sesuai dengan pasal 21 point (1) Bupati dan Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PG Kabupaten/Kota kepada Gubernur, sekali dalam 1 (satu) Tahun dan sewaktu – waktu apabila diperlukan, Point (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD – PG Provinsi kepada Menteri/Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sekali dalam 1 (satu) Tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Untuk itu, Tim Monev menyarankan agar Bappeda Kota Payakumbuh membuat kembali RAD – PG periode tahun 2022-2026 sesuai dengan amanat pada Perpres nomor 83 Tahun 2027 agar memudahkan dalam membuatnya agar Kota Payakumbuh meninjau kembali dokumen RAD-PG yang telah dibuat pada periode sebelumnya.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Bappeda Kota Payakumbuh belum menyusun RAD-PG tahun 2022-2026.

Rekomendasi

Pemerintah Kota Payakumbuh agar membuat RAD-PG Tahun 2022-2026 dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Gubernur.

VI. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat, mohon arahan Bapak, terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas,



Rosalinda, SS, MM

Foto Kegiatan :



MATRIK MONEV RAD PANGAN DAN GIZI KE KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	Apakah sudah mengetahui mengenai RAD-PG dan arahan Kabupaten/ Kota untuk menyusun RAD-PG?		Sudahkah menyusun dokumen RAD-PG (kalau ada mohon disampaikan softcopynya)			Kalau belum/sedang proses, sudah sampai dimana tahapannya	Apakah sudah pernah menyusun RAD-PG sebelumnya?		Jika sudah menyusun, apakah sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi?		Apakah sudah melaporkan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas?		Apakah sudah mengintegrasikan dokumen RAD-PG ke dalam dokumen perencanaan?		Apa saja kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG?	Saran dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG?
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sedang proses		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Kota Sawahlunto		√		√	√	-		√	-	-	-	-	-	Belum ada informasi/sosialisasi tentang penyusunan RAD-PG kepada Bappeda Kab/kota baik oleh Bappeda provinsi maupun melalui OPD terkait	Agar diberikan sosialisasi terlebih dahulu dan pembelakan teknis terkait urgensi penyusunan RAD-PG kab/kota	
2	Kabupaten Solok		√		√		-		√	-	-	-	-	-	Belum ada petunjuk teknis dalam penyusunan RAD-PG	Agar Bappeda Provinsi suntu dapat mensosialisasikan dan mengadakan Bimtek penyusunan RAD-PD	
3	Kabupaten Padang Pariaman	√			√		Masih dalam proses koordinasi dengan OPD terkait		√	-	-		√	√	-	Diharapkan ada Bimbingan teknis dari Bappeda Provinsi terkait penyusunan RAD-PG terhadap kab/kota	
4	Kota Bukittinggi	√			√		tapap persiapan (pembentukan SK Tim dll)		√		√		√	√	Tidak ada	-	
5	Kabupaten Tanah Datar		√	-	-	-	Belum proses		√		√		√	√	Belum ada	Belum ada	
6	Kabupaten Pasaman	√			√		Mempelajari Juknis penyusunan dokumen RAD-PG dan menunggu arahan pimpinan		√		√		√	√	-	-	
7	Kabupaten Pasaman Barat	√			√		Akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan menyiapkan SK Tim penyusunan RAD-PG	√			√		√	√	Belum adanya petunjuk teknis dalam penyusunan RAD-PG tersebut	agar Bappeda Proovinsi untuk dapat melaksanakan Bimtek penyusunan RAD-PG kepada kab/kota	
8	Kabupaten Agam	√		√			Sedang menyusun draft RAD Pangan dan Gizi		√		√		√	√	Komitmen dan pengetahuan trkait aspek teknis penyusunan	Agar dapat dibentuk kelompok kerja penyusunan RAD-PG, OPD teknis sebagai leader sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya	

NO	KABUPATEN/KOTA	Apakah sudah mengetahui mengenai RAD-PG dan arahan Kabupaten/ Kota untuk menyusun RAD-PG?		Sudahkah menyusun dokumen RAD-PG (kalau ada mohon disampaikan softcopynya)			Kalau belum/sedang proses, sudah sampai dimana tahapannya	Apakah sudah pernah menyusun RAD-PG sebelumnya?		Jika sudah menyusun, apakah sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi?		Apakah sudah melaporkan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas?		Apakah sudah mengintegrasikan dokumen RAD-PG ke dalam dokumen perencanaan?		Apa saja kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG?	Saran dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG?
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sedang proses		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	Kota Pariaman	√		√			-	√		√	√		√		Adanya perubahan SOTK, kurangnya ketersediaan data masing masing SKPD kab/kota	agar dapat diadakan rapat koordinasi di Bappeda provinsi untuk penyeragaman penyusunan RAD-PG kab/kota	
10	Kota Padang Panjang	√			√		Nihil		√			√		√	Menunggu dokumen dari Provinsi untuk turunan kegiatannya	-	
11	Kota solok	√			√		-	√		√		√	√		Belum melakukan penyusunan RAD-PG untuk priode tertentu	Agar Pemprov. Dapat mensosialisasikan kepada Kab/Kota terkait penyusunan RAD-PG sehingga terdapat sinkronisasi dokumen Provinsi dengan Kab/Kota	
12	Kabupaten Sijunjung		√		√		Belum proses		√	-	-		√	√		Mengingat : 1 UU no.18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima tahun 2 Berdasarkan pedoman penyusunan RADPG tahun 2021-2024 yang dikeluarkan Bappenas, penyusunan RADpG mengacu pada RPJMD dan RAD PD diintegrasikan dengan RKPD	

NO	KABUPATEN/KOTA	Apakah sudah mengetahui mengenai RAD-PG dan arahan Kabupaten/ Kota untuk menyusun RAD-PG?		Sudahkah menyusun dokumen RAD-PG (kalau ada mohon disampaikan softcopynya)			Kalau belum/ sedang proses, sudah sampai dimana tahapannya	Apakah sudah pernah menyusun RAD-PG sebelumnya?		Jika sudah menyusun, apakah sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi?		Apakah sudah melaporkan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas?		Apakah sudah mengintegrasikan dokumen RAD-PG ke dalam dokumen perencanaan?		Apa saja kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG?	Saran dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG?
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sedang proses		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																<p>3 Pengintegrasian RAD PG ke dalam RKPD tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan karena RKPD tahun 2024 sudah ditetapkan pada bulan Juli 2023</p> <p>4 Dengan adanya pilkada serentak tahun 2024, periode RPJMD yang akan datang adalah 2025-2029</p> <p>Berdasarkan pertimbangan diatas, disarankan sebagai berikut :</p> <p>1 Periodesasi perencanaan pembangunan sektoral daerah lima tahunan sebaiknya disesuaikan dengan priodesasi RPJMD</p> <p>2 Bagi daerah yang belum menyusun RAD PG 2021-2026 sebaiknya berpedoman yang dikeluarkan Bappenas, sebaiknya penyusunan RAD PG nya dilakukan tahun 2025 dengan mengacu pada RPJMD 2025-2029 dengan periode yang sama dengan RPJMD</p>	
13	Kabupaten Pesisir Selatan	√			√		-		√						KemampuanSDM yang dimiliki daerah dalam penyusunan RAD PG, Keterbatasan anggaran dalam pencapaian target RAD PG	1 Kewenangan Perangkat Daerah untuk menyusun sebaiknya di sinkronisasi sesuai dengan sub kegiatan berdasarkan Kepmen Dalam Negeri Nomor. 900,1,15,5-1317 tahun 2013	

NO	KABUPATEN/KOTA	Apakah sudah mengetahui mengenai RAD-PG dan arahan Kabupaten/ Kota untuk menyusun RAD-PG?		Sudahkah menyusun dokumen RAD-PG (kalau ada mohon disampaikan softcopynya)			Kalau belum/ sedang proses, sudah sampai dimana tahapannya	Apakah sudah pernah menyusun RAD-PG sebelumnya?		Jika sudah menyusun, apakah sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi?		Apakah sudah melaporkan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas?		Apakah sudah mengintegrasikan dokumen RAD-PG ke dalam dokumen perencanaan?		Apa saja kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG?	Saran dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG?
		Ya	Tidak	Sudah	Belum	Sedang proses		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																2 Pelaksanaan RAD PG di kabupaten sebaiknya didukung anggaran dari pusat dan Provinsi serta dilakukan pengawasan dan evaluasi implementasi ketercapaian target RAD PG	
14	Kota Payakumbuh	√			√		Pembuatan kerangka penyusunan		√	√		√	√		Belum mendapat arahan lengkap teknis penyusunan RAD-PG	Dibutuhkan sosialisasi tentang teknis penyusunan RAD-PG	
15	Kabupaten Dharmasraya		√		√		-		√	√		√	√		-	Mohon Bappeda Provinsi difasilitasi juklak dan Juknis penyusunan RAD-PG	
16	Kabupaten Solok Selatan	√		√			Nihil		√	-	-	-	-	-	Belum ada pedoman dan petunjuk teknis serta belum adanya sosialisasi terhadap penyusunan RAD-PG	Perlunya dokumen RAD-PG diseosialisasikan sehingga kabupaten/kota bisa menselaraskan dan sebagai pedoman penyusunan pada tingkat kab/kota	
17	Kabupaten 50 Kota	√				√	Saat ini sedang membuat draft RAD-PG		√	√		√	√		Belum pernah mengikuti sosialisasi/Bimtek penyusunan RAD-PG	Agar dilaksanakan sosialisasi/Bimtek dan studi tiru penyusunan RAD-PG	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/ 152 /6/2023

Dasar : DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN :

Kepada : 1 Nama : Teddi Rafdianto, M.Kom
NIP : 19790603 201001 1 006
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi

2 Nama : Nizamul Bastian, SH.
NIP : 19730702 201001 1 003
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Pelaksana

Untuk : 1. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat pada tanggal 7 Juni 2023 ke kota Pariaman

2. Anggaran tersedia pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 7 Juni 2023



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/150/6/2023

Dasar : DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN :

Kepada : 1 Nama : Harry Febri, SE
NIP : 19790603 201001 1 006
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
2 Nama : Muslim Libtiandra, SE
NIP : 19740312 200701 1 005
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana

Untuk : 1. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat pada tanggal 6 Juni 2023 ke kabupaten Pasaman
2. Anggaran tersedia pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 6 Juni 2023



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/156/6/2023

Dasar : DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN :

Kepada : 1 Nama : Linda Firani, Amd
NIP : 19790702 201001 2 006
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana

2 Nama : Yuliarti
NIP : 19790712 2010012017
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II.d
Jabatan : Pelaksana

Untuk : 1. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat pada tanggal 7 Juni 2023 ke kabupaten Pesisir Selatan
2. Anggaran tersedia pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 6 Juni 2023



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



BIDANG EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
Tanggal : 05 Juni 2023
Nomor : 050/154/ND/Eko-SDA/Bappeda/6/2023
Lampiran : 2 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka
Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring
Evaluasi Pelaksanaan Latsitardanus Xliiii/2023 Sumatera Barat Ke Kota Solok

Sehubungan dengan surat gubernur Sumatera Barat Nomor : 325/441//Kesbangpol perihal Monitoring dan Pemantauan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat, dengan ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Kegiatan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei s/d 8 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Taruna/Taruni dari AKMIL, AAU, AAL, IPDN, BSSN, Mahasiswa/mahasiswi UNP dan Baiturrahmah
2. Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten / Kota terpilih yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kota Padang yang terdiri dari 2 kategori kegiatan yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non fisik
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon persetujuan Bapak untuk dapat menugaskan tim melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat ke Kota Solok pada tanggal 6 Juni 2023 dengan anggota tim yaitu Yanfitri, S.Sos, MM,Rosalinda, SS. MM Afrizon, S.Sos dan Edison
4. Adapun Biaya perjalanan dinas ini dibebankan pada Sub Kegiatan masing-masing Bidang yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD Bappeda Tahun 2023.

Demikian disampaikan kepada Bapak atas persetujuannya, diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



BIDANG EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
Tanggal : 05 Juni 2023
Nomor : 050/257/ND/Eko-SDA/Bappeda/6/2023
Lampiran : 2 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka
Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring
Evaluasi Pelaksanaan Latsitardanus Xliiii/2023 Sumatera Barat Ke Kabupaten Pasaman

Sehubungan dengan surat gubernur Sumatera Barat Nomor : 325/441//Kesbangpol perihal Monitoring dan Pemantauan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat, dengan ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Kegiatan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei s/d 8 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Taruna/Taruni dari AKMIL, AAU, AAL, IPDN, BSSN, Mahasiswa/mahasiswi UNP dan Baiturrahmah
2. Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten / Kota terpilih yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kota Padang yang terdiri dari 2 kategori kegiatan yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non fisik
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon persetujuan Bapak untuk dapat menugaskan tim melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat ke Kabupaten Pasaman pada tanggal 6 Juni 2023 dengan anggota tim yaitu Harry Febri, SE Haris Kurniawan, Se. M.Si, Salmi Udri dan Muslim
4. Adapun Biaya perjalanan dinas ini dibebankan pada Sub Kegiatan masing-masing Bidang yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD Bappeda Tahun 2023.

Demikian disampaikan kepada Bapak atas persetujuannya, diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



**BIDANG EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
Tanggal : 05 Juni 2023
Nomor : 050/1/ND/Eko-SDA/Bappeda/6/2023
Lampiran : 2 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka
Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring
Evaluasi Pelaksanaan Latsitardanus Xliiii/2023 Sumatera Barat Ke Kabupaten Pesisir
Selatan

Sehubungan dengan surat gubernur Sumatera Barat Nomor : 325/441//Kesbangpol perihal Monitoring dan Pemantauan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat, dengan ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Kegiatan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei s/d 8 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Taruna/Taruni dari AKMIL, AAU, AAL, IPDN, BSSN, Mahasiswa/mahasiswi UNP dan Baiturrahmah
2. Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten / Kota terpilih yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kota Padang yang terdiri dari 2 kategori kegiatan yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non fisik
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon persetujuan Bapak untuk dapat menugaskan tim melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Latsitardanus XLIII/2023 Sumatera Barat ke Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 7 Juni 2023 dengan anggota tim yaitu Budi Arman, ST Afrizon S.Sos, Yuliarti, dan Medri Yulianda
4. Adapun Biaya perjalanan dinas ini dibebankan pada Sub Kegiatan masing-masing Bidang yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD Bappeda Tahun 2023.

Demikian disampaikan kepada Bapak atas persetujuannya, diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
P A D A N G

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN LATSITARDANUS XII/2023 DI SUMATERA BARAT

A. Pendahuluan

1. Provinsi Sumatera Barat terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLIII tahun 2023. Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei s/d 7 Juni 2023 di lima kabupaten/kota di Sumbar, yakni kota Padang, kota Solok, kota Pariaman, kabupaten Pesisir Selatan dan kabupaten Pasaman.

B. Hasil

1. Kota Pariaman

Tim monev Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Bappeda Kota Pariaman, berdiskusi dan mendapatkan informasi bahwa untuk Kota Pariaman yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Latsitardanus 2023 adalah Satpol PP Kota Pariaman, kemudian juga mengadakan pertemuan dengan Asisten II Kota Pariaman dan Wakil Komandan Pelaksanaan Kegiatan di Kota Pariaman.



Di Kota Pariaman ditempatkan sebanyak 270 orang taruna, dari 270 taruna tersebut terdiri dari 230 peserta dan 40 orang pelatih yang disebar di empat kecamatan di Kota Pariaman. Untuk Kecamatan Pariaman Selatan ada empat desa yakni Desa Pasia Sunua, Taluk, Marunggi dan Palak Aneh. Kecamatan Pariaman Tengah ada tiga desa dan satu kelurahan yakni Desa Pauh timur, Pauh Barat, Cimparuh dan Kelurahan Alai Galombang. Kecamatan Pariaman Timur ada lima desa yakni Desa Bungo Tanjung,

Kampung Tengah, Kaluat, Air Santok dan Sungai Pasak. Dan Kecamatan Pariaman Utara ada dua desa yakni Desa Balai Naras dan Naras I.

a. Pelaksanaan fisik kegiatan Latsitardanus di Kota Pariaman, yaitu :

- Renovasi Rumah Tidak layak Huni
- Pembersihan pantai
- Pembersihan taman makam pahlawan
- Penanaman mangrove
- Pembukaan jalan

b. Pelaksanaan non fisik

- Riset sosial
- Penyuluhan bahaya narkoba
- Promosi ADK TNI, AKPOL, IPDN
- Olagraha bersama masyarakat

c. Renovasi rumah tidak huni warga miskin dilaksanakan masing-masing 1 rumah pada setiap kecamatan, berarti ada 4 rumah tidak layak huni yang direnovasi di Kota Pariaman, Kelompok sasaran kegiatan ini adalah warga miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni, sedangkan keluaran dari kegiatan ini adalah diharapkan warga miskin tersebut dapat tinggal dirumah yang layak. Dari segi nilai, biaya renovasi untuk 1 RTLH adalah Rp. 20.000.000,- jadi untuk 4 RTLH berjumlah Rp. 80.000.000,-

d. Selanjutnya kegiatan yang dilaksana adalah pembukaan jalan di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara sepanjang 2 km yang dilaksanakan oleh Taruna, masyarakat setempat dan dukungan dari Pemerintah Kota Pariaman, pembukaan jalan tersebut sangat diharapkan sekali oleh masyarakat setempat karena dapat membuka akses dari desa tersebut Keluaran dari kegiatan ini adalah terbukanya akses jalan ke Desa cubadak air sehingga sangat berdampak terutama sektor perekonomian. Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara.

selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan adalah pembersihan tanam makam pahlawan dan gotong royong di kawasan wisata.



- d. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Latsitardanus XII/2023 Sumatera Barat di Kota Pariaman ini sangat bermanfaat dan berdampak positif sekali dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk penginapan peserta, rumah penduduk yang dipakai untuk penginapan peserta diberi bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- setiap rumah, juga dampak dari usaha UMKM setempat seperti, kuliner, warung dan pariwisata. Diharapkan kepada Taruna yang datang ke kota Pariaman mendapat kesan yang positif sehingga dapat menginformasikan sekaligus mempromosikan mengenai potensi Kota Pariaman ini setelah kembali ke tempat masing-masing
- e. Kegiatan lain yang dilakanakan adalah :
1. Goro Pembersihan Aliran Sungai Durian Gadang
 2. Pembinaan Keamanan Desa (Hansip)
 3. Goro Dalam Rangka Pilih Sampah
 4. Goro Desa Wisata Pantai Mangrove
 5. Goro Di Kawasan Hutan Lindung Kota
 6. Goro Di Seputaran Wisata
 7. Goro Aliran Sungai Banda Sikijang
 8. Goro Pembersihan Lanjutan Jalan Baru di Pesisir Pantai
 9. Penyuluhan, Pembinaan dan Edukasi Stunting
 10. Goro Saluran Air
 11. Goro Pembersihan Lahan KWT
 12. Goro Pembersihan Mushala

2. Kabupaten Pasaman

Lokasi pelaksanaan kegiatan latsitardanus tahun 2023 di Kabupaten Pasaman adalah di kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Bonjol dan Kecamatan Tigo Nagari. :Bentuk kegiatannya adalah :

a. Bedah rumah :

- Perencanaan: Tahap perencanaan meliputi penentuan tujuan renovasi, anggaran, serta desain atau tata letak yang diinginkan. Anda dapat bekerja sama dengan arsitek atau desainer interior untuk membantu merencanakan renovasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.
- Pembongkaran: Jika ada bagian rumah yang perlu dihilangkan, seperti dinding, lantai, atau langit-langit, tahap pembongkaran diperlukan. Ini dilakukan untuk membuka ruang baru atau mengganti material yang rusak atau usang.
- Perbaikan struktural: Jika rumah memiliki kerusakan struktural, seperti kerusakan pondasi, kerangka bangunan yang lemah, atau atap yang bocor, maka perbaikan struktural akan dilakukan. Ini melibatkan memperbaiki atau mengganti elemen struktural yang rusak untuk memastikan kekuatan dan stabilitas bangunan.
- Pekerjaan interior: Ini mencakup pembaruan atau perbaikan pada interior rumah seperti pengecatan dinding, penggantian lantai, penggantian pintu dan jendela, perbaikan atau penggantian sistem plumbing atau listrik, dan peningkatan sistem pendingin udara atau pemanas.
- Pekerjaan eksterior: Renovasi rumah juga dapat melibatkan pekerjaan pada eksterior, seperti pengecatan eksterior, penggantian atau perbaikan atap, peningkatan taman atau halaman, dan pembaruan sistem drainase.
- Pekerjaan penyelesaian: Setelah pekerjaan utama selesai, tahap penyelesaian akan dilakukan. Ini melibatkan pemasangan peralatan dapur, pemasangan perlengkapan kamar mandi, penyelesaian trim dan molding, serta pekerjaan detail lainnya untuk menyelesaikan tampilan dan nuansa renovasi.

- Pembersihan dan pemulihan: Setelah renovasi selesai, proses pembersihan dan pemulihan dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa konstruksi dan memastikan rumah siap untuk ditempati kembali

Keluaran kegiatan :

Rumah diperbaharui dengan mencakup perubahan dalam desain, tampilan, dan fungsionalitas rumah. Misalnya, perbaikan struktural telah diselesaikan, interior dan eksterior telah diperbarui, dan perubahan-perubahan lain yang diinginkan telah diimplementasikan.

Jumlah Personil Taruna yang terlibat : 1 (satu) Kompi A Yontarlat 3 Elang

Kelompok Sasaran : Pemilik Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Lubuk Sikaping sebanyak 13 unit berdasarkan data dari BAZNAS Kabupaten Pasaman



b. Gotong Royong Pembersihan Sampah, Tanaman Liar dan Pengecatan

1. Kec. Lubuk Sikaping :

- Batang Mauh sepanjang 1 Km
- Batang Panapa sepanjang 500 m

2. Kec. Bonjol

- Museum Imam Bonjol 1 Ha
- Aliran sungai Jorong Tanjung Bungo Nagari Ganggo Hilia 2 Km

Ruang Lingkup Kegiatan :

1. Pembersihan sampah: Salah satu tindakan utama dalam pembersihan sungai adalah menghilangkan sampah dan limbah yang terbuang di sungai. Ini melibatkan pengumpulan dan pembuangan yang tepat dari sampah seperti plastik, kertas, botol, dan benda-benda lain yang mencemari sungai. Pembersihan dapat dilakukan dengan tangan atau dengan menggunakan peralatan seperti jaring, tongkat panjang, atau kapal penyapu.
2. Pemangkasan tanaman liar: Tanaman liar yang tumbuh berlebihan di sekitar sungai dapat mengganggu aliran air, mempersempit saluran, dan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Pemangkasan tanaman liar termasuk menghapus tanaman invasif atau tanaman yang pertumbuhannya tidak terkendali agar tidak merusak ekosistem sungai. Hal ini dapat melibatkan penggunaan alat pemangkas, gergaji, atau alat pemotong lainnya.
3. Kampanye kesadaran lingkungan: Selain tindakan langsung, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembersihan sungai dan tanaman liar. Kampanye kesadaran lingkungan dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, membuang sampah dengan benar, dan menjaga kelestarian ekosistem sungai. Ini bisa melalui penyuluhan, pelatihan, atau kegiatan partisipatif lainnya.

Pembersihan dilingkungan Museum Tuanku Imam Bonjol :

1. Pembersihan lingkungan: Kebersihan dan perawatan lingkungan sekitar museum juga penting. Ini mencakup pembersihan taman, penanganan sampah, pengendalian hama, dan pemeliharaan area hijau di sekitar museum.
2. Kebersihan dan kenyamanan pengunjung: Menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung juga penting dalam pembersihan museum. Ini meliputi pembersihan toilet, penyediaan tempat sampah yang cukup, dan perawatan area parkir atau akses bagi pengunjung.

Keluaran Kegiatan :

1. Pengurangan sampah dan limbah: Salah satu keluaran utama dari pembersihan sungai adalah pengurangan sampah dan limbah yang mencemari sungai. Dengan menghilangkan sampah seperti plastik, botol, kertas, dan limbah lainnya, sungai akan menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas air dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi organisme hidup di dalam sungai.
2. Peningkatan aliran air: Pembersihan sungai juga dapat menghasilkan peningkatan aliran air yang lancar. Dengan menghapus hambatan seperti tanaman liar, cabang pohon yang roboh, atau akumulasi sedimen, aliran air akan menjadi lebih lancar dan lebih teratur. Hal ini dapat mencegah banjir, mengurangi erosi sungai, dan memperbaiki kondisi hidrologis di sekitar sungai.
3. Peningkatan keanekaragaman hayati: Dengan membersihkan sungai, habitat alami organisme air dapat pulih dan berkembang. Hal ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayati sungai dengan memungkinkan ikan, serangga air, amfibi, dan organisme lainnya untuk hidup dan berkembang biak dengan baik. Keberadaan spesies yang beragam di dalam sungai merupakan indikator keadaan lingkungan yang baik.
4. Pemulihan ekosistem sungai: Pembersihan sungai dapat membantu dalam pemulihan ekosistem sungai yang terdegradasi. Dengan menghilangkan faktor-faktor yang mengganggu, seperti sampah, bahan kimia berbahaya, atau tanaman invasif, ekosistem sungai dapat pulih secara alami. Ini dapat mengembalikan keseimbangan ekologi, meningkatkan kualitas air, dan mendukung kehidupan organisme yang bergantung pada ekosistem sungai.
5. Peningkatan kesadaran lingkungan: Kegiatan pembersihan sungai dapat membangkitkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sekitarnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembersihan, keluaran yang dihasilkan adalah peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan bagaimana dampak positif dari kegiatan pembersihan sungai terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pembersihan Lingkungan Museum Tuanku Imam Bonjol :

1. Kebersihan lingkungan: Salah satu keluaran utama dari kegiatan pembersihan lingkungan museum adalah menciptakan lingkungan sekitar yang bersih dan terjaga dengan baik. Ini melibatkan penghapusan sampah, dedaunan yang jatuh, dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kebersihan area sekitar museum.
2. Peningkatan estetika: Dengan membersihkan lingkungan museum, keluaran yang dihasilkan adalah peningkatan estetika secara keseluruhan. Area sekitar museum yang bersih, rapi, dan menarik secara visual akan memberikan kesan yang baik kepada pengunjung dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk dinikmati.

3. Keamanan dan kenyamanan pengunjung: Pembersihan lingkungan juga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung museum. Dengan menghilangkan potensi bahaya seperti cabang pohon yang roboh, batu tajam, atau hambatan lainnya, area sekitar museum menjadi lebih aman untuk dikunjungi. Selain itu, kebersihan lingkungan juga memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengunjung saat menjelajahi area museum.
4. Kelestarian alam: Kegiatan pembersihan lingkungan museum juga dapat mendukung kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya. Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk pohon, tanaman, dan habitat alami di sekitar museum, keluaran yang dihasilkan adalah penghormatan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem alami yang ada.
5. Kesadaran lingkungan: Melalui kegiatan pembersihan lingkungan, keluaran penting lainnya adalah peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan pengunjung museum. Museum dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menyediakan informasi dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan melibatkan pengunjung dalam kegiatan pembersihan, mereka dapat lebih memahami dan menghargai nilai penting dari pelestarian lingkungan.
6. Hubungan yang lebih baik dengan masyarakat: Pembersihan lingkungan museum juga dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembersihan dan menjaga kebersihan lingkungan museum dapat menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat setempat. Ini dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap museum dan membangun hubungan yang lebih baik antara museum dan komunitas sekitarnya.

Jumlah Personil Taruna yang terlibat : Kompi B dengan target sasaran di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kompi C dan D dengan target sasaran di Kecamatan Bonjol
Kelompok Sasaran : Sesuai dengan target sasaran di masing-masing kecamatan

c. Penanaman Pohon di lokasi Benteng Perjuangan Tuanku Imam Bonjol

Ruang Lingkup Kegiatan :

1. Persiapan lahan: Sebelum penanaman dilakukan, persiapan lahan yang baik perlu dilakukan. Ini meliputi membersihkan area dari vegetasi liar, penggalian lubang tanam yang cukup besar dan dalam, dan memperbaiki kualitas tanah jika diperlukan dengan pupuk atau bahan organik.
2. Penanaman pohon: Setelah persiapan lahan, tahap penanaman pohon dapat dilakukan. Ini melibatkan menempatkan pohon dengan hati-hati di lubang tanam dan menutupinya dengan tanah secara tepat. Pastikan pohon ditanam dengan benar dan tidak terlalu dalam atau terlalu dangkal.
3. Perawatan dan pemeliharaan: Setelah penanaman, penting untuk memberikan perawatan dan pemeliharaan yang tepat kepada pohon yang baru ditanam. Ini termasuk penyiraman yang cukup, pemangkasan jika diperlukan, dan pemberian nutrisi tambahan seperti pupuk untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan kuat.

Keluaran Kegiatan :

1. Penyediaan penutup tanah: Pohon yang ditanam akan memberikan penutup tanah yang efektif, sehingga dapat mengurangi erosi tanah dan pemerosotan lereng di sekitar Benteng Tuanku Imam Bonjol. Akar pohon akan menahan dan menjaga tanah agar tetap stabil, mengurangi risiko erosi dan pergeseran tanah.

2. Penyediaan habitat bagi satwa liar: Pohon yang ditanam di kawasan tersebut akan menciptakan habitat yang lebih baik bagi berbagai spesies satwa liar. Pohon-pohon ini dapat menjadi tempat berlindung, tempat bersarang, dan sumber makanan bagi berbagai jenis hewan seperti burung, serangga, mamalia kecil, dan reptil. Hal ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayati di sekitar Benteng Tuanku Imam Bonjol.
3. Pengurangan suhu dan perlindungan dari sinar matahari: Daerah yang ditanami pohon akan mendapatkan manfaat dari pengurangan suhu. Pohon memberikan perlindungan dari sinar matahari langsung dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sejuk. Ini dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan pengguna kawasan tersebut.
4. Penyerapan karbon dan perbaikan kualitas udara: Pohon-pohon yang ditanam akan menyerap karbon dioksida (CO₂) dalam proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen (O₂). Dengan demikian, penanaman pohon dapat membantu dalam mengurangi konsentrasi CO₂ di udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar Benteng Tuanku Imam Bonjol.
5. Peningkatan keindahan dan estetika: Penanaman pohon di kawasan Benteng Tuanku Imam Bonjol akan meningkatkan keindahan dan estetika secara keseluruhan. Pohon-pohon yang tumbuh subur memberikan pemandangan yang menarik dan meningkatkan nilai visual dari kawasan tersebut. Hal ini dapat menarik pengunjung dan memberikan pengalaman yang lebih positif.
6. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat: Penanaman pohon di kawasan Benteng Tuanku Imam Bonjol juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan penanaman pohon, yang dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, menciptakan rasa kepemilikan, dan memperkuat hubungan antara museum dan komunitas setempat.

Jumlah Personil Taruna yang terlibat : kompi C dan D dengan target sasaran di Kecamatan Bonjol

d. Sosialisasi ke Sekolah- Sekolah se Kabupaten Pasaman

Ruang Lingkup Kegiatan :

1. Informasi tentang sekolah kedinasan: Taruna dari masing-masing sekolah kedinasan dapat memberikan informasi tentang program pendidikan, kurikulum, persyaratan pendaftaran, proses seleksi, dan manfaat bergabung dengan sekolah kedinasan tersebut kepada siswa-siswa sekolah yang menjadi target sosialisasi.
2. Pengenalan karier kedinasan: Sosialisasi juga dapat melibatkan pengenalan karier dan pekerjaan yang dapat diikuti setelah lulus dari sekolah kedinasan. Taruna dapat membagikan informasi mengenai berbagai jalur karier kedinasan yang tersedia di masing-masing institusi, seperti menjadi perwira militer, polisi, atau pegawai pemerintah.
3. Demonstrasi dan presentasi: Taruna dapat melakukan demonstrasi atau presentasi mengenai aspek-aspek tertentu dari kehidupan di sekolah kedinasan masing-masing. Hal ini bisa termasuk demonstrasi teknik militer, taktik dan strategi, operasi udara, operasi laut, penanganan kepolisian, tugas-tugas administratif di pemerintahan, dan lain-lain.
4. Diskusi interaktif: Sosialisasi dapat melibatkan diskusi interaktif dengan siswa-siswa sekolah. Taruna dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya, berbagi pandangan, atau berdiskusi mengenai kehidupan di sekolah

kedinasan, tantangan yang dihadapi, prospek karier, dan manfaat yang diperoleh dari pengalaman tersebut.

5. Pengembangan kepemimpinan: Taruna dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pengembangan kepemimpinan dan keterampilan sosial dalam institusi kedinasan. Mereka dapat menjelaskan bagaimana sekolah kedinasan melatih siswa dalam bidang kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, dan kerja tim.
6. Inspirasi dan motivasi: Selain memberikan informasi praktis, taruna juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa-siswa. Mereka dapat berbagi pengalaman pribadi mereka dalam menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan di sekolah kedinasan, serta memberikan gambaran tentang peran dan kontribusi yang dapat dilakukan sebagai pemimpin dan pengabdian negara.
7. Ruang lingkup sosialisasi sekolah kedinasan oleh taruna Akmil, AAU, AAL, AKPOL, dan IPDN mencakup penyampaian informasi tentang sekolah, pengenalan karier kedinasan, demonstrasi, diskusi, pengembangan kepemimpinan, dan memberikan inspirasi kepada siswa-siswa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang sekolah kedinasan dan memotivasi siswa-siswa untuk mempertimbangkan karier kedinasan sebagai pilihan masa depan dalam berbagai institusi pemerintahan

Keluaran Kegiatan :

1. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan: Salah satu target utama sosialisasi adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa-siswa tentang sekolah kedinasan. Diharapkan mereka akan memahami persyaratan pendaftaran, proses seleksi, kurikulum, dan manfaat bergabung dengan sekolah kedinasan. Mereka juga diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karier dan tugas-tugas yang terkait dengan institusi kedinasan.
2. Motivasi dan inspirasi: Sosialisasi ini bertujuan untuk memotivasi siswa-siswa untuk mempertimbangkan karier kedinasan sebagai pilihan masa depan. Diharapkan mereka akan terinspirasi oleh cerita dan pengalaman taruna yang berhasil dan termotivasi untuk mengejar pendidikan di sekolah kedinasan. Sosialisasi juga dapat memperkuat rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap institusi kedinasan.
3. Peningkatan minat dan partisipasi: Salah satu keluaran yang diharapkan adalah meningkatnya minat siswa-siswa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan. Diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan jumlah pendaftar dan partisipasi siswa-siswa dalam proses seleksi. Dengan demikian, keluaran yang diharapkan adalah adanya peningkatan partisipasi siswa-siswa dalam mengikuti ujian seleksi masuk sekolah kedinasan.
4. Persiapan yang lebih baik: Sosialisasi dapat membantu siswa-siswa dalam mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi proses seleksi masuk sekolah kedinasan. Diharapkan mereka akan memperoleh informasi yang berguna, saran, dan panduan praktis tentang tahapan seleksi, tes yang akan dihadapi, dan persiapan yang perlu dilakukan agar dapat bersaing secara kompetitif.
5. Peningkatan pemahaman tentang tanggung jawab dan kewajiban: Sosialisasi dapat membantu siswa-siswa memahami tanggung jawab dan kewajiban yang akan mereka hadapi jika memilih karier kedinasan. Diharapkan mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang disiplin, nilai-nilai yang dijunjung dalam institusi kedinasan, dan peran mereka sebagai anggota masyarakat dan pelayan publik di masa depan.

6. Pembangunan hubungan dan kemitraan: Sosialisasi ini juga dapat memperkuat hubungan antara institusi kedinasan dan sekolah-sekolah yang dikunjungi. Diharapkan adanya kolaborasi yang lebih baik antara institusi kedinasan dan sekolah dalam hal penyediaan informasi, bimbingan, dan pendampingan bagi siswa-siswa yang berminat melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan.
7. Dalam keseluruhan, keluaran yang diharapkan dari sosialisasi sekolah kedinasan oleh taruna Akmil, AAU, AAL, AKPOL, dan IPDN adalah meningkatnya kesadaran, minat, dan persiapan siswa-siswa terkait dengan pendidikan dan karier di institusi kedinasan.

Jumlah Personil Taruna yang terlibat : Kompi A, B, C dan D

Kelompok Sasaran : Seluruh SLTA/MA dan SMK se Kabupaten Pasaman

e. Pembangunan Tugu Latsitardanus XLIII

Ruang Lingkup Kegiatan :

1. Perencanaan dan persiapan: Tahap awal dalam ruang lingkup kegiatan ini adalah perencanaan dan persiapan. Hal ini melibatkan identifikasi lokasi yang tepat untuk pembangunan tugu, pembuatan desain tugu, perizinan dan persetujuan yang diperlukan, serta koordinasi dengan pihak terkait seperti pemilik lahan, pemerintah daerah, dan tim konstruksi.
2. Desain tugu: Pembangunan tugu Latsitardanus memerlukan desain yang sesuai dengan tema dan makna yang ingin disampaikan. Desain ini melibatkan pemilihan bentuk, bahan, ukuran, dan elemen visual lainnya yang mencerminkan nilai-nilai dan simbolisme yang diinginkan.
3. Konstruksi dan pembangunan: Setelah desain tugu disetujui, tahap selanjutnya adalah konstruksi dan pembangunan fisik tugu. Ini melibatkan pekerjaan konstruksi seperti penggalian, pengecoran pondasi, pembangunan struktur tugu, instalasi elemen dekoratif, dan penyelesaian fisik lainnya. Proses ini harus dilakukan dengan mematuhi standar keamanan, kualitas, dan tata cara konstruksi yang berlaku.
4. Pengadaan bahan dan peralatan: Kegiatan pembangunan tugu juga melibatkan pengadaan bahan dan peralatan yang diperlukan. Ini dapat mencakup pengadaan bahan bangunan seperti batu, beton, logam, atau bahan lain yang digunakan dalam konstruksi tugu. Selain itu, peralatan dan mesin yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi juga perlu dipersiapkan dan disediakan.
5. Pengawasan dan pengendalian proyek: Selama pembangunan tugu, penting untuk memiliki pengawasan dan pengendalian yang baik terhadap proyek. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap kemajuan pekerjaan, penyelesaian dalam batas waktu yang ditentukan, penanganan masalah yang muncul, serta penilaian kualitas pekerjaan yang dilakukan.
6. Penyelesaian dan perawatan: Setelah tugu selesai dibangun, ruang lingkup kegiatan juga mencakup penyelesaian dan perawatan tugu. Ini termasuk pengecatan, pemasangan papan penghormatan atau plakat, perawatan taman atau pekarangan sekitar tugu, serta pengaturan pencahayaan dan aksesibilitas yang memadai.
7. Upacara peresmian: Salah satu keluaran penting dari kegiatan pembangunan tugu Latsitardanus adalah upacara peresmian tugu. Ini melibatkan seremoni resmi yang dihadiri oleh para pejabat, tokoh masyarakat, dan peserta lainnya. Upacara ini bertujuan untuk memberikan penghormatan dan memperingati makna dan nilai-nilai yang diwakili oleh tugu tersebut.

Keluaran Kegiatan :

1. Tugu Latsitardanus XLIII yang kokoh dan berkualitas: Hasil utama dari pembangunan adalah tersedianya Tugu Latsitardanus XLIII yang memiliki struktur yang kuat dan berkualitas tinggi. Tugu tersebut dirancang dan dibangun dengan menggunakan bahan yang tahan lama dan sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku.
2. Tampilan visual yang estetis: Tugu Latsitardanus XLIII diharapkan memiliki tampilan visual yang estetis dan menarik. Hal ini mencakup desain yang baik, perpaduan warna yang harmonis, elemen dekoratif yang indah, dan penempatan yang strategis di area yang sesuai. Tugu tersebut dapat menjadi landmark yang mencolok dan memperindah lingkungan sekitarnya.
3. Simbolisme dan makna yang diwakili: Tugu Latsitardanus XLIII diharapkan mampu menyampaikan simbolisme dan makna yang sesuai dengan tujuan pembangunannya. Melalui desain dan elemen-elemen yang ada, tugu tersebut dapat mewakili semangat, prestasi, dan nilai-nilai yang dihargai oleh Latsitardanus XLIII. Hal ini dapat menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi mereka yang melihatnya.
4. Penghargaan dan apresiasi: Pembangunan Tugu Latsitardanus XLIII diharapkan dapat memunculkan penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak. Hal ini meliputi apresiasi dari masyarakat umum, pejabat pemerintah, anggota Latsitardanus, dan pihak terkait lainnya. Tugu tersebut dapat menjadi simbol penghormatan terhadap prestasi dan kontribusi dari Latsitardanus XLIII.
5. Peningkatan kepedulian dan kesadaran: Tugu Latsitardanus XLIII juga dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap sejarah, nilai-nilai nasionalisme, dan prestasi Latsitardanus. Melalui keberadaannya, tugu tersebut dapat menginspirasi generasi muda dan masyarakat umum untuk lebih mengenal dan menghargai peran serta jasa Latsitardanus dalam pembangunan bangsa.
6. Destinasi wisata dan edukasi: Jika dirancang dengan baik, Tugu Latsitardanus XLIII juga dapat menjadi destinasi wisata dan edukasi. Pengunjung dapat datang untuk mempelajari sejarah dan makna di balik tugu tersebut, serta menikmati keindahan visual dan suasana di sekitarnya. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan pendidikan bagi wilayah sekitar.

Jumlah Personil Taruna yang terlibat : Perwakilan Kompi A 5 orang dan Perwakilan Kompi B 5 Orang

Kelompok Sasaran : Generasi Muda Kabupaten Pasaman



2. Kabupaten Pesisir Selatan

- a. Kegiatan Latsitardanus XLIII/ 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan diikuti oleh Taruna/Taruni dari AKMIL, AAU, AAL, IPDN, BSSN, Mahasiswa/Mahasiswi UNP dan Baiturahmah.
- b. Latsitardanus XLIII/ 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 2 kategori kegiatan yaitu : Kegiatan Fisik dan Kegiatan Non Fisik. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Non Fisik.
- c. Kegiatan Non Fisik pada pelaksanaan Latsitardanus XLIII/ 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : 1)Penyuluhan tentang cara pembuatan pupuk organik Lokasi : Nagari Sungai Nyalo. Ruang Lingkup Kegiatan berada di Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang. Keluaran Kegiatan bertambahnya pengetahuan petani tentang pembuatan pupuk organik. Personil Taruna yang terlibat dalam penyuluhan ini sebanyak 10 orang dengan kelompok petani sasarannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023.



- d. Kegiatan Non Fisik pada pelaksanaan Latsitardanus XLIII/ 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : 2) Kegiatan Wisata dan Sejarah Lokasi : Pantai Tan Sridano, Labuang Baruak, Nagari Kambang Timur, Konservasi Penyu (Ampiang Parak), Event Desa Wisata di nagari Ampiang Parak. RumahCetakUang (OeangOri) di Koto Pulai Nagari Kambang Timur.

Wisata Sejarah/ Budaya Tugu Pitih Lengayang ruang lingkung kegiatannya berada di Koto Pulai, Nagari Kambang Timur. Bertujuan mengenal peninggalan sejarah yang ada di Lokus pelaksanaan Latsitardanus. Kegiatan ini melibatkan 5 orang personil Taruna. Kelompok sasarannya meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi situs ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan.



- e. Latsitardanus (Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara) di wilayah Kodim 0311/Pessel melakukan pembangunan tugu di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan .Tugu mulai dibangun di tepi jalan raya Padang Bengkulu tepatnya di Kecamatan Batang Kapas dan kegiatan dilakukan oleh anggota Latsitardanus XLIII tahun 2023 didampingi langsung oleh Babinsa 05/Batang Kapas Serda Nasva dan masyarakat, Sabtu 3 Juni 2023. Pelaksanaan pembangunan tugu oleh anggota Latsitardanus dibantu warga sekitar. “pembangunan tugu dilakukan sebagai penanda bahwa wilayah tersebut pernah dilakukan kegiatan oleh anggota Taruna Akmil, Akpol dan STPDN serta mahasiswa.Tugu dibangun dengan tujuan agar warga selalu mengingat pelaksanaan kegiatan Latsitardanus XLIII Tahun 2023 di wilayah Kodim 0311/Pessel dan pembangunan tersebut sebagai bentuk kedekatan anggota Taruna Akmil, Akpol dan STPDN serta mahasiswa yang dekat dengan masyarakat sekitar. Tugu yang saat ini dibangun sudah mencapai 90% pembangunan dan dibangun sebagai tanda dan bukti telah dilakukan kegiatan serta menambahkan berupa lambang lambang dari suatu satuan sebagai pihak pembangun dan yang dibangun. Anggota Latsitardanus XLIII tahun 2023 mengerjakan pembangunan tugu sudah masuk tahap pengumpulan bahan dan tempat dibangun nya tugu dengan cara bergotong royong bersama masyarakat rangka, dan pembuatan tunggu ini harus dimulai dari sekarang agar bisa meminimalisir sesuai waktunya. Babinsa Koramil 05/Batang Kapas yang mendampingi dan pembangunan serta membantu pembangunan awal dan anggota masyarakat sekitar yang antusias dalam mempersiapkan apa yang di butuhkan.





3. Kota Solok

- a. Pertemuan Tim Monev dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Solok yang dihadiri oleh Tim Provinsi yakni : Tim Monev Bappeda Provinsi, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan sebagai Ketua Pelaksanaan Laksitardanus Kota Solok dan Camat Lubuk Sikarah .
- b. Latsitarda Nusantara XLIII diikuti oleh 309 peserta dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udaya (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Kepolisian (Akpol) dan IPDN untuk wilayah Kota Solok. Peserta latsitarda terdiri dari 3 kompi dengan nama LATSITADARDA NUSANTARA XLIII TAHUN 2023 YONTARLAT 4 KIJANG KOMPI A, B dan C. Pelaksanaan Latsitardanus XLIII di Kota Solok berlangsung selama 22 hari dari tanggal 15 Mei sd. 8 Juni 2023.
- c. Pemerintah Kota Solok menyiapkan orang tua asuh bagi taruna dan mahasiswa peserta, Orang tua asuh akan menjadi pengganti orang tua para taruna selama menjalani program Latsitardanus di Kota Solok.
- d. Adapun materi kegiatan Latsitarda Nusantara dalam usulan sasaran Fisik diantaranya bakti dengan melakukan :
 1. pembangunan tugu latsitarda di simpang 6 laing
 2. perbaikan 6 (enam) unit rumah Tidak Layak huni
 3. Pengerasan jalan Bakti ABRI
 4. Pembersihan Saluran Irigasi
 5. Pengecatan Tebing/Dam Sungao BatangLembang
 6. Penanaman Pohon Pelindung dan buah buahan
 7. Penanaman Bunga Krisan di Agro wisata Payao
- e. Usulan sasaran Kegiatan Non fisik yakni :
 1. Festival Rendang
 2. Penyuluhan Kesehatan dan Narkoba ke Sekolah
 3. Pengenalan dan Kesenian Solok
 4. Pelaksanaan Tausiah/Tablik Akbar
 5. Pengenalan Almamater Akademi Kepolisian, Akademi TNI, IPDN dan Poltek Siber dan Sandi Neraga
 6. Kegiatan Olah Raga Bersama (Sepak Bola, Tenis Lapangan, Tenis, Meja Futsal Basket dan Paralayang)

- f. Kegiatan Non fisik yang dilakukan peserta Latsitardanus penanaman pohon pelindung pada tanggal 1 sd 2 Juni 2023, jumlah pohon pelindung yang ditanam sebanyak 250 batang dan 250 bibit tanaman buah dibagikan ke masyarakat, bibit pohon diperoleh dari bantuan BPDASHL Agama Kuantan Persemaian Permanen Solok, peserta yang terlibat selain Latsitardanus ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Pramuka Peduli, PKK se Kecamatan Tanjung Harapan dan masyarakat kurang lebih sebanyak 150 orang.
- g. Untuk kegiatan Non Fisik Festival Rendang diikuti oleh 260 orang kelompok sasaran yakni peserta Latsitardanus dan Bundo Kandung Kecamatan serta Kelurahan, tanggal pelaksanaan 3 Juni 2023 dilapangan Mardeka Kota Solok , Rendang dibuat sebanyak 50 Tungku, bahan bakar dari kayu api dan sebanyak 75 Kilo daging sapi. Daging yang dimasak tersebut dimakan bersama sama dengan istilah makan BAROJIN, makan baronjin adalah makan bersama adat minang Kota Solok yang merupakan salah satu rangkaian acara orang Solok seperti dalam acara Baralek Gadang atau pesta Budaya Masyarakat Kota Solok. Pendanaan dari swadaya masyarakat.
- h. Pembangunan Tugu Latihan Integrasi Taruna Nusantara (Latsitardanus) XLIII di Simpang Lima, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok pada saat Tim Monev melakukan kunjungan baru selesai diresmikan pada tanggal 6 Juni 2023, Peresmian Tugu Latsitarda di Simpang Lima Laing Kota Solok dihadiri oleh Walikota Solok, Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 25 Mei 2023 oleh Komandan Resimen Taruna Latsitardanus. Proses pembangunan tugu melibatkan peserta Latsitardanus dan juga berbagai unsur lainnya di Kota Solok, Setelah melalui pengerjaan selama kurang lebih 103 jam tugu tersebut berhasil diselesaikan pembangunannya pada tanggal 2 Juni 2023. Tugu ini sebagai tanda keberadaan ratusan calon perwira ketika berada dikota Solok, Tugu ini menjadi pengingat bahwa Latsitarda pernah bersosialisasi dengan masyarakat Kota Solok.
- i. Para peserta Latsitardanus melakukan pengabdian di Kota Solok bekerjasama dengan Badan Amal Zakat Nasional (BASNAS) Kota Solok dengan membedah rumah warga setempat. Baznas Kota Solok telah menyiapkan dua unit rumah dari masyarakat kurang mampu yang pengerjaannya langsung oleh peserta Latsitardanus XLIII dengan didampingi oleh Tukang yang ditunjuk. Lokasi pertama diKelurahan Simpang Rumbio (Kecamatan Lubuk Sikarah) dan lokasi kedua di Kelurahan Nan Balimo (Kecamatan Tanjung Harapan), dalam proses bedah rumah juga terlibat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , Bhabinkantibnas serta pihak kelurahan dalam proses Bedah Rumah.
- j. Peserta Latsitardanus juga melakukan pengecatan temok laydam Sungai Batang Lembang sisi sebelah Barat tepatnya yang berada wilayah di kelurahan VI Suku Kota Solok, pengecatan sungai tersebut melibatkan 37 orang personel Latsitardanus dengan tujuan memperindah dan menghias tampilan aliran sungai.

k. Para taruna Latsitardanus diperkenalkan berbagai macam budaya dan tradisi oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Solok, salah satunya dilakukan masyarakat Kelurahan IX Korong mengenalkan tradisi Malamang pada tanggal 6 Juni 2023, kegiatan berlangsung di Posko 3 Kelurahan IX Korong yang diikuti oleh Taruna dari Kompi B sebanyak 46 orang, terdiri dari 39 orang taruna yang mempunyai orang tua asuh di Kelurahan IX Korong dan 7 orang yg menginap di Kelurahan Sinapa Pilliang, pendanaan berasal dari swadaya masyarakat.

l. kesimpulan :

1. Program Latsitardanus di Kota Solok membawa dampak positif bagi daerah, selain meramaikan Kota Solok juga menjadi momen dalam mendorong percepatan pembangunan Fisik dan SDM
2. Dengan kedatangan para taruna dan mahasiswa dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Kota Solok dalam meraih cita cita, juga dapat mengerakkan kepedulian sosial dalam membangun daerah.
3. Kehadiran Latsitardanus membawa motivasi untuk pemuda dan pemudi di Kota Solok yang berminat menjadi Taruna.



Demikian laporan pelaksanaan monev Latsitardanus kami sampaikan, terima kasih

Yang membuat laporan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nizhamul Bastan'.

Nizhamul Bastan, SH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425 Padang 25112
<http://www.sumbar.go.id> e-mail: pdeisb@sumbar.go.id Padang

Padang, 28 Juli 2023

Kepada :

Nomor : 050/427/VII/Eko-SDA/Bappeda-2023
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Permintaan Data TP dan Dekonsentrasi
Kegiatan 2023

Yth. Bpk/Ibu (Daftar Terlampir)

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, kami mohon bantuan data dan informasi dari instansi Bapak/Ibu, sebagai berikut :

1. Kegiatan tahun 2023 yang didanai dengan dana APBN, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat maupun oleh UPT/Balai Kementerian yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
2. Informasi kegiatan memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, volume kegiatan, besaran dana, Kendala/permasalahan TA 2023 serta rencana Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2024 (format terlampir).
3. Data tersebut dikirimkan ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat tanggal 15 Agustus 2023 dan sofcopy dikirimkan melalui email: bappedaprov@sumbarprov.go.id atau kepada Sdr. Afrizon, S.Sos dengan kontak Hp/WA 08126703250.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. HANSASTRI, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

Tembusan. Kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang.

Lampiran 1 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 050/ 427 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2023

Tanggal : 28 Juli 2023

Perihal : Permintaan Data Kegiatan Tahun 2023 dan Rencana Program/
Kegiatan Anggaran Tahun 2024.

Daftar Penerima Surat :

1. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Sukarami Kabupaten Solok
2. Kepala BPSI Tanaman Buah dan Tropika di Aripan Kabupaten Solok
3. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Pakan Ternak di Padang Mengatas Kab. Lima Puluh Kota
4. Kepala Balai Veteriner di Bukittinggi
5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri (BARISTAN) di Padang
7. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Agam Kuantan di Padang
8. Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat di Sungai Penuh Jambi
9. Kepala Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Mentawai
10. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I di Padang
11. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) di Padang
12. Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Padang
13. Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir di Bungus Padang
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Padang.
15. Kepala Balai Diklat Industri Padang di Padang.

Lampiran :

UPT/Balai :

Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2023

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Kendala/Permasalahan	Keterangan
1							
2							
dst							

Catatan : untuk dapat disertai dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Rencana Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2024

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Dukungan yang diharapkan dari Pemda	Keterangan
1							
2							
dst							

Catatan : untuk dapat disertai dengan dokumentasi lokasi rencana pelaksanaan kegiatan

Kendala/Permasalahan :

1.
2.
3.
4. dst.

Dukungan yang diharapkan dari Pemda:

1.
2.
3.
4. dst nya

....., Agustus 2023
Kepala UPT/Balai/Satker

(Nama)
Nip.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/253/Bappeda/8-2023

- Dasar : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/427/VII/EkoSDA/Bappeda-2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal Permintaan Data TP dan Dekonsentrasi Kegiatan
2. Nota Dinas Kepala Bappeda perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tp-dekon 2023 pada Bidang Ekonomi dan Sda.
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Afrizon, S.Sos.
NIP : 19680409 200701 1 004
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : Linda Firani, A.Md.
NIP : 19790702 201001 2 006
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Amrizal
NIP : 19660612 200701 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
4. Nama : Dasrial
NIP : 19721226 200801 1 002
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
- Untuk : 1. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TP-Dekon 2023 pada Bidang Ekonomi dan SDA ke UPT Kementerian Kab. Agam pada tanggal 09 Agustus 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 07 Agustus 2023



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/252/Bappeda/8-2023

- Dasar : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/427/VII/EkoSDA/Bappeda-2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal Permintaan Data TP dan Dekonsentrasi Kegiatan 2023. 2. Nota Dinas Kepala Bappeda perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tp-dekon 2023 pada Bidang Ekonomi dan Sda.
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Rosalinda, SS.,M.M.
NIP : 19720316 200701 2 008
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : Afrizon, S.Sos.
NIP : 19680409 200701 1 004
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Ferra Sri Hastuti, SE.
NIP : 19770218 199703 2 002
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
4. Nama : Erik Agustian
Jabatan : Sopir
- Untuk : 1. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TP-Dekon 2023 pada Bidang Ekonomi dan SDA ke Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 08 Agustus 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 07 Agustus 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Medi Iswandi, ST, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/251/Bappeda/8-2023

- Dasar : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/427/VII/EkoSDA/Bappeda-2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal Permintaan Data TP dan Dekonsentrasi Kegiatan
2. Nota Dinas Kepala Bappeda perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tp-dekon 2023 pada Bidang Ekonomi dan Sda.
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Dela Resina, S.FARM.
NIP : 19870523 201502 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Perencana Ahli Pertama
2. Nama : Afrizon, S.Sos.
NIP : 19680409 200701 1 004
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Amrizal
NIP : 19660612 200701 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
4. Nama : Erik Agustian
Jabatan : Sopir
- Untuk : 1. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TP-Dekon 2023 pada Bidang Ekonomi dan SDA ke UPT Kementerian Kab. Solok dan Kota Solok pada tanggal 07 Agustus 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 07 Agustus 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Medi Iswandi, ST, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/254/SPT/DD/Ekosda/Bappeda/8-2023

- Dasar : 1. 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/427/VII/EkoSDA/Bappeda-2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal Permintaan Data TP dan Dekonsentrasi Kegiatan
2. Nota Kepala Bappeda perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tp-dekon 2023 pada Bidang Ekonomi dan Sda
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Dela Resina, S.FARM.
NIP : 19870523 201502 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Perencana Ahli Pertama
2. Nama : Defridawati
NIP : 19661205 199203 2 001
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Dasrial
NIP : 19721226 200801 1 002
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
4. Nama : Afrizon, S.Sos.
NIP : 19680409 200701 1 004
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
- Untuk : 1. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TP-Dekon 2023 pada Bidang Ekonomi dan SDA. ke UPT Kementerian Kab. Padang Pariaman dan Kota Padang pada tanggal 10 Agustus 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan kode rekening 5.01.03.1.02.07

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 07 Agustus 2023



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Bpk. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Kabid. Ekonomi dan SDA
Dari : Tim perjalanan dinas
Tanggal : 9 Agustus 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka monitoring evaluasi
Kegiatan yang dibiayai APBN di Balai/UPT Kementerian.

Isi :

I. Pendahuluan:

A. Dasar :

1. Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap Nota Dinas Kabid Ekonomi dan SDA Nomor 050/357VIII/DD/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Mohon Persetujuan melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring evaluasi dana kegiatan yang dibiayai APBN tahun 2023 ke Kab. Solok dan Kota Solok.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda No. 094.3/251VIII/SPT/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal Agustus 2023

B. Untuk Melakukan :

Perjalanan dinas dalam rangka monitoring evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang dibiayai APBN tahun 2023 pada Balai/UPT Kementerian di Sumatera Barat

C. Waktu Pelaksanaan dan Tempat :

Pada tanggal 7 Agustus 2023 ke Kabupaten Solok dan Kota Solok

D. Pegawai yang ditugaskan:

1. Afrizon, S.sos
2. Amrizal
3. Erik Agustian

*Mh. head Eko-SDA
PPT
569
Gaban evaluasi?
16/8-23*

II. Isi Laporan:

Untuk proses penyusunan perencanaan dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah;

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA terkait yang didanai APBN tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat, disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Tanaman Buah Hortikultura sebelumnya adalah Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Tropika, Balai Penerapan Standar Instrumen (BPSI) Pertanian Sumatera Barat sebelumnya bernama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Balitro Solok berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Kementerian Pertanian;

Deregulasi kebijakan bertujuan menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi atau kebijakan yang sifatnya menghambat. Kementerian/lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

*Yth. Bpk. Kabid
mohon arahnya*

16/8-23

3. Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
4. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Tanaman Buah Tropika, BPSI Pertanian Sumatera Barat dan Balitro Laing menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - ✓ Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
 - ✓ Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; Pelaksanaan penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman buah tropika;
 - ✓ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman buah tropika;
 - ✓ Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
 - ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Program/Kegiatan Balai BPSI Tanaman Buah Tropika Tahun Anggaran 2023:

No	Kegiatan	Volume	Output/keluaran	Lokasi	Anggaran (Rp)
1	Konsep Rancangan Standar Instrumen Hortikultura	1 standar	1 KonsepRSNI terkait produksi benih durian secara sambung dini	sumbar	100.000.000
2	Rancangan Standar Instrumen Hortikultura (PNPS)	1 Standar	1 Draf usulan PNPS pengelolaan alat buah secara luas		100.000.000
3	Hasil standardisasi instrumen hortikultura yang disebarluaskan	50 Orang	1 laporan tentang sosialisidan penerapanpengelolaan alat buah skala luas di IP2TP Cukur gondang		87.500.000
4	Sarana laboratorium standardisasi hortikultura	1 Unit	1 Unit sarana Laboratorium		397.500.000
5	Produk instrumen tanaman hortikultura terstandar	31.000 Unit	17.500 produksibenih sumber tanaman buah tropika dan 13.500 benih mangga besertifikat		1.152.250.000
6	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor		3.500.659.000
7	Layanan BMN	1 Layanan	Pengelolaan laboratorium dan kebun percobaan		225.000.000
8	Layanan Umum	1 Layanan	1 layanan tentang koordinasidan sinkronisasi, layanan pengelolaan akreditasi sertifikasi, kerjasamadan pengelolaan layanan publik		682.811.000
9	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Pembayaran gaji dan tunjangan serta		12.002.902.000

			pemeliharaan kantor		
10	Layanan Manajemen SDM	1 Orang	Layanan kepegawain dan kemampuan SDM		80.000.000
11	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	1 layanan penyusunan program dan anggaran BPSI tanaman buah tropika		105.000.000
12	Layanan pemantauan dan evaluasi	1 Layanan	1 Layanan Monev dan SPI BPSI tanaman buah tropika		30.000.000
13	Layanan manajemen keuangan	1 Layanan	1 layanan manajemen keuangan		50.000.000
Total Anggaran Tahun 2023					18.513.662.000

Rencana Program/Kegiatan BPSI Tanaman Buah Tropika TA. 2024:

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokasi	Anggaran	Dukungan yang Diharapkan	Keterangan
1	Konsep Rancangan Standar Instrumen Hortikultura	2 standar	2 (standar terkait bibit benih durian secara sambung dini dan RSNi pengelolaan alat buah skala luas pada kebun mangga)	sumbar	150.000.000	Dukungan pengembangan kawasan buah tropika yang menerapkan standar	
2	Hasil standardisasi instrumen hortikultura yang disebarluaskan	25 Orang	1 laporan tentang sosialisasi dan penerapan pengelolaan alat buah skala luas di IP2TP Cukur gondang		50.000.000	Sinergi sosialisasi penerapan standar di bidang pertanian	
3	Instrumen Hortikultura yang di uji	1 Produk	1 produk laboratorium		50.000.000	-	
4	Produk Instrumen Hortikultura Terstandar	247.500 Unit	Benih sumber 20.000 dan benih sebar sebanyak 227.500 batang		7.781.500.000	-	
5	Layanan BMN	1 Layanan	Pengelolaan laboratorium dan kebun percobaan		100.000.000	-	
6	Layanan Umum	1 Layanan	1 layanan tentang koordinasi dan sinkronisasi, layanan pengelolaan akreditasi sertifikasi, kerjasama dan pengelolaan layanan publik		491.107.000	-	
7	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor		15.158.421.000	-	
8	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	1 layanan penyusunan program dan anggaran BPSI tanaman buah tropika		46.000.000	-	
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	1 Layanan Monev dan SPI BPSI		15.000.000	-	

	dan Evaluasi		tropika				
10	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	1 layanan manajemen keuangan		22.000.0000	-	

Program/Kegiatan Balai BPSI Pertanian Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023:

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan di Sumatera Barat	1 Standar	1 Dokumen/Naskah SNI	Melakukan Identifikasi terkait usulan SNI Tanaman Pangan
2	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura di Sumatera Barat	1 Standar	1 Dokumen/Naskah SNI	Melakukan Identifikasi terkait usulan SNI Hortikultura
3	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat	1 Standar	1 Dokumen/Naskah SNI	Melakukan Identifikasi terkait usulan SNI Perkebunan
4	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan di Sumatera Barat	1 Standar	1 Dokumen/Naskah SNI	Melakukan Identifikasi terkait usulan SNI Peternakan
5	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian di Sumatera Barat	100 Orang	Terdiseminaskannya ke 100 orang	Melakukan diseminasi terstandar tentang manggis dan gambir
6	Taman Agrostandar	100 Orang	Terdiseminaskannya ke 100 orang	Melakukan diseminasi tentang budidaya di taman yang terstandar
7	Pekan Nasional Petani Nelayan ke XVI	200 Orang	Terdiseminaskannya ke 200 orang	Melakukan diseminasi terkait agenda nasional
8	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Sumatera Barat	100 Orang	Terdiseminaskannya ke 100 orang	Melakukan pencetakan materi penyuluhan spesifik lokasi yang terstandar
9	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik lokasi Sumatera Barat	1 lembaga	Terdampinginya 1 lembaga penerap standar instrumen pertanian	Melakukan pendampingan dan pengawalan produk menuju pendaftaran SNI
10	Bimbingan Teknis Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sumatera Barat	200 Orang	Terdiseminaskannya ke 200 orang	Melakukan diseminasi terkait perbenihan tanaman pangan
11	Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat (7 Ton)	7 Ton	Dihasilkan benih padi terstandar 7 ton	Melakukan perbanyak benih yang tersatandardisasi
12	Produksi Pembibitan Ayam Kub di Sumatera Barat (4000 ekor)	4000 ekor	Dihasilkan bibit ayam KUB terstandar 4000 ekor	Melakukan perbanyak bibit ternak yang tersatandardisasi

Rencana Program/Kegiatan Balai BPSI Pertanian Sumatera Barat TA. 2024:

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran (Rp)
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat	1 standar	1 Dokumen/Naskah SNI	Melakukan Identifikasi terkait usulan SNI Perkebunan	90.000.000
2	Diseminasi Hasil Standar Diseminasi Instrumen Pertanian di Sumatera Barat	100 orang	Terdiseminaskannya ke 100 orang	Melakukan diseminasi terstandar	150.000.000
3	Pendampingan Penerapan Standar Instrument Pertanian Spesifik Lokasi di Sumatera Barat	1 lembaga	Terdampinginya 1 lembaga penerap standar instrumen pertanian	Melakukan pendampingan dan pengawalan produk menuju pendaftaran SNI	150.000.000
4	Bimbingan Teknis Penerapan Standar Instrument Pertanian di Sumatera Barat	200 orang	Terdiseminaskannya ke 200 orang	Melakukan diseminasi terkait perbenihan tanaman pangan	400.000.000
5	Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat	25 ton	Dihasilkan benih padi terstandar 2 ton	Melakukan perbanyak benih yang tersatandardisasi	537.500.000

	Barat		6250 G2	yang tersatandardisasi	
7	Produksi Pembibitan Ayam KUB di Sumatera JBarat	5000 ekor	Dihasilkan bibit ayam KUB terstandar 5000 ekor	Melakukan perbanyak bibit ternak yang tersatandardisasi	125.000.000

➤ IP2TP Balitro Laing;

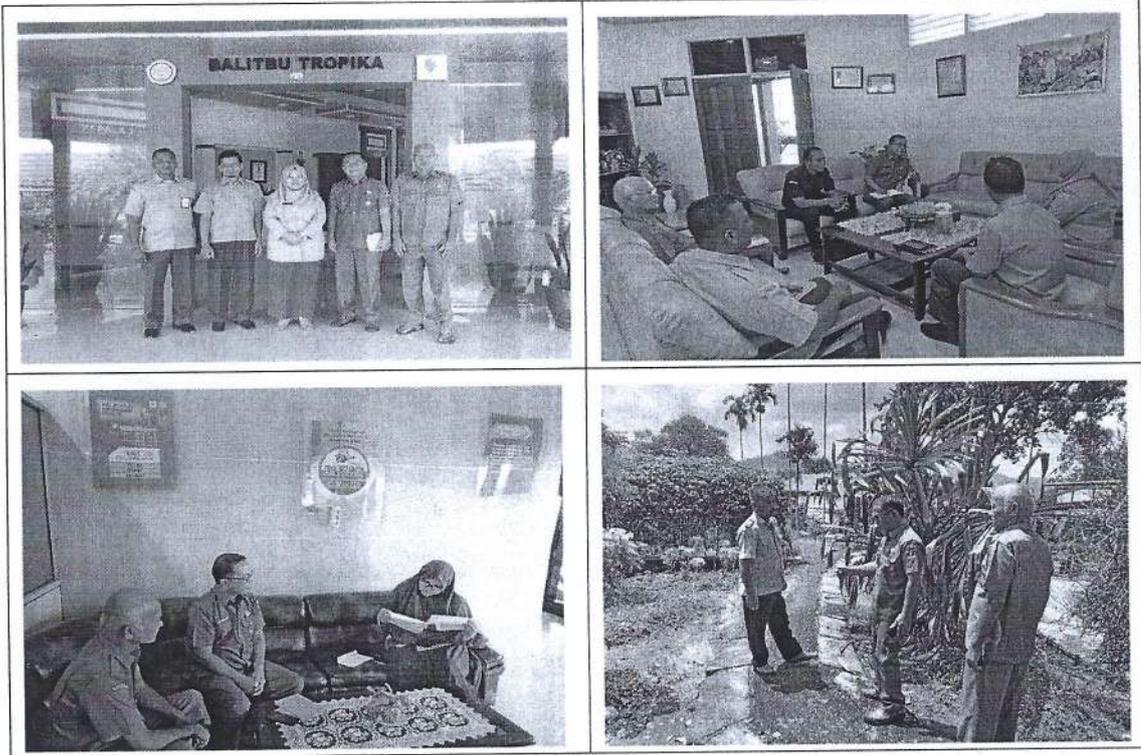
1. IP2TP Balitro Laing terletak dalam daerah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dengan jarak \pm 5 km arah utara dari pusat kota. Luas areal kebun percobaan adalah 75 ha yang berada pada daerah ketinggian sedang, antara 460 sampai 480 m di atas permukaan laut. Secara umum jenis tanahnya adalah Podsolik (ultisol) dan Alluvial dengan topografi bergelombang sampai berbukit. Curah hujan rata-rata antara 1.800 – 2.100 mm/th dan merupakan daerah bayangan hujan. Bulan basah berkisar antara 5-6 bulan (September – April) dan bulan kering antara 2 – 3 bulan (Mei – Agustus). Sedangkan suhu rata-rata berkisar antara 21°C sampai 30°C, sehingga daerah ini termasuk tipe iklim E2 menurut klasifikasi Las dan Oldeman;
2. IP2TP Balitro Laing merupakan tempat pemeliharaan tanaman rempah, obat dan atsiri. Pengelolaan show window teknologi melalui petak pameran, dan produksi minyak dari beberapa tanaman atsiri seperti serai wangi, kausena, lemon grass dan kayumanis Ceylon. Disamping itu IP2TP Laing juga sering memberikan bimbingan teknis dalam hal budidaya dan pengolahan tanaman atsiri, baik kepada petani, mahasiswa maupun dosen-dosen perguruan tinggi dan juga menerima kegiatan magang dari petani dan mahasiswa;
3. Pengembangan vegetasi IP2TP Laing dilakukan terutama untuk menanam lahan-lahan yang masih kosong dengan berbagai tanaman atsiri. Komoditas atsiri yang banyak ditanam akhir-akhir ini adalah Kayumanis Ceylon, Ylang-ylang, Serai wangi, dan Palmarosa;
4. IP2TP Balitro Laing mengkonservasi plasma nutfah tanaman rempah, obat, dan atsiri sebanyak 140 spesies dengan 2239 aksesori. Konservasi dilakukan dalam keadaan tumbuh di rumah kaca dan lapang;
5. IP2TP Balitro Laing membangun kebun induk untuk komoditas:
 - a. Serai wangi varietas Serai wangi 1 (1 Ha)
 - b. Serai wangi varietas Sitrona 1 (1 Ha)
 - c. Serai wangi varietas Sitrona 2 (1 Ha)
 - d. Nilam varietas Sidikalang (1 Ha)
6. Anggaran Kegiatan 2023 IP2TP Balitro Laing hanya bersifat anggaran kegiatan Rutin sedangkan untuk kebutuhan lainnya dilakukan secara mandiri;
 - **Dukungan dari Pemerintah Provinsi**
 - a. Pengembangan varietas unggul lokal Sumatera Barat seperti: Durian Tambago Sungai Tarab (Kab. Tanah Datar), Durian Kalumpang (Kab. Sijunjung), Jambu biji Piraweh Ampalu (Kab. Padang Pariaman), Alpukat Tongar (Kab. Pasaman), Pisang Ameh (Kab. Pariaman), Alpukat Mega Paninggahan & Mega Paninggahan (Kab. Solok), Pisang Roti (Kab. Solok Selatan), Jengkol bareh dan lokan (Kab. Pesisir Selatan), Petai Aripan 1 (Kab. Solok), Manggis Ratu Kamang (Kab. Agam);
 - b. Distribusi benih sumber tanaman buah tropika produksi UPBS BPSI Tropika untuk pengembangan benih selanjutnya (Benih Bina);
 - c. Pengembangan varietas unggul nasional seperti Durian Matahari, MK Hortimart, Kromo Banyumas (Bawor), Namlung; Alpukat Cipedak, Kendil, Raja Giri (Mentega), Pamelang (menengah) Wina (menengah) dll.
 - d. Dukungan dalam pengembangan kawasan buah tropika yang menerapkan standar;
 - e. Sinergi sosialisasi penerapan standar dibidang pertanian.
 - **Kendala/Permasalahan;**
 - Masih minimnya dana untuk kegiatan standarisasi dan penerapannya.
 - Membantu diseminasi dan penyebarluasan inovasi teknologi;
 - Dukungan kelembagaan pasar.

Demikian disampaikan atas perkenan dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas,

Afrizon, S.Sos

Dokumentasi:



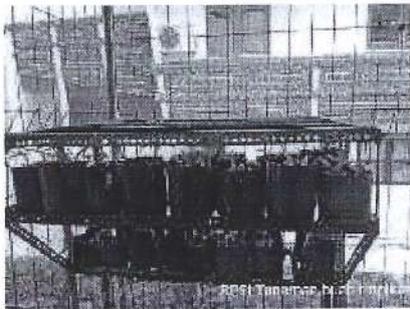
A. KEGIATAN LABORATORIUM PEMULIAAN DAN KULTUR JARINGAN



Globular



Globular



Aklimatisasi / transplanting

B. KEGIATAN LABORATORIUM KIMIA DAN PASCA PANEN



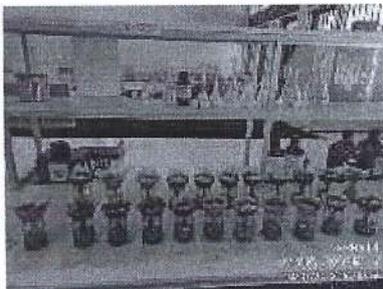
Pengujian PH



Analisa Makro Tanah



Analisa C Organik



Analisa total asam



Analisa vitamin C



Pengujian N



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
P A D A N G

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Bpk. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Kabid. Ekonomi dan SDA
Dari : Tim perjalanan dinas
Tanggal : 11 Agustus 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka monitoring evaluasi
Kegiatan yang dibiayai APBN di Balai/UPT Kementerian.

Isi :

I. Pendahuluan:

A. Dasar :

1. Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap Nota Dinas Kabid Ekonomi dan SDA Nomor 050/358/VIII/DD/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Mohon Persetujuan melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring evaluasi dana kegiatan yang dibiayai APBN tahun 2023 ke Kab. Solok dan Kota Solok.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda No. 094.3/252/VIII/SPT/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 7 Agustus 2023

B. Untuk Melakukan :

Perjalanan dinas dalam rangka monitoring evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang dibiayai APBN tahun 2023 pada Balai/UPT Kementerian di Sumatera Barat

C. Waktu Pelaksanaan dan Tempat :

Pada tanggal 8 Agustus 2023 ke Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Pegawai yang ditugaskan:

1. Rosalinda, SS, MM
2. Afrizon, S.sos
3. Erik Agustian

II. Isi Laporan:

Untuk proses penyusunan perencanaan dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah;

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA terkait yang didanai APBN tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat, disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. BPTU-HPT Padang Mengatas merupakan satu satunya UPT Pembibitan ternak yang dikhususkan untuk memproduksi bibit sapi potong jenis Simental, Limosin dan Sapi Pesisir di Indonesia.
2. Prioritas kinerja BPTU-HPT Padang Mengatas adalah peningkatan produksi bibit unggul ternak sapi potong yang berkualitas sesuai dengan mottonya "excellent breed is our priority".

3. BPTU HPT Padang Mengatas terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan jarak dari pusat kota Payakumbuh 10 Km dan dari pusat Kota Provinsi (kota Padang) 136 Km. Walaupun terletak di pinggir Gung Sago, BPTU-HPT Padang Mengatas sebahagian besar batas lahannya bersinggungan dengan pemukiman masyarakat, adapun batas tersebut adalah:
 - a. Sebelah Utara : Kenagarian Mungo dan Bukit Sikumpar Kec Luak
 - b. Sebelah Selatan : Gunung Sago
 - c. Sebelah Timur : Dusun Talaweh Kenagarian Labuah Gunung, Kec Lareh Sago Halaban
 - d. Sebelah Barat : Kenagarian Sungai Kamuyang Kec Luak
 Luas lahan BPTU-HPT Padang Mengatas mencapai 280 Ha, dengan komposisi penggunaan lahan adalah untuk pastura (padang pengembalaan) 211 Ha, kebun rumput 28 Ha, dan luas bangunan kantor, kandang dan jalan 41 Ha, lahan seluas tersebut berpotensi untuk memelihara sapi sebanyak 1.500 – 2.000 ekor sesuai dengan jenis dan bangsanya.
 4. Tugas BPTU-HPT Padang Mengatas mempunyai Tugas "melaksanakan pemulihan, produksi dan pemasaran bibit sapi potong"
 5. Fungsi BPTU-HPT Padang Mengatas mempunyai fungsi sebagai
 - Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
 - Melaksanakan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
 - Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul;
 - Pelaksanaan recording ternak unggul;
 - Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah;
 - Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul;
 - Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
 - Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;
 - Pengolahan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul sertifikat dan hijauan pakan ternak;
 - Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul;
 - Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul;
 - Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul;
 - Pengelolaan prasarana dan sarana teknis;
 - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTUH.
- ✓ Rencana Program/Kegiatan Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas TA. 2023: (terlampir)
- ✓ Rencana Program/Kegiatan Tahun 2024 (terlampir):
- **Dukungan dari Pemerintah Provinsi**
 - a. Untuk pengadaan sapi potong tahun 2024, sesuai dengan arahan di juknis;
 - b. untuk pengadaan ternak kambing/domba untuk Kep. Mentawai Lokasi penerima belum ditetapkan

Kendala/Permasalahan;

- Penetapan jumlah ternak di kelompokan berdasarkan verifikasi dan kemampuan kelompok, dikarenakan program penambahan bantuan ternak dari program DKS tahun 2021;
- Proses pengadaan kambing lokal di Kep. Mentawai terkendala, dikarenakan lalulintas ternak belum bisa antar pulau;
- Biaya operasional terkait dengan pengamanan area lahan yang sangat luas sementara biaya terbatas.

Dokumentasi:



Demikian disampaikan atas perkenan dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas,

Afrizon, S.Sos



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Bpk. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Kabid. Ekonomi dan SDA
Dari : Tim perjalanan dinas
Tanggal : 11 Agustus 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka monitoring evaluasi Kegiatan yang dibiayai APBN di Balai/UPT Kementerian.

Isi :

I. Pendahuluan:

A. Dasar :

1. Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap Nota Dinas Kabid Ekonomi dan SDA Nomor 050/359VIII/DD/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Mohon Persetujuan melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring evaluasi dana kegiatan yang dibiayai APBN tahun 2023 ke Kab. Solok dan Kota Solok.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda No. 094.3/253/VIII/SPT/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 7 Agustus 2023

B. Untuk Melakukan :

Perjalanan dinas dalam rangka monitoring evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang dibiayai APBN tahun 2023 pada Balai/UPT Kementerian di Sumatera Barat

C. Waktu Pelaksanaan dan Tempat :

Pada tanggal 9 Agustus 2023 ke Kabupaten Agam

D. Pegawai yang ditugaskan:

1. Afrizon, S.sos
2. Linda Firani, A.Md
3. Amrizal
4. Dasrial

II. Isi Laporan:

Untuk proses penyusunan perencanaan dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah;

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA terkait yang didanai APBN tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat, disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/Ot.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Veteriner (B-Vet) menyatakan bahwa Balai Veteriner yang selanjutnya disebut B-Vet adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen. B-Vet mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewanDeregulasi kebijakan bertujuan

M. Khatib Sulaiman
Sty Saham
11/08/23

Yth. Bpk. Kabid
Mohon arahannya
11/08/23

menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi atau kebijakan yang sifatnya menghambat. Kementerian/lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

2. Dalam menjalankan tugas Balai Veteriner (B-Vet) menyelenggarakan fungsi antara lain;

- ✓ penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- ✓ pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- ✓ pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- ✓ pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- ✓ pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- ✓ pembuatan peta penyakit hewan regional;
- ✓ pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
- ✓ pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
- ✓ pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- ✓ pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness);
- ✓ pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- ✓ pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- ✓ pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, puskesmas, dan kesejahteraan hewan;
- ✓ pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- ✓ pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
- ✓ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- ✓ pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- ✓ pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- ✓ pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- ✓ pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner; dan
- ✓ pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga B-Vet.

3. Program/Kegiatan TA. 2023 Balai Veteriner (terlampir):

4. Rencana Program/Kegiatan TA. 2024 Balai Veteriner (terlampir):

• **Kendala/Permasalahan:**

- 1) Keterbatasan Anggaran dalam melakukan surveilans penyakit di Kabupaten Mentawai mengingat Kabupaten Mentawai merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan biaya transportasi yang tinggi;
- 2) Keterbatasan ternak anjing yang divaksinasi Rabies;
- 3) Keterbatasan ternak sapi/Kerbau yang divaksinasi Septicemia Epizootika (SE)
- 4) Keterbatasan ternak sapi Bali yang divaksinasi Jembrana
- 5) Realisasi vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih rendah.

• **Dukungan yang di harapkan dari Pemda:**

- 1) Adanya bantuan anggaran dalam melakukan surveilans penyakit di Kabupaten Mentawai;
- 2) Adanya bantuan anggaran tambahan dalam pengadaan vaksin Rabies dan Biaya Operasional Vaksinasi Petugas lapangan;
- 3) Adanya bantuan anggaran tambahan dalam pengadaan vaksin SE dan biaya operasional vaksinasi Petugas Lapangan;
- 4) Adanya bantuan anggaran tambahan dalam pengadaan vaksin Jembrana dan Biaya Operasional Vaksinasi Petugas Lapangan;

BALAI VETERINER BUKITTINGGI
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2023

No.	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Kendala/Permasalahan	Keterangan
1	Pengadaan Ayam	3000 Ekor	100%	Kabupaten Tanah Datar	Rp 101.400.000	-	Realisasi 27 Juli 2023
2	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis Antraks, Jembrana, Bakterial dan PMK	1 Keg	100%	Kabupaten Padang Pariaman	Rp 8.160.000	-	Realisasi 1 s.d 4 Agustus 2023
3	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis brucellosis, dan PMK	1 Keg	100%	Kota Payakumbuh	Rp 4.560.000	-	Realisasi 1 s.d 3 Agustus 2023
4	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Hewan Lainnya	1 Keg	100%	Kota Payakumbuh	Rp 6.080.000	-	Realisasi 25 s.d 28 Juli 2023
5	Surveilans AMR Nasional	1 Keg	100%	Kota Padang Panjang	Rp 7.500.000	-	Realisasi 24 s.d 28 Juli 2023
6	Investigasi Penyakit Hewan	1 Keg	100%	Kota Bukittinggi	Rp 760.000	-	Realisasi 23 Juli 2023
7	Monitoring dan Surveilans produk Hewan / Monitoring kesmavet	1 Keg	100%	Kabupaten Solok Selatan	Rp 12.190.000	-	Realisasi 10 s.d 15 Juli 2023
8	Surveilans AMR Nasional (100 Produk) / Monitoring AMR dan penyidikan dan pengujian penyakit AI	1 Keg	100%	Kabupaten Tanah Datar	Rp 3.870.000	-	Realisasi 10 s.d 13 Juli 2023
9	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Kota Padang	Rp 9.515.000	-	Realisasi 3 s.d 6 Juli 2023
10	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp 7.600.000	-	Realisasi 19 s.d 23 Juni 2023
11	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis / Pengecekan kesehatan & pemeriksaan lab kandidat sapi	1 Keg	100%	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp 380.000	-	Realisasi 12 Juni 2023
12	Surveyance dan Pengambilan sampel di UPT Perbibitan, Pembinaan Lab (545 sampel) / Surveillance UPT	1 Keg	100%	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp 5.700.000	-	Realisasi 22 s.d 26 Mei 2023

13	Surveilans dan Penyidikan Penyakit AI Pengambilan Sampel	1 Keg	100%	Kota Pariaman	Rp 6.000.000	-	Realisasi 15 s.d 17 Mei 2023
14	Surveilans dan Penyidikan Penyakit AI Pengambilan Sampel	1 Keg	100%	Kota Bukittinggi	Rp 4.530.000	-	Realisasi 15 s.d 17 Mei 2023
15	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis Pengambilan Sampel	1 Keg	100%	Kota Sijunjung	Rp 5.975.000	-	Realisasi 15 s.d 17 Mei 2023
16	Surveyance dan Pengambilan sampel di UPT Perbibitan, Pembinaan Lab (545 sampel) Pembinaan Laboratorium	1 Keg	100%	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp 2.280.000	-	Realisasi 15 s.d 17 Mei 2023
17	Surveyance dan Pengambilan sampel di UPT Perbibitan, Pembinaan Lab (545 sampel) Pembinaan Laboratorium	1 Keg	100%	Kota Padang	Rp 5.220.000	-	Realisasi 09 s.d 11 Mei 2023
18	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Parasiter Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 10.519.000	-	Realisasi 08 s.d 12 Mei 2023
19	Surveilans AMR Nasional (100 Produk) Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Kab. Agam, Kab. Lima puluh kota, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Payakumbuh	Rp 5.010.000	-	Realisasi 08 s.d 12 Mei 2023
20	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Kabupaten Solok Selatan	Rp 7.615.000	-	Realisasi 02 s.d 05 Mei 2023
21	Surveyance dan Pengambilan sampel di UPT Perbibitan, Pembinaan Lab (545 sampel)	1 Keg	100%	Kota Payakumbuh	Rp 3.420.000	-	Realisasi 02 s.d 04 Mei 2023
22	Monitoring dan Surveilans produk Hewan (800 Produk) Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Agam Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Bukittinggi	Rp 2.720.000	-	Realisasi 04 s.d 06 Mei 2023
23	Monitoring dan Surveilans produk Hewan (800 Produk) Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh	Rp 6.840.000	-	Realisasi 04 s.d 06 Mei 2023
24	Penyidikan dan Pengujian Penyakit PMK (2.000 sampel) Brucellosis, JD, Bakterial, & LSD	1 Keg	100%	Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh	Rp 9.490.000	-	Realisasi 14 s.d 17 Maret 2023

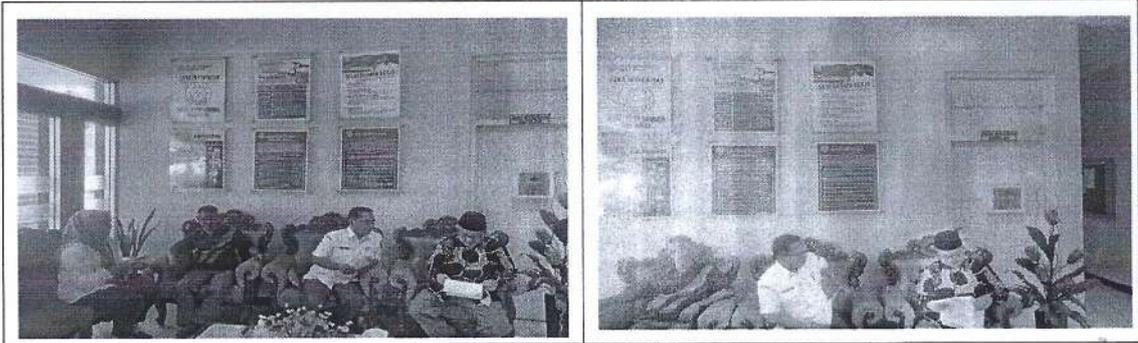
25	Surveilance dan Pengambilan sampel di UPT Perbibtan, Pembinaan Lab (545 sampel)	1 Keg	100%	pasaman barat dan limapuluh kota	Rp 5.345.000	-	Realisasi 14 s.d 16 Maret 2023
26	Operasional Kegiatan dan Administrasi CPCL Banpem Kelompok penerima Bantuan Ayam	1 Keg	100%	Kabupaten Tanah Datar	Rp 3.040.000	-	Realisasi 14 s.d 16 Maret 2023
27	Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Viral lainnya (371 sampel) Exotic	1 Keg	100%	Sijunjung dan Tanah Datar	Rp 3.170.000	-	Realisasi 07 s.d 08 Maret 2023
28	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Anthrax AI,Rabies,HC, ASF, dan PMK	1 Keg	100%	Kabupaten Mentawai	Rp 15.080.500		Realisasi 06 s.d 12 Maret 2023
29	Surveilans dan Penyidikan Penyakit AI Kompartemen AI	1 Keg	100%	Kabupaten Padang Pariaman	Rp 4.820.000		Realisasi 02 s.d 04 Maret 2023
30	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis	1 Keg	100%	Kota Padang panjang dan Kabupaten Agam	Rp 5.145.000		Realisasi 28 Februari s.d 03 Maret ei 2023
31	Investigasi Penyakit Hewan	1 Keg	100%	Kabupaten Padang Pariaman	Rp 1.135.000		Realisasi 23 Februari s.d 23 Februari 2023
32	Investigasi Penyakit Hewan	1 Keg	100%	Kota Payakumbuh	Rp 1.135.000		Realisasi 23 Februari s.d 23 Februari 2023
33	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Kabupaten Pasaman	Rp 6.720.000		Realisasi 21 Februari s.d 23 Februari 2023
34	Surveilans dan Penyidikan Penyakit AI Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Kota Solok	Rp 8.760.000		Realisasi 21 Februari s.d 24 Februari 2023
35	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Kabupaten Pasaman Barat	Rp 10.335.000		Realisasi 21 Februari s.d 24 Februari 2023
36	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Brucellosis Pengambilan sampel	1 Keg	100%	Kota Sawahlunto	Rp 8.180.000		Realisasi 07 s.d 10 Februari 2023
37	Surveilans dan Penyidikan Penyakit AI Pengambilan Sampel	1 Keg	100%	Kota Padang	Rp 7.260.000		Realisasi 07 s.d 10 Februari 2023
38	Surveilans dan Penyidikan Penyakit Rabies Pengambilan	1 Keg	100%	Kota Padang Panjang	Rp 2.270.000		Realisasi 07 s.d 8 Februari 2023
Total Anggaran					Rp 319.729.500		Januari s.d Juli 2023

BALAI VETERINER BUKITTINGGI
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2024

No.	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokus	Anggaran	Kendala/Permasalahan	Keterangan
1	Pengadaan Ayam						Menunggu SK Kelompok 2024
2	Pengadaan Kambing						Menunggu SK Kelompok 2024
3	Surveilans dan Monitoring Penyakit Brucellosis	5 Keg		Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasera	Rp 50.000.000		Jadwal tujuan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota
4	Surveilans dan Monitoring Penyakit PMK	5 Keg		Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam	Rp 50.000.000		
5	Surveilans dan Monitoring Penyakit Rabies	4 Keg		Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Bukittinggi	Rp 40.000.000		
6	Surveilans dan Monitoring Penyakit AI	4 Keg		Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman	Rp 30.000.000		
7	Surveilans dan Monitoring Penyakit Hog Cholera	1 Keg		Kabupaten Mentawai	Rp 10.000.000		
8	Surveilans dan Monitoring Penyakit Anthrax	1 Keg		Kabupaten Mentawai	Rp 15.000.000		
9	Surveilans dan Monitoring Penyakit Bakterial	1 Keg		Kabupaten Sijunjung	Rp 10.000.000		
10	Surveilans dan Monitoring Penyakit Viral	1 Keg		Kota Sawahlunto	Rp 10.000.000		
11	Pembinaan Laboratorium	2 Keg		Kota Padang	Rp 20.000.000		
Total Anggaran					Rp 235.000.000		Januari s.d Desember 2024

melibatkan TNI/Polri/Perangkat Nagari/Jorong untuk meningkatkan *Herd Imunity*.

- Dokumentasi:



Demikian disampaikan atas perkenan dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas,


Linda Firani, A.Md



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Bpk. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Kabid. Ekonomi dan SDA
Dari : Tim perjalanan dinas
Tanggal : 14 Agustus 2023
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka monitoring evaluasi Kegiatan yang dibiayai APBN di Balai/UPT Kementerian.

Isi :

I. Pendahuluan:

A. Dasar :

1. Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap Nota Dinas Kabid Ekonomi dan SDA Nomor 050/357/VIII/DD/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Mohon Persetujuan melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring evaluasi dana kegiatan yang dibiayai APBN tahun 2023 ke Kab. Solok dan Kota Solok.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda No. 094.3/254/VIII/SPT/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 7 Agustus 2023

B. Untuk Melakukan :

Perjalanan dinas dalam rangka monitoring evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang dibiayai APBN tahun 2023 pada Balai/UPT Kementerian di Sumatera Barat

C. Waktu Pelaksanaan dan Tempat :

Pada tanggal 10 Agustus 2023 ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang

D. Pegawai yang ditugaskan:

1. Afrizon, S.sos
2. Dasrial

II. Isi Laporan:

Untuk proses penyusunan perencanaan dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah;

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA terkait Program/kegiatan yang didanai APBN tahun 2023 di Balai/UPT/Stasiun Kementerian Kelautan Perikanan yang berada di Provinsi Sumatera Barat, disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

A. Balai/UPT/Stasiun:

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

1. Berdasarkan Permen KP Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Padang merupakan unit pelaksana teknis di bawah eselon-1 Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area

*Yth. Kabid Eko-SDA
skn Gaban ekono
18/8-23*

Yth. Bpk. Kaban

Mohon ardhannya

df 18/8/23

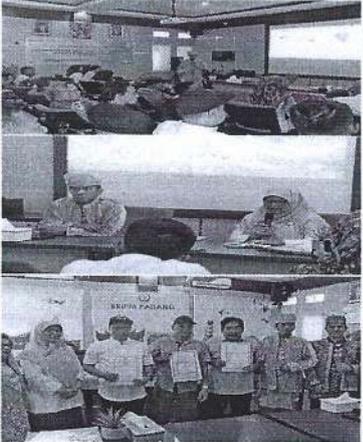
- ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
2. Sesuai dengan 3 (tiga) pilar pembangunan KKP yakni Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Kesejahteraan (*Prosperity*), misi BKIPM yaitu:
 - a. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan;
 - b. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi;
 - c. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit;
 3. Tugas BKIPM adalah melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
 4. Fungsi BKIPM adalah:
 - ✓ penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - ✓ pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia
 - ✓ pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan
 - ✓ pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain
 - ✓ pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - ✓ pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity)
 - ✓ pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi
 - ✓ pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu
 - ✓ pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - ✓ pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
 - ✓ pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan
 - ✓ pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
 - ✓ penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium
 - ✓ penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - ✓ pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan

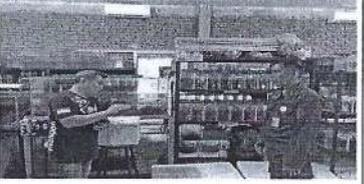
➤ Program/Kegiatan Tahun Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:

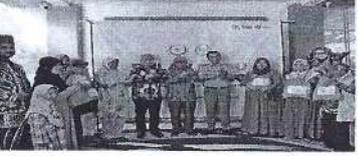
➤

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2023

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokasi	Anggaran	Kendala/Permasalahan	Keterangan
1	BIMTEK Pemenuhan persyaratan Negara tujuan ekspor	1	Kegiatan	Padang	100.000.000	-	Melibatkan anggota DPR Komisi IV 
2	Sertifikasi CPIB	5	Lembaga	Sumbar	30.350.000	-	Pada Suplier Hasil Perikanan 
3	BIMTEK CPIB	1	Kegiatan	Sumbar	19.650.000	-	Pada Suplier Hasil Perikanan 
4	Inpres Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (INPRES 01)	1	Kegiatan	Sumbar	34.500.000	-	Sentra pemasaran / produksi 

							
5	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK)	7	Lokasi	Sumbar	80.800.000	-	<p>Kelompok petani dan nelayan</p>  
6	Identifikasi sebaran jenis ikan dilindungi, dilarang, dan/atau bersifat invasif	2	Lokasi	Sumbar	22.700.000	-	<p>Sentra Aquarium</p>   
7	Pengawasan dan pengendalian di IKI	6	Lembaga	Sumbar	29.000.000	-	<p>Inspeksi dan surveilan di IKI</p>  

							
8	Pekan Pelayanan Publik	1	Kegiatan	Sumbar	25.000.000	-	  
9	Bulan Mutu Karantina	1	Kegiatan	Sumbar	135.000.000	-	<p>Melibatkan anggota DPR Komisi IV</p>  
10	Quality Assurance	1	Kegiatan	Sumbar	25.000.000	-	<p>Kampung nelayan dan budaya</p>   

Rencana Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2024

No	Kegiatan	Volume	Output/Keluaran	Lokasi	Anggaran	Dukungan yang diharapkan dari Pemda	Keterangan
1	Sertifikasi CPIB	3	Lembaga	Sumatera Barat	40.000.000		Pada Suplier Hasil Perikanan
2	Inpres Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (INPRES 01)	2	Lokasi	Sumatera Barat	50.000.000	-	Sentra pemasaran / produksi
3	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK)	7	Lokasi	Sumatera Barat	70.309.000	-	Kelompok petani dan nelayan
4	Identifikasi sebaran jenis ikan dilindungi, dilarang, dan/atau bersifat invasif	2	Lokasi	Sumatera Barat	18.841.000	-	Sentra Aquarium
5	Manajemen Risiko lalu lintas hasil perikanan	1	Lokasi	Sumatera Barat	5.000.000	-	Tanggap darurat penyakit ikan karantina/tertentu
6	Pengawasan dan pengendalian di IKI	6	Lembaga	Sumatera Barat	33.350.000	-	Inspeksi dan surveilan di IKI
7	Pekan Pelayanan Publik	1	Kegiatan	Sumatera Barat	12.500.000	-	
8	Bulan Bakti Karantina	1	Kegiatan	Sumatera Barat	108.200.000	-	Melibatkan anggota DPR Komisi IV
9	BIMTEK Jaminan Mutu	1	Kegiatan	Suamatera Barat	105.000.000	-	Melibatkan anggota DPR Komisi IV
10	Quality Assurance	1	Kegiatan	Sumatera Barat	111.260.000	-	Kampung nelayan dan budidaya

B. Balai/UPT/Stasiun:

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

1. Dalam rangka mendukung dan melaksanakan pengelolaan WP3K sesuai arahan pembangunan nasional, maka Rencana Strategis sangatlah diperlukan sebagai *guidance* untuk mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Rencana Strategis merupakan alat penyelarasan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
2. BPSPL Padang dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Nomor PER.18/MEN/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor: Per.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.
3. BPSPL Padang mengelola tujuh (7) Provinsi se-Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 58 Kabupaten/Kota Pesisir se-Sumatera. BPSPL Padang yang berkantor di Kota Padang kemudian menambah kantor satuan kerja di tiga (3) provinsi yaitu Satker Medan, Satker Pekanbaru, dan Satker Tanjungpinang untuk memudahkan pelayanan rekomendasi Hiu dan Pari pada tahun 2011. Dalam perkembangannya, di tahun 2020, KKP resmi menjadi otoritas pengelola CITES untuk Jenis Ikan. Merespon ini, BPSPL Padang sebagai salah satu UPT di Sumatera turut melengkapi kantor satker di Aceh, Jambi, dan Sumatera Selatan dengan harapan semakin mendekatkan dan mempercepat pelayanan dengan masyarakat.
4. Balai Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan Laut (BPSPL) - Padang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan yang meliputi antara lain perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau- pulau kecil, serta ekosistemnya
 2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya
 3. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya
 4. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan
 5. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi
 6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 7. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut

- Program/Kegiatan TA. 2023 (terlampir) BPSPL Padang
- Rencana Program/Kegiatan TA. 2024 (terlampir) BPSPL

• Dukungan dari Pemerintah Provinsi

- a. Perlunya data dan Informasi berdasarkan Parameter Evaluasi efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (evika) di Sumbar;
- b. Daftar Mitra strategis pengelolaan pesisir, laut dan pulau – pulau kecil Sumatera Barat;
- c. Perlunya Proposal permohonan bantuan dari Kelompok Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan
- d. Kolaborasi dengan mitra strategis dan promosi kegiatan rehabilitasi untuk pengembangan lokasi;
- e. Data pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES di Sumatera Barat

• Kendala/Permasalahan;

- Ada beberapa kegiatan yang masih berbintang (diblokir) oleh Kementerian.

Balai: BPSPL PADANG

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023

No	Kegiatan	Lokus	Volume	Output/ Keluaran	Anggaran (Rp)	Kendala/Per masalah	Keterangan
1	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Pendampingan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	1	Provinsi	25,000,000	-	Anggaran untuk 7 (tujuh) Provinsi di wilayah Kerja
		Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi kepada Kelompok Poseidon Diver Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	Kelompok	114,200,500	-	
		Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK Tahun 2022	1	Kelompok	1,440,000	-	
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi di Pasaman Barat	1	Kelompok/Kawasan	125,000,000	Termasuk dalam anggaran yang diblokir	Lokasi tentative

No	Kegiatan	Lokus	Volume	Output/ Keluaran	Anggaran (Rp)	Kendala/Per masalah	Keterangan
		<p>Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidat di Kab. Kep. Mentawai. 2. Teripang di Kab. Kep. Mentawai. 3. Penyu di Kab. Kep. Mentawai 4. Terumbu Karang di Kab. Pesisir Selatan 5. Bilih di Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar 	5	Jenis	263,472,500	-	
		<p>Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di Kab. Pesisir Selatan</p>	1	Jenis	33,432,410	-	
		<p>Sosialisasi dan Inisiasi <i>First Responder</i> kejadian biota laut terdampat di Kab. Pesisir Selatan</p>	1	Lokasi	15,500,000	-	

No	Kegiatan	Lokus	Volume	Output/ Keluaran	Anggaran (Rp)	Kendala/Per masalah	Keterangan
		Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks C/ITES di Sumatera Barat	2	Layanan	26,862,857	-	1. Layanan SAJI-DN 2. Layanan Rekomendasi
2	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Bulan Cinta Laut dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut di Kota Padang	1	Kelompok/Kawasan	125,000,000	Termasuk dalam anggaran yang diblokir	
3	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Inventarisasi Kebutuhan Sarana/Prasarana di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil/Terluar	6	Kelompok	125,000,000	Termasuk dalam anggaran yang diblokir	Anggaran untuk 7 (tujuh) Provinsi di wilayah Kerja
4	Perencanaan Ruang Laut	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Kota Padang Identifikasi dan Verifikasi Lapangan Pemanfaatan Ruang Laut	1	Lokasi	25,796,651	-	Lokasi tentative berdasarkan permohonan

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024

No	Kegiatan	Lokus	Volume	Output/ Keluaran	Dukungan yang Diharapkan	Keterangan
1	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Pendampingan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK Tahun 2023 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan	1 1 3 1 1 5	Provinsi Kesepakatan Kelompok Kelompok Kelompok/ Kawasan Jenis	Data dan informasi berdasarkan Parameter Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika) di Sumatera Barat Daftar Mitra strategis pengelolaan pesisir, laut dan pulau – pulau kecil Sumatera Barat Proposal permohonan bantuan dari Kelompok Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan Proposal permohonan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi kawasan konservasi Data sosial ekonomi target jenis.	Lokasi tentative Target untuk 7 (tujuh) wilayah kerja. Kelompok Poseidon Diver Mentawai Target untuk 7 (tujuh) wilayah kerja.

No	Kegiatan	Lokus	Volume	Output/ Keluaran	Dukungan yang Diharapkan	Keterangan
		<p>Dilindungi/Terancam Punah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidat di Agam 2. Teripang di Kab. Kep. Mentawai. 3. Penyau di Kab. Kep. Mentawai 4. Terumbu Karang di Kab. Pesisir Selatan 5. Bilih di Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar 	1	Jenis	Kolaborasi dengan mitra strategis dan promosi kegiatan rehabilitasi untuk pengembangan lokasi.	
		<p>Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di Kab. Pasaman Barat</p>	1	Layanan	Data pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi dan Appendix C/ITES di Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan SAJI-DN 2. Layanan Rekomendasi
2	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	<p>Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendix C/ITES di Sumatera Barat</p> <p>Bulan Cinta Laut dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut di Kota Padang</p>	2	Kelompok/Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan 2. Daftar potensi KUB yang kepedulian kepada pengelolaan sampah laut 	

No	Kegiatan	Lokus	Volume	Output/ Keluaran	Dukungan yang Diharapkan	Keterangan
3	Perencanaan Ruang Laut	Identifikasi dan Verifikasi Lapangan Pemanfaatan Ruang Laut Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	1 1	Lokasi Lokasi	Daftar potensi pulau usaha pemanfaatan ruang laut. 1. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan 2. Daftar izin pemanfaatan ruang laut	

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang,



Fajar Kurniawan

- Dokumentasi :



Demikian disampaikan atas perkenan dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas,

Afrizon, S.Sos